



UNIVERSITAS INDONESIA

DEFENSE DOMINANCE DALAM STABILITAS DI ANTARA
INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA

SKRIPSI

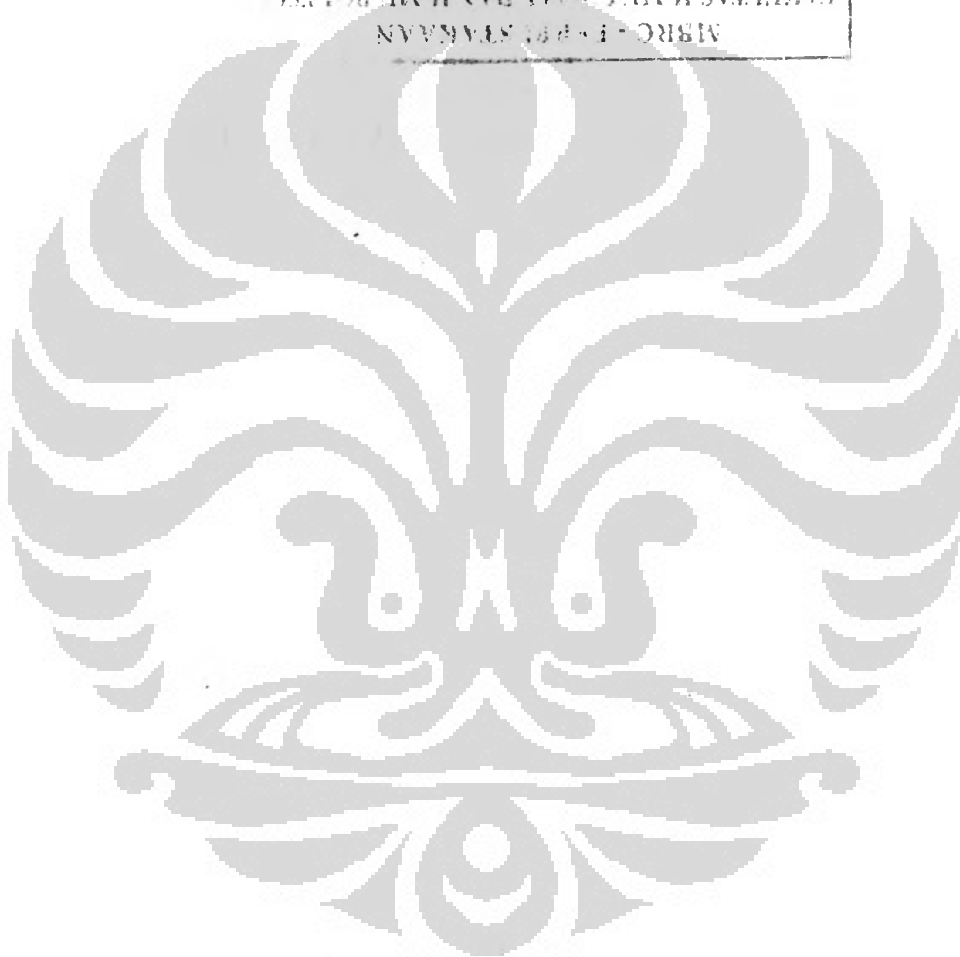
THEO EKANDARISTA YUNUS
0706291445

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM S1-REGULER ILMU HUBUNGAN
INTERNASIONAL

DEPOK
DESEMBER 2010

4
nmh

CALL NUMBER	008/2010
TELEPHONE NUMBER	10-01-2004
INDONESIA	
UNIVERSITAS INDONESIA	
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : THEO EKANDARISTA

NPM : 0706291445

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : THEO EKANDARISTA YUNUS
NPM : 0706291445
Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
Judul Skripsi : DEFENSE DOMINANCE DALAM STABILITAS DI
ANTARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN
SINGAPURA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Makmur Keliat, Ph.D

Sekretaris : Aninda R. Tirtawinata, M.Lit.

Penguji Ahli : Kusnanto Anggoro, Ph.D

Pembimbing : Andi Widjajanto, MA

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 28 Desember 2010

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya kepada Allah Bapa karena hanya dengan anugrahNya skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Ketika penulis sedang mengerjakan penelitian ini, semua data dan sumber daya dapat diperoleh dengan begitu terarah. Ini semua berkat pimpinan Allah yang tidak pernah habis. Hingga pada akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan sempurna, bukan karena kuat dan gagah penulis namun karena Allah saja yang telah bertindak.

Satu hal yang terlintas dalam pikiran penulis ketika hendak memulai penelitian ini adalah mengapa tidak terbentuk perang di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Periode paska Perang Dingin telah membuka berjuta kesempatan untuk terjadinya dinamika yang lebih beragam. Masing-masing negara tidak lagi terikat dengan polaritas. Tiap-tiap negara mencapai kebebasan untuk melakukan setiap hal yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dengan berbagai kepentingan setidaknya mampu memantik benih peperangan menjadi sebuah pertempuran yang nyata.

Permasalahan ini menjadi menarik karena merupakan sebuah masalah yang sudah mengakar, menjadi rahasia umum, dan menimbulkan banyak spekulasi. Ketertarikan ini didasari oleh rasa kebangsaan penulis yang tergelitik dengan permasalahan ini. Di dukung juga dengan rasa ingin mempersembahkan yang terbaik dan berguna bagi nusa dan bangsa, maka penulis melihat permasalahan ini sangat krusial untuk dibahas dan dimengerti lebih dalam. Munculnya perang menjadi sebuah masalah, namun tidak munculnya perang juga menjadi masalah tersendiri karena tanpa pemahaman yang benar, ketidak munculan perang tersebut bisa jadi merupakan bahaya laten bagi stabilitas.

Oleh karena itu penulis mengangkat topik stabilitas Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam sistem yang tidak seimbang (*imbalance of power*). Bukan berarti hendak menegaskan pemikiran neorealisme yang sudah dibangun bertahun-tahun, tetapi penelitian ini kembali memperkaya khazanah dalam pengkajian strategis yang masih berkiblat pada pemikiran struktural *a la* neorealisme. Dengan mengkaji ketiga negara ini, diharapkan mampu memberikan

penjelasan yang kontekstual dan lebih tepat diaplikasikan karena mempertimbangan faktor relativitas di dalamnya. Sejalan juga dengan itu, maka penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan yang lebih luas untuk melihat dinamika di antara ketiga negara ini. Diharapkan para pengambil kebijakan dapat menerima *second thought* dalam penelitian ini untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan relevan dengan situasi internasional saat ini.

Akan tetapi penulis juga menyadari masih banyak kelemahan dari penelitian ini. Penulis menyadari bahwa kritik teori yang dibangun dalam penelitian ini masih dapat diperdebatkan kembali. Oleh karenanya masukan, saran, dan kritik diterima dengan berlapang dada demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Pada akhirnya bukan hanya penulis yang menerima manfaat dari penelitian ini, tetapi juga seluruh pembaca dan badan ilmu yang terus diperluas khazanahnya oleh penelitian ini. Namun tentunya itu semua bukan hanya untuk kepuasan manusia dan dunia ini, tetapi lebih jauh lagi segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya (Roma 11:36). *All the glory must be to the Lord!*

Depok, 15 Desember 2010

Theo Ekandarista Yunus

UCAPAN TERIMA KASIH

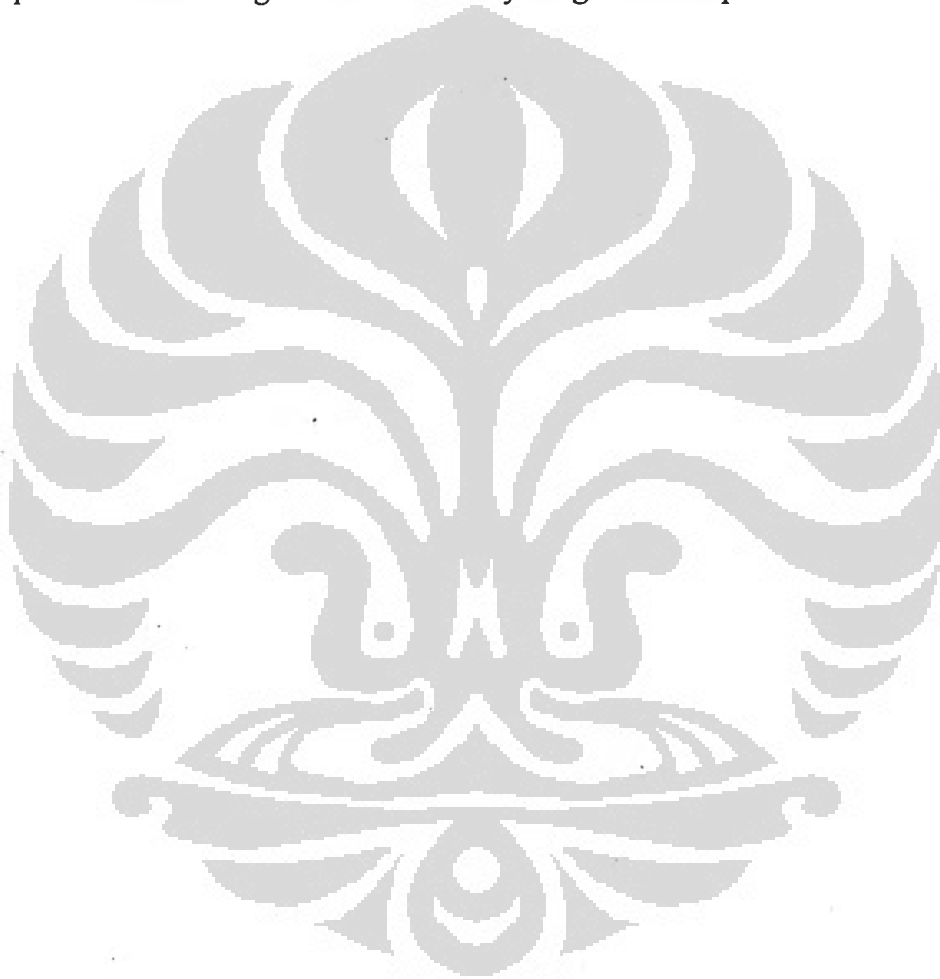
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, Raja sekaligus kekasih jiwa yang memberikan hidup dan kekuatan untuk menghidupinya. Untuk anugrah, berkat, dan pimpinan sehingga penulis sanggup menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, penulis juga memberikan apresiasi dan hormat untuk segenap keluarga besar departemen ilmu hubungan internasional, teman-teman, dan keluarga, yang memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Andi Widjajanto, S. Sos, M.Sc., MS., Ph.D., atas inspirasi, ilmu, bimbingan, dan dukungan yang sangat mendukung penulis menyelesaikan penelitian dan selama mendalami kekuatan studi hubungan internasional. Bersama dengan, Dwi Ardhanariswari, S.Sos, M.Phil., atas bimbingan selama SPM, yang menjadi fondasi awal penulisan penelitian ini. Tanpa saran, masukan, dan kritik beliau, tidak mungkin penelitian ini terselesaikan dengan baik.
2. Kusnanto Anggoro, Ph.D, selaku penguji ahli yang sudah memberikan kritik dan masukan berarti untuk perbaikan penelitian ini.
3. Dr. Hariyadi Wirawan, M. Soc.Sc., sebagai Ketua Departemen HI dan (kembali) Andi Widjajanto, S. Sos, M.Sc., MS., Ph.D., sebagai ketua program S1 Hubungan Internasional yang memberi dukungan pada penulis. Serta Aninda R. Tirtawinata, M.Lit. sebagai sekretaris siding yang juga menjadi pengajar penulis selama dua tahun terakhir ini.
4. Prof. Zainuddin Djafar, atas arahan dan masukan sebagai pembimbing akademik selama penulis menempuh pembelajaran. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan untuk dosen-dosen hubungan internasional antara lain: Drs. Makmur Keliat, Ph.D, Edy Prasetyono, Ph.D., Ali A. Wibisono, Mbak Inung (alm), dan seluruh staf di jurusan Hubungan Internasional.
5. Magdalena Yohana dan Thesa Dwindarista, mama dan adik tersayang yang telah menjadi kekuatan pendorong dan semangat pemacu untuk terus mempersembahkan yang terbaik dalam studi. Terimakasih untuk Ema yang telah tidak henti-hentinya berdoa untuk penulis. Juga keluarga Au

Iyen dan keluarga O Cupi yang telah memberikan fasilitas bagi penulis dapat menuntut ilmu dengan baik. Terimakasih juga untuk A Koh Wawa, Auw Lan, I De Yanti, Om Hans sekeluarga, dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung penulis hingga hari ini.

6. Noviyanti, teman di saat kesukaran dan sahabat dalam segala hal. Terimakasih untuk dukungan moril dan materil; doa, daya, dan upaya, serta seluruh perhatian yang telah mewarnai hari-hari penulis. Juga untuk segenap kenangan yang tidak mungkin terlupakan
7. Keluarga Tiolina Manurung, yang telah mendukung penulis dalam daya dan doa. Terimakasih juga untuk keluarga Ibu Jenny (alm), keluarga Ibu Intana, dan keluarga Bapak Aris yang sudah mendukung penulis selama proses pembelajaran di Universitas Indonesia.
8. Senior angkatan 2005 dan 2006, yang memberi masukan dan saran untuk pembangunan fondasi pemikiran penelitian ini. Kepada Yeremia Lalisang dan Bambang Nugroho yang memberikan banyak masukan berarti. Serta kepada seluruh senior yang membantu penulis menjalankan perkuliahan selama hampir empat tahun ini.
9. Rekan-rekan HI 2007, yang telah berjuang bersama dalam menempuh pendidikan ini. Terutama untuk anak Pengstrat 2007 antara lain: Aji, Yudha, Naufal, Rifki, Maria, Riris, Gaby, Hani, Ghita, Aisyah, dan Laras yang dengan semangat persaudaraan telah bersama-sama menjelajahi pemikiran keamanan internasional. Terutama untuk Tangguh yang telah menjadi saudara seperbimbingan yang turut juga memberi masukan yang berarti. Juga Yohanes Nindito, Erika, Andi Rosilala, dan Eryan Ramadhani yang telah menjadi rekan seperjuangan menyelesaikan misi “percepatan”. Tidak lupa juga segenap mahasiswa HI 2007 yang bersama-sama bertukar pikiran sejak tahun pertama hingga saat ini. Penulis juga mengapresiasi kerjasama, kritik, saran, dan masukan dari Muti Dewitari, Ken Swari Maharani, dan Raininta Siahaan yang turut mendukung penulis. Terimakasih juga untuk teman-teman Ekopolin dan Mastrans yang sudah bersama-sama penulis menjalani perkuliahan selama ini.

10. Teman-teman Persekutuan Oikumene FISIP UI, terimakasih untuk Anne, Jenny, dan Frisca yang terus memberikan pengertian di saat sukar. Untuk Tasha, Joan, Tabitha, Yudhi, Yanti, Stefi, Hans dan seluruh pengurus serta jemaat persekutuan yang telah menjadi keluarga di dalam Kristus.
11. Juga untuk malam dan siang, hujan dan panas, kuk dan kelegaan, tiap-tiap malaikat kecil, serta semesta yang Allah perintahkan untuk mendukung penulis. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
KARYA AKHIR KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Theo Ekandarista Yunus
NPM : 0706291445
Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Defense Dominance dalam Stabilitas di Antara
Indonesia, Malaysia, dan Singapura”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Desember 2010

Yang menyatakan

Theo Ekandarista Yunus

ABSTRAK

Nama : Theo Ekandarista Yunus
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : *Defense Dominance* dalam Stabilitas di Antara
Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Skripsi ini membahas pembentukan *defense dominance* yang mampu mencegah perang *imbalance of power* di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada periode paska Perang Dingin. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Offense Defense Theory* yang dikembangkan Glaser, Kaufmann, dan Biddle Hasil penelitian menunjukan bahwa *defense dominance* terbentuk dari teknologi, besar kekuatan, geografi, dan penggelaran kekuatan yang bersifat defensif dan menguntungkan posisi bertahan.

Kata Kunci: *defense dominance, imbalance of power, Offense-Defense Theory, Indonesia, Malaysia, Singapura.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Permasalahan Penelitian.....	6
I.3. Metodologi Penelitian	8
I.3.1. Metodologi	8
I.3.2. Kerangka Teori.....	9
I.3.3. Operasionalisasi Konsep	12
I.3.4. Model Analisa	13
I.3.5. Hipotesa Penelitian.....	14
I.4. Rencana Pembabakan Skripsi.....	14
I.5. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	15
BAB II OFFENSE DEFENSE THEORY	16
BAB III STABILITAS DALAM DINAMIKA DI ANTARA INDONESIA,	
MALAYSIA, DAN SINGAPURA	32
III.1. Definisi Perang	32
Definisi Perang Menurut <i>Correlates of War</i>	32

Definisi Perang Menurut Clausewitz (Absolute War)	35
III.2. Definisi Stabilitas Menurut Pandangan Realisme	37
III.3. Deskripsi Objek Penelitian	39
III.3.1. Indonesia.....	39
III.3.2. Malaysia.....	41
III.3.3. Singapura	42
III.4. Dinamika di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.....	43
III.4.1. Kerjasama Lintas Batas	43
III.4.2. Kerjasama Berlapis dengan Negara Besar.....	44
III.4.3. Persengketaan Wilayah.....	47
III.4.4. Ketegangan yang Melibatkan Unsur Militer	50
III.5. Paradoks dalam Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura	54
 BAB IV FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK OFFENSE DEFENSE	
BALANCE.....	56
IV.1. Kapabilitas dan Teknologi Militer.....	56
IV.1.1. Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Darat	57
IV.1.2. Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Laut	62
IV.1.3. Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Udara.....	68
IV.1.4. Analisa Offense-Defense Balance pada Kapabilitas dan Teknologi Militer.....	72
IV.2. Besar Kekuatan dan Konsentrasi Kapabilitas Militer.....	75
IV.2.1. Pemaparan Data Besar Kekuatan dan Konsentrasi Kapabilitas Militer.	75
IV.2.2. Analisa Offense-Defense Balance pada Besar Kekuatan dan Konsentrasi Kapabilitas Militer.....	83
IV.3. Kondisi Geografis Teritori Indonesia, Malaysia, dan Singapura	84
IV.3.1. Kontur Bumi di Teritori Indonesia, Malaysia, dan Singapura.	84
IV.3.2. Analisa Jangkauan Unit Penyerangan Negara.....	86
IV.3.3. Pengaruh Variabel Geografi terhadap Offense Defense Balance.....	93

IV.4. Doktrin Militer dan Penggelaran Senjata	95
IV.4.1. Doktrin Militer dan Bentuk Pertahanan Indonesia	95
IV.4.2. Doktrin Militer dan Bentuk Pertahanan Malaysia.....	98
IV.4.3. Doktrin Militer dan Bentuk Pertahanan Singapura. ..	100
IV.4.4. Defensivitas Doktrin Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Singapura.	103
IV.5. Assessment Terhadap Offense-Defense Theory.....	105
IV.5.1. Hubungan Antar Variabel.....	105
IV.5.2. Signifikansi Empat Variabel Penelitian.....	108
IV.5.3. Kritik Terhadap <i>Offense Defense Theory</i>	109
BAB V KESIMPULAN	112
DAFTAR PUSTAKA.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kapabilitas Perang Indonesia	3
Tabel 1.2 Kapabilitas Perang Malaysia	4
Tabel 1.3 Kapabilitas Perang Singapura.....	5
Tabel 1.4 Tabel Operasionalisasi Konsep.....	13
 Tabel 2.1 Pembagian Aliran Realisme Ofensif dan Defensif.....	19
Tabel 2.2 Model Penggelaran Senjata Stephen Biddle.....	27
Tabel 2.3 Matriks Elemen Pembahasan Offense Defense Theory pada Berbagai Peneliti	29
 Tabel 3.1 Data Perang di Asia Tenggara	33
 Tabel 4.1 Indeks Jenis Persenjataan Darat.....	58
Tabel 4.2 Data Kapabilitas Darat (Army).....	60
Tabel 4.3 Penghitungan Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Darat.....	61
Tabel 4.4 Data Kapabilitas Laut (Navy).....	65
Tabel 4.5 Penghitungan Indeks Jenis Persenjataan Laut	66
Tabel 4.6 Penghitungan Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Laut	67
Tabel 4.7 Data Kapabilitas Angkatan Udara (Air Force)	69
Tabel 4.8 Penghitungan Indeks Persenjataan Angkatan Udara	70
Tabel 4.9 Penghitungan tingkat Ofensivitas Kapabilitas Udara	71
Tabel 4.10 Pengukuran Rata-Rata Tingkat Ofensivitas.....	72
Tabel 4.11 Pengukuran Rasio Perang	73
Tabel 4.12 Kondisi Geografis Indonesia, Malaysia, dan Singapura.....	85
Tabel 4.13 Model Penggelaran Senjata Stephen Biddle.....	104

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Offense Defense Balance.....	10
Bagan 4.1 Matriks Rasio Perang.....	73
Bagan 4.2 Besar Kekuatan Personel	76
Bagan 4.3 Kapabilitas Pertahanan Darat	77
Bagan 4.4 Kapabilitas Transport Darat.....	77
Bagan 4.5 Kapabilitas Serang Laut.....	79
Bagan 4.6 Kapabilitas Serang Laut (Kapal Selam)	79
Bagan 4.7 Kapabilitas Pertahanan Laut.....	80
Bagan 4.8 Kapabilitas Serang Udara	81
Bagan 4.9 Kapabilitas Pertahanan Udara	82
Bagan 4.10 Spektrum Konflik dan Pelibatan Unsur Pertahanan	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Indonesia.....	40
Gambar 3.2 Peta Wilayah Malaysia	41
Gambar 3.3 Peta Wilayah Singapura.....	42
Gambar 3.4 Peta Pulau Sipadan dan Ligitan	48
Gambar 3.5 Peta Pulau Batu Puteh.....	50
Gambar 3.6 Peta Wilayah Blok Ambalat.....	51
Gambar 4.1 Peta Jangkauan Pesawat Tempur Indonesia	89
Gambar 4.2 Peta Jangkauan Pesawat Tempur Malaysia	90
Gambar 4.3 Peta Jangkauan Pesawat Tempur Singapura.....	92

BAB I

Pendahuluan

Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan *defense dominance* dapat mempertahankan stabilitas di antara Indonesia, Malaysia, Singapura. Definisi stabilitas adalah tidak terjadinya perang yang berdasarkan pengertian perang yang dikemukakan David Singer dan Melvin Small. Penelitian mengenai anomali dinamika Selat Malaka ini dilaksanakan berdasarkan jangka waktu 1990-2010, atau dikenal juga sebagai periode paska Perang Dingin. Penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme untuk menjelaskan dinamika antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penelitian ini dijawab berdasarkan faktor-faktor sistemik seperti dinamika persenjataan, perimbangan kekuatan, dan modernisasi teknologi militer. Teori yang digunakan adalah *Offense-Defense Theory* menurut Glaser, Kaufmann, dan Biddle. Teori yang diuji memiliki variabel teknologi, geografi, besar kekuatan, dan pengeluaran kekuatan berdasarkan kombinasi dari dua teori *offense-defense balance*.

I.1 Latar Belakang Masalah

Tidak ada negara yang menginginkan perang, namun kenyataannya negara selalu bersiap perang untuk mencapai yang diinginkan. Sejak pertama kali tulisan mengenai perang antar negara oleh Thucydides dipublikasikan hingga invasi Amerika Serikat ke Irak, negara tidak pernah meninggalkan jalan perang untuk mencapai kepentingan mereka. Konflik, senjata, dan teror selalu mewarnai perjuangan negara mencapai kepentingannya. Tidak heran muncul ungkapan *civis pacem para belum*, bersiaplah perang jika ingin damai. Perang adalah salah satu metode pencapaian kepentingan yang paling primitif namun tetap yang paling eksplisit dilakukan negara. Perang adalah sebuah kenormalan.¹

Negara berperang untuk menggapai kekuasaan yang lebih besar. Meskipun era Perang Dingin telah berakhir namun negara tidak pernah berhenti untuk mengejar kekuasaan. Mearsheimer menegaskan “*the sad fact is that international politics has always been ruthless and dangerous business, and it is likely remain*

¹ Kenneth Waltz, “The Origin of War in Neorealist Theory” *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988), hal. 620.

*that way....great power keep compete with each other, their ultimate aim is to be the hegemon—that is, the only great power in the system....they almost always have revisionist intention”*² Akan tetapi pengejaran kekuasaan tersebut selalu berada dalam ikatan struktur yang menyebabkan negara-negara lainnya harus ikut berkompetisi. Struktur berperan sebagai *generative notion* yang menentukan dinamika didalamnya.³ Struktur menjadi selektor pengeliminasi unit yang tidak merespon pada perintah struktur.⁴ Di dalam struktur ada sosialisasi yang membuat negara mengerti peran mereka dalam struktur dan ada kompetisi yang membuat negara mengambil tindakan, bukannya hanya berdiam diri.⁵ Karena tanpa terlibat kompetisi, negara akan menerima hukuman bahkan dieliminasi dari struktur.

Pada logika pendekatan struktur, tercapainya stabilitas adalah ketika masing-masing unit saling menyeimbangkan. Dalam terminologi ilmu hubungan internasional, hal tersebut dikenal sebagai *balance of power*. Stabilitas terjadi ketika negara-negara di dalam struktur saling mengimbangi. Sebaliknya ketika ada negara yang tidak turut mengimbangi, *imbalance of power*, struktur akan mengeliminasi negara tersebut. Negara yang tidak berkompetisi akan menerima serangan dari negara lain yang berkompetisi. Perang terjadi sebagai proses eliminasi negara yang tidak berkompetisi. Hal tersebut terjadi hingga struktur hanya berisi negara homogen yang saling menyeimbangkan satu sama lain. Di sisi lain, Buzan berargumen bahwa “*most threats travel more easily over short distances than over long ones, security interdependence is normally patterned into regionally based clusters: security complexes.*”⁶ Sedangkan menurut Friedberg “*most states historically have been concerned primarily with the capabilities and intentions of their neighbors*”⁷ Dinamika dalam struktur terjadi dalam sistem yang berdekatan, yaitu dalam lingkup regional. Peperangan yang

² John Mearsheimer. *The Tragedy of Great Power Politics*. (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2001), hal. 2.

³ Kenneth N. Waltz. *Theory Of International Politics* (London: Addison-Wesley, 1979), hal. 72

⁴ *Ibid.* Hal. 73.

⁵ Ewan Harrison, “Waltz, Kant and Systemic Approaches to International Relations” *Review of International Studies*, Vol. 28, No. 1 (Januari, 2002), hal. 148.

⁶ Barry Buzan dan Ole Weaver. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. (New York: Cambridge University Press, 2003), hal. 4.

⁷ Aaron L. Friedberg, “Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia”, *International Security* 18 (3)(1993-4), hal. 5.

terjadi paska Perang Dingin selalu terjadi dalam regional kecil, misalnya ketegangan Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam hal pelanggaran batas laut yang dilihat sebagai ancaman kedaulatan.

Hubungan diantara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sering diwarnai dengan instabilitas. Gelar kapabilitas militer yang dilakukan ketiga negara berjalan dengan tidak seimbang. Di antara ketiga negara yang berbatasan di Selat Malaka, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang paling tertinggal dalam hal kapabilitas militer, terkhusus masalah teknologi militer yang dimiliki TNI. Kekuatan TNI sangat berpusat pada kemampuan darat, sementara sebagai negara kepulauan, jangkauan angkatan laut dan udara belum sepenuhnya mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 1.1
Kapabilitas Perang Indonesia

Nama Persenjataan Perang	Jumlah	Keterangan
F-5 Tiger		perlu peremajaan
A-4 Hawk		perlu peremajaan
F-16 Fighting Falcon		perlu peremajaan
Sukhoi SU-27 dan SU-30MK2		belum memiliki amunisi
Korvet Kelas Sigma	4	
Korvet Kelas Parchim	16	Dibeli dari eks Jerman Timur
Frigat Kelas Ahmad Yani	6	
Frigat Kelas Ki Hajar Dewantara	1	
Frigat Kelas Fatahillah	3	
Kapal Selam Kelas Cakra	2	

Sukhoi Su-27 dan Su-30 MK2 yang baru didatangkan belum memiliki amunisi sehingga tidak signifikan jika diturunkan ke dalam konflik bersenjata. Kekuatan angkatan laut Indonesia diperkuat 317 unit kapal dalam berbagai kelas. Namun jumlah tersebut banyak diisi oleh kapal patrol yang belum dapat dikategorikan sebagai kapal perang. Kebanyakan dari kapal Indonesia buatan

tahun 1980an kecuali korvet Sigma yang baru didatangkan dari Belanda. Selain itu, 16 korvet kelas Parchim adalah yang tersisa dari pembelian 39 korvet eks-Jerman Timur oleh B.J. Habibie pada saat pemerintahan Presiden Suharto.

Sedangkan Malaysia berhasil memperlengkapi kekuatan tempurnya pada angkatan laut dan udara.

Tabel 1.2
Kapabilitas Perang Malaysia

Nama Persenjataan Perang	Jumlah	Keterangan
Frigat Kelas Leiku	2	
Frigat Kelas Kasturi	2	
Korvet Kelas Laksamana	4	
Sukhoi SU-30	18	
F/A-18 Hornet	8	
F-5 Tiger II	22	
MiG-29	16	
BAE Hawk	18	
CTRM Eagle ARV (UAV)	3	
Kapal Selam Kelas Scorpene		Hendak didatangkan hingga mencukupi 6 flotila

Malaysia menganggarkan kepemilikan kapal selam yang saat ini sudah didatangkan kapal selam kelas Scorpene. Proyeksi utamanya adalah membangun enam skuadron flotilla dari berbagai kelas pada tahun 2020.

Di pihak lain Singapura adalah negara kecil dengan supremasi teknologi militer.

Tabel 1.3
Kapabilitas Perang Singapura

Nama Persenjataan Perang	Jumlah	Keterangan
F-15SG Eagle	24	
F-16 C/D Blok 52	62	
F-5 Tiger II	36	
F-II Tiger 5T	9	
E-2C Hawkeye	4	
IAI Searcher Mk2 UAV	40	
Elbit Hermes 450 UAV	5	
JSF F-35 Lighting II		masih dalam proses produksi

Frigat Kelas La Fayette	6	
Korvet Kelas Victory	4	

Kapal Selam Kelas Challenger	2	
Kapal Selam Kelas Archer	2	

Kapabilitas militer yang tinggi ini didukung oleh personel yang profesional, industri pertahanan lokal yang mapan, dan pengorganisasian R&D yang matang. Singapura memiliki *Defense Science and Technology Agency* (DTSA) dan *Defense Science Organization* (DSO) yang memperkuat basis pengembangan teknologi militer.⁸ Postur militer Singapura ditujukan untuk memberikan efek *deterrence* akan tetapi jika *deterrence* tidak berhasil, maka Singapura sudah siap untuk kemampuan *defense*.⁹

Dengan disparitas kapabilitas antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, instabilitas di antara negara-negara ini terbentuk. Instabilitas tersebut menambah insentif kemunculan konflik karena negara yang merasa tidak aman akan berusaha

⁸ Tim Huxley. "Singapore and The Revolution in Military Affairs" dalam Emily O. Goldman dan Thomas J. Mankhem (eds.). *The Information Revolution in Military Affairs in Asia*. (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hal. 23.

⁹ *Ibid.* hal. 38.

melakukan tindakan penyeimbangan. Insiden penangkapan Pengawas Perikanan P2SDKP Kementrian dan Kelautan dan Perikanan Riau oleh Police Diraja Malaysia tanggal 13 Agustus 2010 menunjukkan sensitivitas kemunculan konflik di Selat Malaka sebagai perwujudan tindakan penyeimbangan. Hubungan Indonesia-Malaysia-Singapura selalu dilingkupi dengan ketegangan gelar kekuatan. Indonesia sempat menyiagakan lima kapal perang dimana tiga diantaranya konsisten bertugas patroli di perairan ambalat. Terakhir TNI-AL menempatkan empat kapal perangnya di kawasan Ambalat. Yakni kapal perusak KRI Ki Hajar Dewantara, kapal korvet anti kapal selam KRI Untung Surapati dan dua kapal patroli cepat (*fast patrol boat*), KRI Weling dan KRI Keris. Insiden berikutnya memicu gelar senjata yang lebih besar karena terjadi kapal Malaysia dinilai memasuki wilayah Indonesia tanpa izin yaitu kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Bharu berikut dua kapal patrol. Di sisi lain kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa yang kemudian terjadi Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005, yaitu peristiwa pada tanggal 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali.¹⁰

I.2. Permasalahan Penelitian

Akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, sesungguhnya tidak pernah terjadi perang antara tiga negara ini. Sejak akhir Perang Dunia II yang melahirkan kemerdekaan bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tidak pernah ditemukan adanya kontak senjata langsung yang dapat dikategorikan sebagai perang. Dengan adanya *imbalance of power* dalam sistem ini, penyerangan akan sangat dimungkinkan. Menurut Waltz, negara akan menyerang jika mempercayai bahwa ada kemungkinan suksesnya serangan tersebut.¹¹ Melihat kualitas persenjataan Singapura dan Malaysia yang jauh mengungguli Indonesia, kemungkinan untuk memenangkan penyerangan atas Indonesia sangat besar. Kedua negara tersebut memiliki armada tempur modern dan kemampuan pengintaian UAV yang

¹⁰ "Terjadi "Adu Mulut", KRI Rencong dengan KD Karambit Malaysia", diakses dari <http://gatra.com/artikel.php?pi=23&id=82499>, 15 September 2010, 16.42 WIB

¹¹ Kenneth Waltz, "The Origin of War in Neorealist Theory", hal. 626.

menunjukkan kapabilitas mereka dalam C4ISR. Akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah ada penyerangan ataupun suatu tindakan militer yang dapat diklasifikasikan sebagai agresi. Benturan antar gelar kekuatan tanpa adanya pertikaian terbuka menunjukkan tidak terjadinya perang yang sesungguhnya di antara ketiga negara ini. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan neorealisme yang memprediksi terjadinya perang untuk mengeliminasi negara yang tidak ikut berkompetisi. Meskipun *imbalance of power* terbentuk di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, perang tetap tidak terjadi seperti yang diprediksi teori neorealisme.

Pada tataran normatif, perang seharusnya terjadi pada keadaan tidak stabil ini karena negara akan bertindak sesuai tuntutan struktur untuk mengeliminasi negara yang tidak kompetitif. Dengan kata lain, negara akan memperoleh insentif menyerang lebih besar ketika ada negara yang lebih lemah di dalam sistemnya. Akan tetapi prediksi ini tidak terjadi karena pada kenyataannya, di regional Selat Malaka tidak pernah terjadi bentrokan fisik yang dapat diklasifikasikan sebagai perang. David Singer dan Melvin Small yang mempelopori pembuatan proyek *Correlates of War* mendefinisikan perang sebagai sebuah konflik bersenjata yang memakan korban jiwa 1000 orang, dilakukan oleh pihak-pihak organisasional yang mampu menggelar pertempuran (angkatan bersenjata), peristiwa ini dibatasi waktu 12 bulan. Jika dalam 12 bulan, semua kriteria tersebut terpenuhi maka dapat disebut sebuah perang.¹² Dan memang pada kenyataannya, definisi perang Singer dan Small tidak terjadi di antara Indonesia, Malaysia, Singapura. Hal ini menunjukkan sebuah anomali bahwa terbentuknya stabilitas dalam *imbalance of power*.

Dengan demikian permasalahan ini dapat dirangkum dalam pertanyaan, **“Mengapa tidak terjadi perang *imbalance of power* di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura?”**

¹² Lihat lebih lanjut pada Melvin Small and David J. Singer. *Resort to Arms: International and Civil War, 1816–1980*. (Beverly Hills, CA: Sage, 1982) atau definisi perang dalam Meredith Reid Sarkees, “The COW Typology of War: Defining and Categorizing Wars” diakses dari <http://www.correlatesofwar.org/COW2%20Data/WarData.../COW%20Website%20-%20Typology%20of%20war.pdf>.

I.3. Metodologi Penelitian

I.3.1. Metodologi

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang dilakukan dalam prosedur di mana indikator yang akan digunakan telah secara sistematis ditetapkan sebelum pengumpulan data. Penelitian ini pada dasarnya akan mengetes hipotesis yang didasarkan pada konsep. Dengan demikian, alur berpikir yang dipergunakan adalah alur berpikir deduksi, yang berjalan sebagai berikut:

**Pengamatan → Hipotesis → Pengumpulan Data → Pengujian
Hipotesis → Kesimpulan¹³.**

Alat analisa dalam penelitian ini menggunakan Offense-Defense Theory yang dikembangkan Snyder, Van Evera, Jervis, Glaser, Kaufmann, dan Biddle. Secara spesifik, model pengukuran yang digunakan diambil dari teori Glaser, Kaufmann, dan Biddle. Kesimpulan atau jawaban atas penelitian ini akan diupayakan sebagai refleksi dari pemahaman konsep yang dipergunakan.¹⁴ Akan tetapi, pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini bukanlah dengan angka-angka, melainkan lebih mengacu pada keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.¹⁵ Dengan demikian, penelitian ini tidak akan menempuh metode statistika dan matematika.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode studi dokumentasi dan literatur untuk mengumpulkan informasi dalam materi-materi tertulis. Dokumen dalam hal ini mengacu pada teks atau apa saja yang tertulis, tampak secara visual atau diucapkan melalui medium komunikasi.¹⁶ Studi dokumen primer diperoleh dari sumber-sumber resmi kenegaraan Indonesia, Malaysia, dan Singapura misalnya buku putih pertahanan. Sementara data-data dokumen sekunder bersumber pada buku, jurnal, atau hasil penelitian dari sumber yang valid, yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik studi dokumentasi ini digunakan dalam penelitian karena sifatnya yang membantu penelitian dari

¹³ Dr. Prasetya Irawan, M.Sc, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Depok: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP UI, 2006), hal. 98.

¹⁴ *Ibid*, hal. 94- 95

¹⁵ *Ibid*, hal. 101

¹⁶ Lawrence Neuman. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Boston: Pearson Education Inc, 2004), hal. 219.

jauh karena objek penelitian yang tidak dapat terjamah oleh peneliti, sehingga teknik ini dapat menghasilkan temuan yang umumnya sulit diamati secara langsung.

I.3.2. Kerangka Teori

Pemikir realisme menyatakan terbentuknya situasi yang memihak posisi defensif berimplikasi untuk meredam kompetisi keamanan. Dominasi defensif menghasilkan perdamaian, sedangkan dominasi ofensif menuntun kepada perang. Teori mengenai hal ini dikembangkan oleh Robert Jervis, Jack Snyder, dan Stephen Van Evra, yaitu *offense-defense theory* (ODT). Mereka berargumen bahwa kekuatan militer pada satu waktu dapat dikategorikan mengarah kepada dominasi ofensif atau defensif. Jika terjadi dominasi defensif memiliki keuntungan yang lebih besar dari posisi ofensif maka penyerangan akan sulit dilakukan. Negara yang ada pada posisi ini akan cenderung mempertahankan *status quo* demi terhindarnya perang. Namun sebaliknya jika posisi ofensif lebih menguntungkan daripada posisi defensif, maka negara akan cenderung menyerang satu sama lain.¹⁷ Negara yang ada pada posisi ofensif akan lebih mudah bersifat *revisionist* terhadap perimbangan kekuatan pada saat itu.

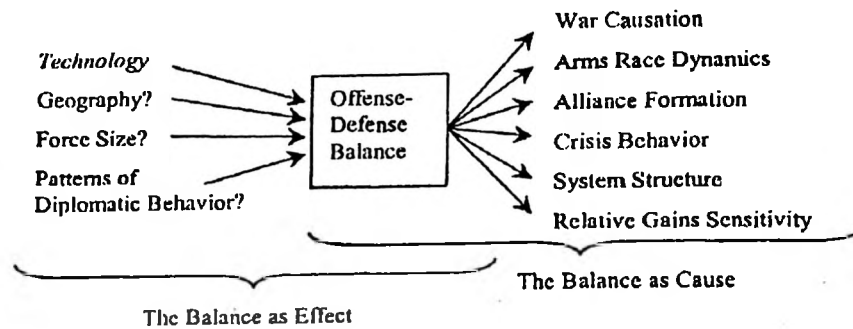
Pembahasan mengenai modifier struktural dijelaskan melalui *offense-defense theory*. Teori ini menghubungkan dua kaitan kausal, hubungan *offense-defense balance* dan peristiwa politik seperti perang, aliansi, dsb (*balance as causal*) dan hubungan antara kondisi militer dengan *offense-defense balance* (*balance as effect*).¹⁸

¹⁷ John Mearsheimer. *The Tragedy of Great Power Politics*. (New York: W.W. Norton & Company, 2001), hal. 20.

¹⁸ Stephen Biddle. "Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory" *The Journal of Politics*, Vol. 63, No. 3 (Augustus, 2001), hal. 745.

Bagan 1.1

Offense Defense Balance



Prediksi dasar ODB adalah semakin besar keuntungan akan tindakan ofensif, semakin berat *security dilemma* yang terjadi, perlombaan senjata semakin kuat, dan perang semakin mungkin terjadi.¹⁹ Glaser dan Kaufmann mendefinisikan Offense-Defense Balance sebagai:

“Ratio of the cost of the force the attacker require to take territory to the cost of the force the defender had deployed”

Jika kapabilitas militer yang dapat digunakan negara penyerang adalah X dan kapabilitas yang dapat digunakan negara yang bertahan adalah Y, maka rasio ODB adalah Y/X . Semakin besar angka yang ditunjukkan rasio tersebut, maka semakin situasi menguntungkan posisi defensif.

Ada beberapa variabel yang dikaji untuk menentukan ODB, mereka adalah:

1. Teknologi

Tidak semua teknologi dapat dikatakan sebagai penunjang ODB. Ada beberapa tipe teknologi yang dapat diperhitungkan, antara lain: mobilitas, kekuatan tembak, proteksi, logistik, komunikasi, dan deteksi.²⁰ Perkembangan pada mobilitas umumnya mendukung dominasi ofensif, kecuali yang memiliki sisi proteksi juga misalnya tank yang dilihat sebagai bentuk proteksi berjalan. Di sisi lain peningkatan kekuatan tembak umumnya meningkatkan dominasi defensif karena kekuatan tembak senjata yang tidak bergerak umumnya lebih kuat daripada yang bergerak. Pengaruh tipe yang lainnya dapat bermacam-

¹⁹ *Ibid.* hal. 6

²⁰ Glaser dan Kaufmann. “What is the Offense-Defense Theory and Can it Measured?”, hal. 62.

macam tergantung bagaimana inovasi tersebut berinteraksi dengan karakteristik kekuatan militer.²¹

2. Geografi

Keberadaan halangan pada medan pertempuran adalah keuntungan bagi dominasi defensif. Wilayah yang mampu mengurangi pergerakan akan menghambat pasukan penyerang, namun di sisi lain ada wilayah yang mampu memberikan penyamaran pada perlengkapan pertahanan yang menguntungkan pasukan bertahan. Jarak juga menjadi salah satu faktor karena semakin jauh jarak yang harus ditempuh penyerang, keadaan akan lebih menguntungkan dominasi defensif.

3. Besar Kekuatan

Terminologi ini berkaitan dengan seberapa besar kekuatan yang dapat digelar dibagi luas wilayahnya (*force-to-space*). Jadi bukan berapa banyak pasukan, namun seberapa efektif pasukan tersebut melindungi garis-garis pertahanan. Definisi ini memberikan keuntungan pada dominasi defensif karena mereka mampu memproyeksikan kekuatannya dengan lebih terarah.²²

4. Nasionalisme

Pengaruh nasionalisme dalam ODB ada pada kemampuannya untuk menggalang kekuatan sehingga masyarakat akan bersedia berperang lebih kuat untuk teritori mereka.²³

5. *Cumulative Resources*

Negara penyerang dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di negara yang berhasil diserang untuk dipakai kembali memperkuat kampanye peperangan mereka. Namun hal ini bukan berarti menguntungkan dominasi ofensif. Biaya ekstraksi, biaya mengontrol populasi setempat, dan perbaikan sabotase harus dipikirkan karena jika resistensi berjalan dengan kuat, keuntungan neto yang diperoleh penyerang mungkin tidak tercapai.

²¹ *Ibid.* hal. 64

²² Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan pada Liddell Hart. "The Ratio of Troop to Space" *Military Review*, no. 40 (April, 1960) hal. 3-14, Mearsheimer. "Why Soviet Can't Win Quickly in Central Europe?" *International Security*, Vol. 7, No. 1 (Summer, 1982), dan Biddle, "Offensiveness and Defensiveness", hal. 164-169, menurut Biddle, keberadaan pasukan pertahanan yang lebih longgar masih tetap menguntungkan dominasi defensif.

²³ Robert Jervis, "Cooperation Under Security Dilemma" *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (Januari, 1978), hal. 204

Stephen Biddle berargumen, model *offense-defense theory* seperti di atas memiliki kelemahan dengan tidak menjawab permasalahan secara memuaskan. Biddle mengajukan tiga variabel independen dalam teori yang baru yaitu pengeluaran kekuatan, besar kekuatan, dan teknologi. Teknologi diperlakukan sebagai variabel sistemik dan terkait dengan waktu sehingga makin terkini sebuah kasus, maka makin canggih teknologi yang digunakan. Besar kekuatan adalah rasio dari besarnya kekuatan penyerang dibandingkan jumlah kekuatan yang diserang. Pengertian besar kekuatan ini dapat disejalkan dengan variabel besar kekuatan yang diajukan Glaser dan Kaufmann. Pada operasionalisasinya, pengaplikasian *force-to-ratio* menghasilkan pengukuran yang lebih akurat dan memuaskan. Biddle menambahkan variabel baru yaitu pengeluaran kekuatan yang bertujuan untuk melihat posisi penempatan kekuatan sebuah negara. Hal tersebut terkait dengan bagaimana negara menempatkan dan menggunakan kapabilitas material bukan berdasarkan karakteristik dasar material itu sendiri.²⁴ Dengan mengetahui pengeluaran kekuatan sebuah negara, maka dapat dilihat bentuk ofensif atau defensif yang mendapat keuntungan lebih besar.

I.3.3. Operasionalisasi Konsep

Dengan demikian operasionalisasi teori dalam penelitian ini menggunakan kombinasi dari pemikiran Glaser dan Kaufmann, dan Biddle. Beberapa variabel digabungkan, dan beberapa variabel lainnya tidak digunakan karena alasan konsistensi terhadap pendekatan sistemik. Berdasarkan teori yang dikemukakan Glaser dan Kaufmann terdapat dua variabel yang tidak disertakan. Variable *cumulative resources* tidak digunakan di dalam penelitian karena sangat bernuansa kajian unit. Menganalisis sumberdaya kumulatif yang diperoleh dari pengukuran resistensi masyarakat mengharuskan penelitian juga mengkaji sistem politik, ekonomi, dan sosial negara yang bersangkutan. Variabel nasionalisme tidak digunakan untuk menjaga konsistensi pengukuran kapabilitas material. Nasionalisme itu sendiri bersifat ide, sehingga tidak dapat disamakan dengan pengukuran material. Dengan demikian untuk menjaga konsistensi pendekatan neorealisme, maka peneliti tidak menggunakan variabel ini.

²⁴ *Ibid.*

Dari teori yang dikemukakan Biddle, variabel besar kekuatan dan teknologi tidak disertakan. Hal ini tidak berarti sama sekali tidak digunakan tetapi dua variabel ini diasimilasikan dengan variabel teknologi dan besar kekuatan yang sudah ada pada teori Glaser dan Kaufmann. Dengan demikian hanya variabel pengeluaran kekuatan yang dipakai murni dalam operasionalisasi konsep.

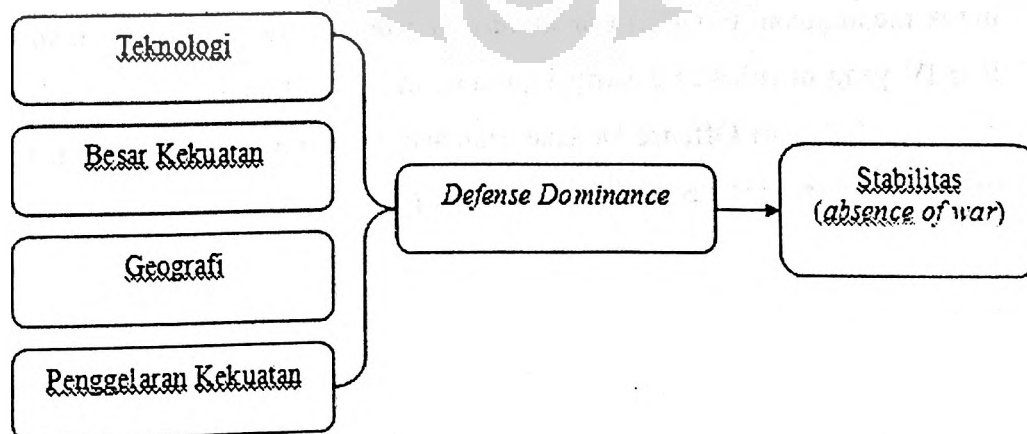
Teori Offense-Defense Balance dioperasionalisasikan sebagai berikut:

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Indikator	Kategori
Variabel Independen (defensive dominance)	Teknologi	Index Kapabilitas Perang Indonesia, Malaysia, dan Singapura	Ofensif/defensif
	Geografi	Analisis kontur permukaan bumi masing-masing negara	Memudahkan penyerangan/mendukung pertahanan
		Analisis jangkauan unit-unit pertahanan/penyerangan negara	
	Besar Kekuatan	Analisis konsentrasi kekuatan	Ofensif/defensif
	Penggelaran Kekuatan	Analisis bentuk penempatan kekuatan berdasarkan doktrin militer negara yang bersangkutan.	Ofensif/defensif
Variabel Dependen (stabilitas)	Ketiadaan perang	Indikator perang Singer dan Small	Terjadi perang/tidak terjadi perang

I.3.4. Model Analisa

Dengan memperhatikan pemaparan diatas, dapat ditawarkan sebuah model analisa dalam penelitian ini, yaitu:



I.3.5. Hipotesa Penelitian

Berdasarkan operasionalisasi konsep dari *Offense-Defense Theory* oleh Glaser, Kaufmann, dan Biddle, penelitian ini memiliki hipotesa yang akan dibuktikan sebagai berikut:

1. Tidak terbentuknya perang *imbalance of power* di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebabkan adanya *defensive dominance* yang tidak menguntungkan tindakan penyerangan.
2. Terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel teknologi yang mendukung posisi bertahan.
3. Terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel besar kekuatan yang memiliki konsentrasi pada persenjataan defensif.
4. Terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel geografi yang menguntungkan posisi bertahan.
5. Terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel pengeluaran senjata yang lebih menguntungkan posisi bertahan.

I.4. Rencana Pembabakan Skripsi.

Penelitian dengan permasalahan dan model analisa diatas akan disusun ke dalam empat bab. Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pertanyaan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan dan signifikansi penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Bab II akan menjadi tinjauan pustaka mengenai perkembangan *Offense Defense Theory* dari awal terbentuknya hingga varian yang paling modern. Kemudian, Bab III akan menjelaskan dinamika kawasan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menunjukan terjadinya *imbalance of power*. Penelitian dilanjutkan dengan Bab IV yang membahas deskripsi variabel independen serta analisa variabel dan indikator dari teori *Offense-Defense Balance*. Penelitian ditutup dengan BAB V, sebuah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian.

I.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan terbentuknya *defense dominance* sebagai elemen yang mencecah perang *imbalance of power*. Penelitian juga bertujuan mengetahui faktor-faktor penyusun situasi *defense dominance* sehingga menyebabkan stabilitas/ketiadaan perang di antara Indonesia, Malaysia, Singapura. Pemaparan hal ini sangat penting untuk mengetahui titik krusial yang menjaga titik aman wilayah dari insentif peperangan. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini sangat penting untuk dilakukan demi mempertahankan stabilitas di antara ketiga negara ini.

Melalui penelitian ini juga dapat ditemukan dinamika perkembangan kajian keamanan dalam tradisi realisme. Offense-Defense Theory (ODT) semula diragukan reliabilitasnya karena belum melalui serangkaian pengujian, namun dengan penelitian ini diharapkan menambahkan khazanah pengujian bagi ODT. Selain itu, penelitian ini juga dapat menunjukkan signifikansi ODT untuk diaplikasikan pada dinamika antara negara kecil. Dengan demikian semakin memperkuat posisi ODT sebagai salah satu teori HI modern yang valid.

Selain signifikansi secara teoretik, penelitian ini juga membukakan lebih luas mengenai dinamika yang ada di antara Indonesia, Malaysia, Singapura sehingga membantu pengambil kebijakan untuk melakukan *positioning* yang benar. Terlepas dari perdebatan teoretik, faktor kapabilitas militer masih menjadi alat pengukur strata di dunia internasional. Oleh karenanya, kajian ini sangat relevan untuk mendukung pengolahan kebijakan luar negeri di era modern ini.

BAB II

Offense-Defense Theory

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk melihat pergerakan kemunculan *Offense Defense Theory* dan menemukan hal-hal yang selalu menjadi pembahasan sehingga menjadi dasar pemikiran untuk menjawab penelitian secara keseluruhan. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai paradigma realisme sebagai sebuah konstelasi teori yang akhirnya melahirkan dua pandangan besar, yaitu realisme ofensif dan defensif. Kemudian bab ini akan memaparkan secara singkat kelebihan dari analisis melalui realisme defensif sehingga memberikan legitimasi untuk menggunakan *Offense Defense Theory* sebagai salah satu bentuk teori realisme defensif. Pembahasan dilanjutkan dengan pemaparan pandangan beberapa penulis *Offense Defense Theory*, dari Jack Snyder hingga Stephen Biddle. Pada bagian akhir, penulis memberikan kesimpulan dan relevansi *literature review* ini pada hipotesa penelitian.

Realisme bukanlah teori tunggal melainkan sebuah konstelasi teori yang berbagi keserupaan asumsi namun dengan elemen-elemen yang jauh beragam. Semua teori realisme merujuk pada satu aktor tunggal yaitu negara yang dinyatakan sebagai aktor yang berlaku rasional, mengejar keamanan, kekuasaan, dan kemakmuran dalam sistem internasional yang anarki.²⁵ Para realist berbagi satu hipotesis dasar atas determinan terbentuk atau tidak terbentuknya perang, yaitu distribusi kekuasaan di dalam sistem internasional.²⁶ Seperti perkataan terkenal Thucydides dalam Dialog Melian, "... *the strong take what they can and the weak suffer what they must.* ", maka baik perang yang sengaja dilakukan negara ataupun efek samping dari suatu kebijakan tertentu, perang di dasari pada logika distribusi kekuasaan. Keseimbangan adalah kestabilan, perang hanyalah nama lain dari ketidakseimbangan distribusi kekuasaan.

Studi mengenai perang yang dilakukan dengan paradigma sebagai ilmu sosial dipelopori oleh Kenneth Waltz yang memulai zaman neorealisme. Pada awalnya perang diterima sebagai bentuk agresivitas negara untuk memenuhi

²⁵ Jack S. Levy dan William Thompson. *Causes of War*. (Singapore: Blackwell Publishing, 2010), hal. 28.

²⁶ *Ibid.* hal. 29.

hasrat mereka akan lebih banyak kekuasaan. Selayaknya manusia yang tidak pernah puas, tindakan negara melakukan perang juga dimengerti sebagai turunan dari sifat manusia tersebut. Hal ini menjelaskan banyak penyebab perang, namun lemah dalam pembuktian sebagai ilmu pengetahuan karena tidak memiliki alat pengukuran yang memberikan legitimasi sah sebagai hasil penelitian ilmiah. Waltz yang menemukan bahwa dalam dunia sosial, problematika hanya dapat dijawab jika melihatnya sebagai *organized complexity*. Argumentasi ini didasarkan pada pemikiran bahwa fenomena sosial tidak ditentukan berdasarkan tindakan bebas manusia, melainkan dari dinamika sistemik yang mempengaruhi perilaku unit-unit didalamnya.²⁷ Dinamika sistemik internasional diliputi dengan nuansa ketakutan akibat karakter anarki yang terinstitusi di dalamnya. Anarki sendiri adalah situasi tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada negara²⁸ sehingga negara-negara di dunia hidup berdampingan tanpa ada sebuah pengaturan fisik. Dalam kondisi seperti ini negara harus mengusahakan keamanannya sendiri.

Teori *balance of power* menegaskan bahwa negara berperang saat tidak terbentuk perimbangan kekuatan. Akan tetapi, kemunculan perang dapat berbeda dalam situasi tertentu. Hal tersebut dipengaruhi oleh *the situations, the characters, and the interactions of states*. Kemunculan perang dianggap tidak sesederhana ketidakseimbangan kekuatan yang lantas langsung memunculkan perang karena keseimbangan kekuatan berubah setiap waktu, namun perang tidak selalu terbentuk. Realisme sendiri akhirnya terpecah ke dalam *defensive realism* dan *offensive realism*.

Pembagian dua cabang realisme ini didasari pada perbedaan pandangan mengenai anarki, tepatnya apakah anarki memberikan insentif untuk menjadi agresif atau tidak. *Defensive realism* berargumen bahwa kondisi anarki tidak memberikan insentif untuk menjagi agresif (ekspansionis) karena *security dilemma* membuat tindakan ekspansionis tidak memberikan keuntungan. Jervis mendefinisikan hal ini sebagai "*a situation in which the means by which a state*

²⁷ Kenneth N. Waltz. *Theory Of International Politics* (London: Addison-Wesley, 1979), hal. 12.

²⁸ John J. Mearsheimer. "Structural Realism" dalam Dunne, Kurki & Smith. *International Relations Theories*. (New York: Oxford University Press, 2007), hal. 72.

tries to increase its security decreases the security of others."²⁹ Dalam keadaan ini, negara yang merasa berkurang keamanannya akan berusaha menaikkan tingkat keamanannya yang mana mengurangi tingkat keamanan negara yang pertama. Pada akhirnya posisi keamanan kedua negara tidak berubah, atau bahkan malah menjadi semakin tidak aman. Hal ini yang menurut Glaser melakukan tindakan ekspansi sebagai *self defeating* (bunuh diri).³⁰

Di sisi lain, *offensive realism* berpendapat bahwa anarki memberikan insentif besar melakukan ekspansi. Setiap negara didorong untuk memaksimalkan relativitas kekuasaan mereka terhadap negara lain, karena hanya negara yang paling kuat dapat menjamin keberlangsungan hidupnya. Mereka mengejar kebijakan ekspansionis saat keuntungan dirasa melebihi harga yang harus dibayar. Dalam kondisi anarki, negara selalu berada di dalam ancaman negara lain yang menggunakan kekuasaannya untuk merugikan mereka. Hal ini mendorong negara meningkatkan posisi kekuasaan relatif mereka melalui peningkatan persenjataan, diplomasi unilateral, merkantilisme (bahkan autarki), kebijakan ekonomi luar negeri, dan ekspansi oportunistik.³¹

²⁹ Robert Jervis, "Cooperation under the Security Dilemma," *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (January 1978), hal. 167-214.

³⁰ Ada tiga hal yang dikemukakan Glaser mengenai hal ini. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Charles L. Glaser, "The Security Dilemma Revisited," *World Politics*, Vol. 50, No. 1 (October 1997), hal. 171-201.

³¹ Beberapa contoh *offensive realism* adalah John J. Mearsheimer, "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War," *International Security*, Vol. 15, No. 1 (Summer 1990), hal. 5-56; Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions," *International Security*, Vol. 19, No. 3 (Winter 1994/95), hal. 5-49, khususnya hal. 10-15; Fareed Zakaria, *From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1998); Randall L. Schweller, "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In," *International Security*, Vol. 19, No. 1 (Summer 1994), hal. 72-107; Schweller, *Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest* (New York: Columbia University Press, 1997); Samuel P. Huntington, "Why International Primacy Matters," *International Security*, Vol. 17, No. 4 (Spring 1993), hal. 68-83; and Eric J. Labs, "Beyond Victory: Offensive Realism and the Expansion of War Aims," *Security Studies*, Vol. 6, No. 4 (Summer 1997), hal. 1-49.

Tabel 2.1
Pembagian Aliran Realisme Ofensif dan Defensif

Fenomena yang dijelaskan	Asumsi atas anarki	
	Defensive Realism	Offensive Realism
	<i>Sistem internasional memberikan insentif untuk ekspansi dalam kondisi tertentu</i>	<i>Sistem internasional selalu memberikan insentif untuk ekspansi</i>
Neorealisme		
<i>Teori yang menjelaskan outcome internasional seperti kemungkinan perang, durabilitas aliansi, dan kemungkinan kerjasama internasional</i>	Balance of Power (Kenneth Waltz)	Hegemonic Theory of War (Robert Gilpin)
	Dynamic Differentials Theory (Dale Copeland)	Power Transition Theory (A.F.K. Organski)
	Great Power Cooperation (Jervis, Glaser, Miller)	Balance of Interest (Randall Schweller)
		Theory of Great Power Politics (Mearsheimer)
Neoklasikal Realisme		
<i>Teori yang menjelaskan perilaku eksternal dari sebuah negara seperti preferensi doktrin militer, aliansi, kebijakan ekonomi luar negeri, dsb.</i>	Balance of Threat (Stephen M. Walt)	State-Centered Realism (Fareed Zakaria)
	Domestic Mobilization Theory (Thomas Christensen)	Theory of War Aims (Eric Labs)
	Offense Defense Theory (Evra, Christensen, Glaser, Snyder, Kaufmann)	Hegemonic Theory of Foreign Policy (Willian Wohlforth)

Menurut Jeffrey Taliaferro, *defensive realisme* dapat memberikan penjelasan yang lebih memadai mengenai terjadi atau tidak terjadinya perang karena empat asumsi dasar teori ini. Pertama, *security dilemma* adalah hal yang tidak dapat dihilangkan. Anarki menciptakan ketidakpastian yang mengakibatkan

negara tidak pernah tahu dengan jelas tujuan negara lain. Kedua, *security dilemma* memang tidak terelakan namun hal itu tidak selalu menghasilkan kompetisi dan perang. Hal itu disebabkan oleh faktor material lainnya yang disebut modifier struktural berupa teknologi, geografi, dsb. *Defensive Realism* berargumen bahwa modifier memberikan dampak yang lebih besar dibanding distribusi kekuasaan secara umum. Modifier struktural dipandang dapat menjadi penghubung efek imperatif struktur kepada perilaku negara. Ketiga, kapabilitas material tersebut dapat memberikan pengaruh pada kebijakan luar negeri suatu negara. Sebaliknya persepsi pemimpin juga dapat membentuk cara pandang negara terhadap modifier struktural yang dimiliki lawan. Keempat, ada keterkaitan antara efek imperatif struktur dengan politik domestik. Namun berbeda dengan pandangan liberalisme, neoklasial realisme menekankan pendekatan *top-down*. Pemimpin membuat kebijakan berdasarkan situasi strategis dan penilaian atas kekuatan relatif mereka.³²

Varian defensif realism yang menjelaskan penyebab perang dengan baik adalah *Offense-Defense Theory*. Teori ini bukan suatu teori tunggal namun disusun oleh beberapa penulis dalam rentang waktu panjang. Kemunculan teori ini dimulai dari tulisan Jack Snyder mengenai "*cult of offensive*", Jervis, Glaser, dan Kaufmann yang membahas mengenai mispersepsi dan modifier struktural dalam pembentukan perang, hingga Stephen Biddle yang lebih menekankan pada *order of battle*. Garis waktu pemikir ini diambil berdasarkan urutan pemikiran dari model pemikiran umum hingga model pemikiran khusus dengan pengukuran kapabilitas material. Snyder adalah penulis pertama yang mengajukan argumentasi tentang tindakan ofensif. Evera kemudian memperluas kajian dengan melihat konsekuensi lainnya dari tindakan ofensif. Sedangkan Glaser dan Kaufmann mengajukan pandangan baru dengan modifier struktural sebagai variabel analisa yang lebih *tangible*. Akhirnya Biddle dipandang sebagai evolusi terakhir teori ini dengan memasukan keterkaitan tingkat strategis dengan tingkat taktis.

³² Jeffrey W. Taliaferro, "Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited" *International Security*, Vol. 25, No. 3 (Winter, 2000-2001), hal. 136-143.

Jack Snyder dalam jurnal *Civil-Military Relations and the Cult of the Offensive, 1914 and 1984* berupaya menunjukkan adanya sebuah fenomena yang disebut "*Cult of Offensive*" yang menyebabkan perang terjadi. Dalam tulisan ini Snyder mengambil contoh invasi Jerman pada Perang Dunia I (1914). Argumen utama Snyder adalah terbentuknya *cult of offensive* sebagai akibat ketidakberesan hubungan sipil-militer sehingga negara melihat perang yang desisif dibutuhkan untuk menghadapi rasa tidak aman. Dengan alasan ini, perang terjadi.

Snyder mengawali tulisannya dengan penjelasan hubungan sipil-militer yang tidak ideal. Pengambilan kebijakan strategis dinodai dengan penyakit hubungan sipil-militer yang memungkinkan dan mendorong pihak militer untuk memanfaatkan strategi operasional di saat perang untuk menyelesaikan permasalahan institusionalnya.³³ Bahkan dalam keadaan seimbang, tindakan ofensif lebih sesuai dengan militer dibandingkan tindakan defensif, militer cenderung memperlihatkan preferensi terhadap ofensif dan doktrin yang berhaluan seperti itu. Ketika diperhatiakan lebih dalam, Snyder menemukan bahwa terbentuk bias ofensif dalam militer sehingga militer cenderung memilih tindakan ofensif. Militer cenderung melihat perang adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, sehingga sedapat mungkin memiliki tindakan preventif. Di sisi lain, militer percaya bahwa pihak lawan selalu bersifat sangat mengancam (*extremely hostile*) sehingga diperlukan sebuah tindakan desisif yang dapat segera menyelesaikan perang. Langkah-langkah ofensif selalu dibutuhkan meskipun pada kenyataannya tindakan defensif lebih mudah dioperasionalisasikan. Asumsi seperti ini ter-*oversocialized* sehingga mereka melihat perang melebihi apa yang seharusnya terjadi, yang mana mendorong militer cenderung mengadopsi strategi ofensif dan meningkatkan kekuatan untuk hal ini.³⁴

Perang terjadi karena keberadaan pemikiran militer yang harus mengambil sikap ofensif. Snyder mengutip argumen Van Evera dalam hal ini. Pertama, kekuatan pertama yang memobilisasi dan menyerang diyakini memiliki keuntungan yang lebih besar. Kedua, tindakan ofensif tidak hanya menunjukkan negara yang dituju rentan dan mudah diserang, tetapi juga menunjukkan negara

³³ Jack Snyder, "Civil-Military Relations and the Cult of the Offensive, 1914 and 1984" *International Security*, Vol. 9, No. 1 (Summer, 1984), hal. 109.

³⁴ *Ibid.* hal. 119.

yang mengadopsi strategi tersebut dalam posisi rawan dan mudah diserang balik. Kasus penyerangan Jerman ke arah timur (Rusia) menunjukkan pada saat bersamaan Rusia sedang meningkatkan kapabilitas yang mengancam keberadaan Jerman. Dengan cara ini dipastikan Jerman akan mengambil tindakan ofensif, dan ketika perang terjadi, itu akan menjadi perang skala global.³⁵

Sementara itu Van Evera sendiri memiliki argumen akan proses terjadinya perang. Menurutnya, perang terjadi saat penaklukan mudah dilakukan dan pergeseran dalam *offense-defense balance* memberikan dampak yang besar pada resiko perang.³⁶ Lebih detail lagi, Evera berargumen perang terjadi jika

1. Keadaan ofensif terlihat lebih menguntungkan.
2. Pertahanan diri sangat sulit dilakukan sehingga negara tidak merasa aman.
3. Keadaan tidak merasa aman mendorong negara menjadi ekspansionis sebagai reaksi atas ekspansionisme lawan.
4. Perang terjadi saat keuntungan akan lebih besar jika melakukan first-strike.
5. Jendela kesempatan dan ancaman yang besar mendorong negara melakukan tindakan *pre-emptive*.
6. Negara lebih sering menggunakan taktik *fait accompli* dalam bernegosiasi, dan taktik inilah yang juga sering memicu perang.
7. Negara tidak kooperatif dalam bernegosiasi.
8. Negara menutup kebijakan luar negerinya secara rahasia, hal ini menghasilkan misperspsi di pihak sendiri maupun di pihak lawan.
9. Perlombaan senjata yang tidak terkontrol dan terlalu cepat menaikkan resiko *preventive war* dan optimisme yang keliru.
10. Dominasi ofensif terjadi dengan sendirinya karena pada saat penaklukan dianggap mudah, negara cenderung mengambil kebijakan yang membuat penaklukan terus menjadi mudah. Hal ini melipatgandakan efek yang ditimbulkan poin 1-9.³⁷

³⁵ *Ibid.* hal. 115

³⁶ Stephen Van Evera, "Offense, Defense, and the Causes of War" *International Security*, Vol. 22, No. 4 (Spring, 1998), hal. 5.

³⁷ *Ibid.*

Evera menyimpulkan bahwa perang terjadi karena dominasi ofensif terjadi. Hal tersebut diakibatkan dominasi ofensif membuat negara mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih agresif baik untuk memanfaatkan kesempatan baru maupun menghindari ancaman terkini. Hal itu sejalan dengan jendela kesempatan dan vulnerabilitas terbuka lebar. Ekspansi menjadi begitu menggoda karena biaya ekspansi menjadi lebih rendah saat ofensif memperoleh dominasinya. Keuntungan tersebut memberikan insentif lebih besar untuk melakukan serangan *pre-emptive*. Selain itu tindakan *pre-emptive* didukung diplomasi yang *fait accompli* dan lebih diselubungi rahasia.³⁸ Hal inilah yang menyebabkan Perang Dunia I pecah, mengingat setiap negara di Eropa menganut pemikiran seperti ini, yang dikenal sebagai *the cult of offensive*. Jerman dibawah pimpinan Schifflen dan Moltke mengadopsi pemikiran bahwa tindakan ofensif memberikan keuntungan yang lebih besar. Hasilnya paham ini tersebar ke Perancis, Belgia, Austria, Rusia, dan negara-negara lainnya yang menjadi penyebab perang pecah.³⁹ Dapat disimpulkan menurut Van Evera, Perang Dunia I disebabkan karena dominasi ofensif yang menjadikan negara lebih memilih strategi penyerangan dan melakukan tindakan sedini mungkin dalam operasi penyerangan tersebut.⁴⁰

Robert Jervis menawarkan argumen alternatif dalam melihat fenomena *cult of offensive*. Jervis melihat bahwa terdapat informasi yang tidak akurat, miscalculasi konsekuensi, dan kekeliruan penilaian akan bagaimana negara lain bereaksi terhadap kebijakan negara lainnya.⁴¹ Perang Vietnam menunjukkan bagaimana Amerika Serikat bereaksi terhadap peningkatan kekuatan Uni Soviet di Asia Tenggara. AS pada saat itu memiliki persepsi bahwa kekuatan komunisme akan menimbulkan efek domino sehingga Asia Tenggara jatuh seluruhnya ke tangan komunis. Jika saja Czar, Kaiser, perdana menteri, dan presiden tahu

³⁸ Stephen Van Evera, "The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War" *International Security*, Vol. 9, No. 1 (Summer, 1984), hal. 63-66.

³⁹ *Ibid.* hal. 66-71.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 106.

⁴¹ Robert Jervis, "War and Misperception" *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988), hal. 57.

konsekuensi yang ditimbulkan dari Perang Dunia II, maka perang ini tidak akan terjadi.⁴²

Kemudian Jervis berargumen untuk meminimalisir penyebab perang, yang disebabkan mispersepsi terhadap tindakan ofensif, dapat dilakukan melalui kontrol persenjataan. Jervis berargumen bahwa aktor yang paling dingin sekalipun memiliki ruang untuk bernegosiasi. Area dimana teknologi persenjataan menjadi titik sensitif dapat menjadi alasan utama superpower untuk bekerjasama.⁴³ Hal ini didasarkan keuntungan yang didapat dengan melakukan *first strike* memberi insentif lebih besar untuk melakukan penyerangan bahkan pada saat damai. Dengan memiliki informasi dan observasi yang jelas terhadap persenjataan lawan, negara akan memikirkan kembali keuntungan melakukan *first strike*.⁴⁴ Informasi yang memadai mengenai situasi dan proyeksi, negara akan cukup puas dengan status quo sehingga akan berusaha mempertahankan perdamaian. Memulai perang hanya akan menghasilkan biaya besar, sehingga menghindarkan negara untuk memulai menyerang.⁴⁵ Dengan mengurangi dominasi ofensif, maka resiko perang juga dapat dikurangi.

Akan tetapi pemikiran Glaser dan Kaufmann berbeda mengenai hal ini. Untuk mengurangi dominasi ofensif, kapabilitas material tidak diawasi secara bersama, namun penghitungan karakter kapabilitas tersebut yang menandakan pada suatu situasi terbentuk dominasi ofensif atau defensif. Preposisi dasar argumen Glaser dan Kaufmann serupa dengan *Offense Defense Theory* secara keseluruhan, namun metode pengukuran yang digunakan berbeda karena pada tulisan ini, Glaser dan Kaufmann sudah menggunakan modifier struktural sebagai variabel independen terhadap *outcome* politik internasional.

Untuk menentukan sebuah keadaan berkarakter dominan ofensif atau defensif, Glaser dan Kaufmann mengajukan rasio Y/X. Unit Y adalah investasi kapabilitas yang dilakukan penyerang dan unit X adalah investasi kapabilitas yang dimiliki pihak bertahan. Rasio yang semakin besar menunjukkan dominasi defensif

⁴² *Ibid.* hal. 60.

⁴³ Robert Jervis, "Arms Control, Stability, and Causes of War" *Daedalus*, Vol. 120, No. 1, Arms Control: Thirty Years On (Winter, 1991), hal. 169.

⁴⁴ *Ibid.* hal. 171.

⁴⁵ *Ibid.* hal. 179.

semakin besar pula.⁴⁶ Beberapa asumsi dan spesifikasi yang dikemukakan untuk mendukung teori ini antara lain terdapat biaya peperangan, negara akan bertindak optimal, implikasi yang bersifat diadik bukan sistemik, dan faktor-faktor pembentuk yang lebih luas (tidak hanya teknologi). Faktor kritis yang menjadi determinan dalam teori ini adalah teknologi, geografi, besar kekuatan, nasionalisme, dan sumber daya kumulatif.⁴⁷

Teknologi umumnya menjadi fokus utama dari *Offense Defense Balance*. Yang diukur dalam variabel ini adalah mobilitas, kekuatan tembak, proteksi, logistik, komunikasi, dan deteksi. Keunggulan dalam mobilitas menguntungkan posisi ofensif, sedangkan kekuatan tembak menguntungkan posisi defensif. Variabel besar kekuatan bukan hanya mengukur jumlah pasukan yang dimiliki, tetapi bagaimana rasio jumlah kekuatan yang dimiliki terhadap luas wilayah yang harus di proteksi. Nasionalisme melihat apakah warga negara bersedia untuk turut berperang demi negaranya. Sedangkan variabel sumber daya kumulatif meninjau apakah serangan ke daerah tertentu dapat dipandang cukup “menguntungkan” berdasarkan sumber daya yang dapat direbut di daerah tersebut. Misalnya dahulu Jepang menyerbu Asia Tenggara dengan tujuan memperoleh bahan bakar untuk Perang Pasifik. Jika daerah tersebut dipandang “menguntungkan” maka keseimbangan bergeser ke arah dominasi ofensif.⁴⁸

Selain itu, Glaser dan Kaufmann juga menolak keuntungan dari *first strike* sebagai elemen yang menguntungkan dominasi ofensif. Tindakan *first strike* tidak selalu dimiliki pihak penyerang, sebaliknya pihak bertahan juga dapat melakukan hal serupa sebagai langkah preventif. Hasilnya, tindakan *first strike* tidak selalu menguntungkan penyerang, atau dengan kata lain tidak selalu menguntungkan dominasi ofensif. Oleh karena itu, menurut Glaser dan Kaufmann keuntungan *first strike* dianggap nol dan tidak masuk dalam penghitungan.⁴⁹

Pada akhirnya Glaser dan Kaufmann mengajukan pengukuran dengan alat analisa *net assessment*. Hal ini didasarkan pada kajian Barry Posen Warsaw Pact

⁴⁶ Charles Glaser dan Chaim Kaufmann, “What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure it?” *International Security*, Vol. 22, No. 4. (Spring, 1998), hal. 50.

⁴⁷ *Ibid.* hal. 67.

⁴⁸ *Ibid.* hal. 61-68.

⁴⁹ *Ibid.* hal. 71-72.

menggunakan metode *net assessment*. Keberhasilan Posen menunjukkan alat analisa serupa dapat juga digunakan untuk pengukuran *Offense Defense Balance*.

Stephen Biddle menyanggah model teori *Offense Defense Balance* pada umumnya karena teori tersebut tidak dapat dibuktikan. Salah satu kelemahannya adalah tidak tereksplorasinya definisi dari *balance* yang dimaksud. Literatur yang ada cenderung membahas hasil dan konsekuensi dari *balance*, namun penyebab dan karakteristik dasar dari *balance* tetap tidak dikembangkan.⁵⁰ Permasalahan ini membutuhkan jawaban melalui teori yang sistematis dan pemahaman yang jelas mengenai *balance* itu sendiri.⁵¹ Biddle berargumen bahwa teori yang seharusnya akan menfokuskan pembahasan pada pengeluaran senjata, yaitu bagaimana negara menempatkan dan menggunakan kapabilitas material bukan berdasarkan karakteristik dasar material itu sendiri.⁵² Dengan demikian terbentuk kaitan antara level strategis dan taktis. Hal ini menyebabkan teori *Offense Defense Balance* yang dikembangkan Biddle lebih bersifat *order of battle*.

Biddle menawarkan tiga variabel independen yang mempengaruhi *outcome* perang yaitu: pengeluaran kekuatan, besar kekuatan, dan teknologi. Teknologi diperlakukan sebagai faktor sistemik dan berkorelasi dengan waktu. Semakin terkini sebuah peristiwa, semakin modern juga teknologi yang digunakan. Besar kekuatan adalah rasio jumlah kekuatan pihak penyerang terhadap pihak bertahan⁵³. Variabel yang paling penting menurut Biddle adalah pengeluaran kekuatan karena melalui variabel ini dapat terlihat bagaimana negara mengerjakan kapabilitas yang dimilikinya. Ada beberapa variasi yang terjadi untuk mengindikasikan bentuk pertahanan/serangan yang akan dilakukan terhadap hasil perang.

⁵⁰ Stephen Biddle, "Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory" *The Journal of Politics*, Vol. 63, No. 3 (Agustus, 2001), hal. 742.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* hal. 749.

Tabel 2.2
Model Penggelaran Senjata Stephen Biddle

Defender:	Attacker:	
	High Attempted Velocity (exposed)	Low Attempted Velocity (covered, concealed, dispersed; movement integrated with fires)
Deep, large reserve withhold	Contained Offensive: • very high attacker losses • very large numerical preponderance required to prevail Very defense-favorable balance	Contained Offensive: • moderate attacker losses • large numerical preponderance required to prevail Moderately defense-favorable balance
Shallow, small reserve withhold	Contained Offensive: • very high attacker losses • very large numerical preponderance required to prevail Very defense-favorable balance	Breakthrough: • low attacker losses • numerically inferior attacker can prevail Very offense-favorable balance

Jika negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan pertahanan yang dalam dengan pertahanan berlapis atau serangan yang rendah deteksi, mengapa negara tidak selalu mengambil pilihan tersebut? Mengapa ada variasi lain yang dapat dipilih? Biddle berpendapat karena pengambilan kebijakan ini terkait juga dengan variabel politik dan organisasional yang juga dominan untuk menarik kebijakan strategis ke arah berlainan.⁵⁴ Pertahanan yang dalam membutuhkan kesediaan penduduk untuk turut berperang, yang mana bagi negara otoriter tidak sulit melakukan kebijakan ini. Tetapi kasus berbeda ditemukan di negara demokrasi yang memiliki tekanan politik untuk menarik kebijakan strategis ke arah pertahanan yang dangkal tanpa lapisan yang banyak.⁵⁵

Pengukuran teori baru melalui analisa n dalam jumlah besar menghasilkan tiga poin penting. Pertama, fenomena *security dilemma* tidak dapat dihilangkan meskipun negara terus mengembangkan dominasi defensif. Kapabilitas untuk memiliki pertahanan yang dalam memberikan kesempatan melakukan serangan balik. Sementara itu, membentuk serangan balik dipandang relatif lebih mudah dibanding melakukan tindakan ofensif sejak awal. Berdasarkan logika ini, pada saat bersamaan terbentuk *double stable* seperti yang dikemukakan Jervis, bahwa terbentuk keuntungan defensif sedangkan pembedaan offense defense tidak

⁵⁴ *Ibid.* hal. 755.

⁵⁵ *Ibid.* hal. 756.

terbentuk, maka *security dilemma* meskipun tidak besar, tetap tidak dapat dihilangkan.⁵⁶

Kedua, teori baru ini memprediksikan akan frekuensi perang yang lebih banyak di masa mendatang. Bagian ini berasal dari keberadaan *security dilemma* yang menghasilkan insentif untuk melakukan transmisi informasi yang tertutup. Fenomena ini mendorong ketidakpastian yang lebih besar pada lingkungan militer dengan semakin kaburnya proyeksi hasil perang, negosiasi perdamaian yang lebih sedikit, dan semakin besar insiden perang antara negara yang rasional.⁵⁷ Pada akhirnya teori ini membuka jalan baru untuk pendekatan behavioralis dalam *Offense Defense Theory*. Studi keamanan internasional umumnya melihat sisi struktural dan kaitan material dibanding perilaku khusus aktor. Hal itu disebabkan kajian baru ini menekankan pada bagaimana negara menggunakan kapabilitas materialnya, bukan sekedar statistik kualitas kapabilitas material itu sendiri.

Dalam perkembangannya, *Offense Defense Theory* mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan. Jika melihat dari rentang penyusunan Snyder hingga Biddle maka dapat dilihat beberapa hal yang selalu dibahas, meskipun masing-masing penulis memiliki argumen yang berbeda mengenai hal tersebut. Pertama, mereka membahas mengenai kemungkinan terjadinya perang. Masing-masing penulis mengemukakan berdasarkan teori yang mereka kembangkan apakah kemungkinan terjadinya perang adalah mudah atau sulit (*likeness of war*). Kedua, yang paling penting dari kerangka pemikiran *Offense-Defense Theory* adalah untuk menjawab apa yang menyebabkan perang (*causes of war*). Ketiga, selain mengkaji apa yang menyebabkan perang, mereka juga mengkaji faktor-faktor apa saja yang membuat penyebab perang itu dapat muncul, mendominasi, dan memberi dampak pada politik internasional (*causes of dominance*). Secara umum, pembahasan tersebut terangkum dalam tabel di bawah ini.

⁵⁶ *Ibid.* hal. 769.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 770.

Tabel 2.3
Matriks Elemen Pembahasan Offense-Defense Theory
pada Berbagai Peneliti

	Likeness of War	Causes of War	Causes of Dominance
Snyder – Evera	High	Offensive thought	State paradigm
Jervis	High	Misperception	Leader paradigm
Glaser & Kaufmann	Moderate	Offense Dominance	Material & Ideal of State
Biddle	Moderate	Offense Dominance	Use of Material

Dalam teori yang dikemukakan oleh Snyder, Evera, dan Jervis, kemungkinan terjadinya perang dapat digolongkan tinggi. Khususnya Snyder dan Evera yang mengkaji mengenai penyebab Perang Dunia I, menemukan bahwa *cult of offensive* dengan mudahnya tersebar ke seluruh penjuru Eropa. Mudahnya penyebaran paham ini, mengakibatkan sebuah perang besar. Dengan demikian perang dapat dengan mudah terjadi sejalan dengan menyebarnya paham tersebut. Hal serupa juga masih di kemukakan Robert Jervis dengan teori akan mispersepsi menyebabkan perang. Perang mudah terjadi karena salah mengkalkulasikan, sedangkan dalam politik internasional, kabut ketidakpastian pasti selalu terjadi. Maka insentif kemunculan perang dilihat cukup besar.

Di sisi lain, Glaser, Kaufmann, dan Biddle menunjukkan bahwa terjadinya perang merupakan proses yang rumit. Dengan berbagai pertimbangan kapabilitas material dan ideal, negara memiliki banyak alasan untuk tidak berperang. Proses pemikiran yang panjang menjadi hambatan tersendiri untuk terjadinya perang. Oleh karena itu, negara akan menunda-nunda pelaksanaan perang seandainya tidak yakin benar dengan rasio kapabilitas yang dimilinya terhadap lawan yang bertahan.

Dari segi penyebab perang, pemikiran mereka juga terus mengalami evolusi. Snyder menyatakan perang terjadi karena terbentuk dan menyebarnya

cult of offensive yakni paham bahwa bertindak menyerang akan mendapat keuntungan lebih baik. Evera juga menambahkan 10 konsekuensi ketika keadaan dominasi ofensif terjadi pada negara. Namun hal yang berbeda di kemukakan Jervis bahwa negara mengambil posisi ofensif karena mereka dalam sebuah fenomena yang disebut mispersepsi. Negara tidak dapat melihat dengan jelas konsekuensi dari perang sehingga memilih tetap menggunakan perang sebagai alat pencapaian kepentingannya. Sedangkan Glaser, Kaufmann, dan Biddle sependapat bahwa dominasi ofensiflah yang menyebabkan perang. Namun berbeda dengan *cult of offensive* Snyder, proses penentuan ofensif atau defensif yang diuntungkan bersifat *dyadic* antara pihak penyerang dan pihak bertahan. Tindakan ofensif lebih mendominasi ketika posisi menyerang lebih diuntungkan, sebaliknya tindakan defensif lebih mendominasi ketika posisi bertahan lebih diuntungkan. Proses yang terjadi pada unit ini tidak terulang serupa pada unit lainnya, sehingga setiap perang adalah kasus tunggal dan tidak dapat disamaratakan dengan perang-perang lainnya.

Pada faktor-faktor yang mendorong penyebab perang terbentuk, para penulis tersebut beranjak dari pendekatan struktural yang melihat negara sebagai aktor tunggal kepada pendekatan neoklasikal yang melihat faktor-faktor internal dapat mempengaruhi kebijakan umum negara. Snyder memulai dengan pemikiran struktural bahwa tindakan negara mengadopsi *cult of offensive* adalah karena negara itu sendiri melihat bahwa dengan menyerang dapat memberikan keuntungan yang lebih baik. Meskipun Snyder mengambil contoh dari kasus kemunculan *cult of offensive* dari Schiffelen dan Moltke, namun penyebaran ke negara-negara Eropa lainnya dipandang begitu saja terjadi, tanpa mengkaji ulang dinamika politik internal di dalam negara. Sedangkan Jervis melihat mispersepsi ini dilakukan oleh pemimpin. Sesuai dengan argumen “Jika saja Czar, Kaiser, perdana menteri, dan presiden tahu konsekuensi yang ditimbulkan dari Perang Dunia II, maka perang ini tidak akan terjadi”, terlihat bahwa fokus dari fenomena mispersepsi ada pada puncak pimpinan pengambil keputusan. Menurut Jervis, ispersepsi dari pemimpinlah yang memfasilitasi miscalculasi untuk terus berjalan hingga akhirnya menyebabkan perang.

Di sisi lain, Glaser, Kaufmann, dan Biddle yang memiliki pandangan neoklasikal mulai memasukan modifier struktural sebagai faktor-faktor yang menyebabkan dominasi ofensif sebagai penyebab perang terus berjalan. Glaser dan Kaufmann mewakili pemikiran *Offense-Defense Theory* pada umumnya yang cukup menitikberatkan pada teknologi sebagai salah satu determinan utama kemunculan perang. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang memungkinkan penyerangan kilat, maka perang akan semakin mungkin terjadi karena kabut peperangan (Clausewitz – Fog of War) semakin dapat disingkapkan. Meskipun demikian, faktor lain seperti geografi dan nasionalisme juga masuk hitungan sehingga melengkapi modifier struktural dengan dorongan perang dari politik internal negara. Sedangkan Biddle berpendapat bahwa kepemilikan kapabilitas tidak serta merta menjadikan perang semakin mungkin terjadi. Penentuan dominasi ofensif dan defensif dihitung dari bagaimana negara menggunakan kapabilitas material dan ideal mereka. Oleh karenanya Biddle menyoroti bagaimana negara menggunakan teknologi yang mereka miliki dalam konteks perang, demikian juga geografi dan pengeluaran senjata untuk menemukan apakah posisi ofensif atau defensif yang lebih diuntungkan.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah *Offense Defense Theory* semakin menegaskan kemampuan kondisi defensif dalam mencegah perang. Evolusi pemikiran telah membawa teori ini kepada operasionalisasi yang melihat bahwa perang adalah serangkaian proses rumit yang kemungkinan besar tidak membentuk perang itu sendiri. Dengan permainan modifier struktural dan model pengeluaran senjata, negara semakin melihat bahwa perang modern adalah lebih kompleks dari pada yang dilakukan abad-abad yang lampau.

Bab III

Stabilitas dalam Dinamika di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk mendeskripsikan variabel dependen dalam bentuk penjabaran definisi perang dan deskripsi objek penelitian beserta dinamikanya. Definisi perang diambil berdasarkan pemikiran David Singer dan Melvin Small yang tertuang dalam proyek *Correlates of War*. Sedangkan deskripsi objek penelitian diawali dengan deskripsi kondisi politik dan militer Indonesia, Malaysia, serta Singapura. Pembahasan kemudian dilanjutkan dinamika yang terjadi di antara ketiga negara ini. Dinamika tersebut dilihat dari spektrum positif yaitu yang terkait kerjasama hingga spektrum negatif yaitu kemunculan persengketaan wilayah dan ketegangan yang melibatkan unsur militer. Permasalahan persengketaan wilayah dipilih sebagai model dinamika negatif karena mewakili bentuk perselisihan yang paling dasar yaitu perselisihan mengenai kedaulatan negara.

III. 1. Definisi Perang

III. 1.1 Definisi Perang Menurut *Correlates of War*

David Singer dan Melvin Small memulai proyek *Correlates of War* sebagai upaya mendefinisikan perang dengan tujuan membedakan dan memperkaya kajian untuk mengenali perang yang seharusnya berbeda dari bentuk kekerasan lainnya. Proyek ini dimulai tahun 1963 oleh Singer dengan tujuan mengumpulkan data ilmiah yang sistematis mengenai perang. Kemudian Dengan diperkuat oleh pakar sejarah Melvin Small, proyek ini mulai bekerja untuk menyatukan lebih banyak rangkaian data mengenai insiden dan kelanjutan perang antar negara dan ekstra sistem pada periode setelah Napoleon. Untuk melakukan penelitian ini, Singer dan Small perlu terlebih dahulu menyelesaikan operasionalisasi jawaban dari terminologi “negara” maupun definisi yang akurat mengenai “perang”.⁵⁸

Pendefinisian perang dimulai dari pemikiran, “*We must define war in terms of violence. Not only is war impossible without violence (except of course in*

⁵⁸ “Project History”, diakses dari <http://www.correlatesofwar.org/cowhistory.htm>, 23 November 2010, 18.19 WIB.

the metaphorical sense), but we consider the taking of human life the primary and dominant characteristic of war."⁵⁹ Berdasarkan pemikiran tersebut, definisi perang dirumuskan bergantung pada dua kriteria utama yaitu batas fatalitas (korban) pasukan yang terkait pertempuran dan status dari partisipan perang. Singer dan Small akhirnya memutuskan batas fatalitas pasukan sejumlah 1000 jiwa untuk tingkat kehancuran yang membedakan perang dari bentuk kekerasan lainnya. Untuk kriteria yang kedua, sebuah perang terjadi ketika masing-masing pihak yang terlibat memiliki organisasi yang dapat menyelenggarakan pertempuran (angkatan bersenjata). Dengan demikian, secara umum perang adalah pertempuran yang berlangsung terus menerus, melibatkan angkatan bersenjata yang terorganisasi, dan menghasilkan fatalitas pasukan minimal 1000 jiwa. Jumlah ini kemudian direvisi dengan menghitung batas minimal dalam kurun waktu 12 bulan.⁶⁰

Berdasarkan definisi tersebut diperoleh beberapa tipologi perang. Pertama, perang antar negara yang merupakan perang antara dua entitas politik secara konvensional. Kedua, perang ekstra-sistem yang merupakan perang antara negara sebagai anggota sistem internasional dengan aktor lain non-negara yang tidak termasuk menjadi anggota sistem internasional. Ketiga, perang sipil yang merupakan perang antara negara dengan kelompok tertentu di dalam negara itu sendiri. Di Asia Tenggara terjadi banyak konflik, namun tiga negara yang muncul dalam klasifikasi dan daftar perang *Correlates of War* hanya Vietnam, Kamboja, dan Burma (Myanmar).

Tabel 3.1
Data Perang di Asia Tenggara

	Inter-State	Extra-Sistem	Civil War
Vietnam		Franco-Indochinese (1858)	Republic of Vietnam vs NLF
	Perang Vietnam (1965)		
	Perang Vietnam-Kamboja (1975)	Franco-Tonkin (1873)	

⁵⁹ Melvin Small and David Singer. *Resort to Arms: International and Civil War, 1816–1980*. (Beverly Hills, CA: Sage, 1982), hal. 205–206.

⁶⁰ Meredith Reid Sarkees, "The COW Typology of War: Defining and Categorizing Wars (Version 4 of the Data)" www.correlatesofwar.org, 23 November 2010.

	Perang Sino-Vietnamese (1979) Perang Sino-Vietnamese (1987)	
Kamboja	Perang Vietnam-Kamboja (1975)	Cambodia vs Khmer Rogue (1970) Cambodia vs Khmer Rogue (1978) Cambodia vs Khmer Rogue (1993)
Myanmar	Perang British-Burmese (1823) Perang British-Burmese (1852) Perang British-Burmese (1885)	Burma vs Karens (1948) Burma vs Ethnic Rebels (1968) Burma vs Kachin Rebels (1983)

Sumber : www.correlatesofwar.org

Salah satu contoh perang terdahsyat di Asia Tenggara adalah Perang Vietnam tahun 1965. Pada perang tersebut pasukan gerilyawan Ho Chi Minh mempertahankan kedudukan Vietnam Utara dari invasi Vietnam Selatan yang ditunggangi Amerika Serikat. Menurut *data set* Correlates of War (CoW), perang ini berlangsung selama 3735 hari atau sekitar 10 tahun. Dalam periode ini sudah tercatat kematian pasukan di masing-masing pihak sejumlah 1.021.442 jiwa. Perang ini tidak dilakukan dalam skala kecil, sebaliknya Amerika Serikat karena ketakutannya akan “Domino Theory” menghabiskan US\$ 200 juta sebagai bantuan finansial untuk pihak Vietnam Selatan.⁶¹ Bahkan dalam pemerintahan John F. Kennedy, AS berencana meningkatkan bantuan kepada Vietnam Selatan sebagai pelaksanaan doktrin *flexible response*. Presiden juga mengutus sekitar 16.000 advisor yang terkait operasi konvensional dan inkonvensional untuk mendukung pergerakan U.S. Army.⁶² Meskipun Kennedy berakhir di ujung

⁶¹ D. Antonio Cantu dan Sandy Cantu. *The Vietnam War: A National Dilemma*. Prepared for: America's History in the Making Oregon Public Broadcasting by Organization of American Historians and the National Center for History in the Schools, UCLA, hal. 6.

⁶² *Ibid.*

peluru, namun strategi tersebut tetap berjalan. Penerusnya, Presiden Lyndon Johnson menambah kekuatan pasukan hingga mencapai setengah juta tentara AS berada di Vietnam. Keterlibatan AS di Vietnam mengalami titik balik saat pasukan Vietnam Utara dan Vietcong dengan 80.000 pasukan berhasil menggempur kota-kota penting Vietnam Selatan, sedangkan di dalam negeri terjadi aksi menolak perang yang semakin keras. Hal ini bukan saja melampaui kriteria “perang” menurut CoW, tetapi menjadi sebuah kasus di titik ekstrim yang mampu menggambarkan bentuk perang yang dimaksud definisi CoW.

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang, dinamika antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura paska Perang Dingin tidak pernah menunjukkan salah satu tipologi perang. Tidak heran dalam data set CoW, tidak pernah disebutkan nama Indonesia, Malaysia, ataupun Singapura. Perang tidak pernah terjadi diantara mereka maupun antara mereka dengan pihak asing. Persengketaan dan perselisihan yang melibatkan unsur militer tidak sampai menimbulkan perang seperti yang dimaksud definisi CoW. Oleh karena itu perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk menemukan bentuk dinamika seperti apa yang terjadi di antara ketiga negara ini sehingga memunculkan insentif perang tetapi tidak sampai memunculkan perang itu sendiri.

III. 1.2 Definisi Perang Menurut Clausewitz (Absolute War).

Perang secara umum didefinisikan sebuah konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan, namun ukuran terjadinya kekerasan masih membuka celah untuk definisi yang longgar. Definisi yang lebih tepat diberikan dengan memberikan indikator-indikator tertentu sampai sejauh mana penggunaan kekerasan digunakan. Penggunaan model perang yang terdefinisikan mampu memberikan pemahaman lebih baik untuk penelitian ini ke depannya. Berdasarkan manfaat tersebut, definisi perang yang digunakan dalam penelitian ini juga merujuk pada konsepsi *absolute war* dari Clausewitz.

Perang menurut Clausewitz ada dalam spektrum pemenuhan kepentingan nasional dengan spektrum negatif yaitu perang (penggunaan kekerasan) dan spektrum positif yaitu politik (penggunaan kekuasaan politis). Dengan demikian penggunaan politik yang gagal akan menggeser upaya pemenuhan kepentingan

nasional ke spektrum negatif. Clausewitz sendiri memberikan definisi utama dari konsepsi perangnya, “*war therefore is an act of violence intended to compel our opponent to fulfill our will.*”⁶³ Dalam aplikasinya, perang bukanlah ilmu pengetahuan maupun seni. Clausewitz berargumen bahwa objek dari ilmu pengetahuan adalah wawasan dan kepastian sedangkan objek dari seni adalah kreativitas. Akan tetapi dengan banyaknya kompleksitas pelaksanaan perang yang tidak sebanding dengan ide melakukan perang yang cenderung sederhana dan terletak di permukaan⁶⁴, pemikiran Clausewitz meletakkan konsep *war-making* ke dalam ranah seni, meskipun kedua definisi masih kurang memuaskan.⁶⁵

Beberapa definisi lanjutan diberikan Clausewitz terkait konsepsi perang sebelumnya. Pertama, adanya penggunaan kekerasan yang paling tinggi. Negara yang mengejar kemenangan dalam perang tidak dapat mengeksklusi faktor-faktor minor seperti kerjasama intelijen. Pihak yang menginginkan kemenangan harus mengaplikasikan kekuatan secara efektif untuk mendapatkan superioritas dari lawannya. Akan tetapi batasan penggunaan kekuatan pada titik maksimum tersebut berbeda pada masing-masing negara. Negara dengan tingkat intelegensia yang lebih baik akan menggunakan cara-cara yang lebih “manusiawi” misalnya pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan korban sipil. Meskipun demikian, dalam bentuk apapun, perang tetap didorong dengan prinsip negara akan memaksa penggunaan kekuatannya hingga ke batas tertinggi.⁶⁶

Kedua, tujuan perang adalah untuk melumpuhkan lawan. Memang pada kenyataannya perang dengan tujuan pelumpuhan total akan menuntut penggunaan kekuatan dan kekerasan yang lebih besar. Harga yang harus dibayar akan lebih besar, namun menurut Clausewitz hal ini tidak menjadi masalah karena dengan pelumpuhan total menghasilkan prospek yang lebih baik untuk adanya perubahan sesuai dengan kehendak pemenang perang. Tanpa pelumpuhan total maka ada kemungkinan tindakan resiprokal bahwa lawan yang akan memiliki kuasa untuk mendikte kita. Jika lawan tidak dikalahkan total, ada kemungkinan mereka akan

⁶³ Clausewitz. *On War*. Diakses dari

<http://www.clausewitz.com/readings/OnWar1873/BK1ch01.html>, 5 Januari 2011

⁶⁴ Clausewitz. *The Campaign of 1812 in Russia*. (London: J. Murray, 1843) hal. 185.

⁶⁵ Christopher Bassford. “Clausewitz and His Works” diakses dari

<http://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Cworks/Works.htm#Absolute>, 5 Januari 2011

⁶⁶ “The Project Gutenberg EBook of On War”, diakses dari www.gutenberg.org, 5 Januari 2011

mengalahkan kita sehingga kemudian akan melakukan apa yang telah kita lakukan pada mereka.⁶⁷ Dengan demikian pelumpuhan total adalah sebuah keharusan untuk kemenangan yang *sustainable*.

Ketiga, jika kita bertujuan untuk mengalahkan musuh, kita harus memproposisikan upaya kita dengan kekuatan musuh untuk melawan. Hal ini mengekspresikan dua faktor yang tidak terpisahkan yaitu penjumlahan dari kemampuan yang tersedia dan kekuatan kemauan. Dua hal ini akan menunjukan sampai sejauh mana musuh akan melawan sehingga mampu memproposisikan sejauh mana kekuatan kita dapat didorong ke batas tertingginya.⁶⁸

Berdasarkan definisi-definisi diatas, muncul konsep *absolute war* muncul sebagai model perang ideal yang seharusnya dilakukan negara. Perang memang tidak dapat diselesaikan dengan satu serangan tunggal, namun secara ideal Clausewitz menginginkan pertempuran desisif sebagai penentu kemenangan perang. Tugas negara, kemudian, adalah untuk menciptakan pertempuran desisif tersebut. Pada akhirnya Clausewitz mengemukakan sebagian kesimpulan dari tulisannya dengan, "*What do we mean by the defeat of the enemy? Simply the destruction of his forces, whether by death, injury, or any other means -- either completely or enough to make him stop fighting...The complete or partial destruction of the enemy must be regarded as the sole object of all engagements...Direct annihilation of the enemy's forces must always be the dominant consideration.*" Dengan demikian untuk menghasilkan perang yang ideal, negara harus mempertimbangkan secara matang cara-cara untuk mendapatkan *direct annihilation*. Hal tersebut hanya dapat diciptakan dengan sebuah pertempuran desisif. Definisi inilah yang menjadi rujukan seperti apa perang yang dimaksud dalam penelitian ini.

III. 2. Definisi Stabilitas Berdasarkan Pemikiran Realisme

Secara sistemik stabilitas adalah ketiadaan perang. Karl Deutch dan David Singer berpendapat bahwa stabilitas adalah probabilitas sistem akan mempertahankan karakter esensialnya. Bahwa tidak ada satu negara yang menjadi dominan, bahwa sebagian besar anggotanya tetap bertahan hidup, dan bahwa

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

perang dalam skala besar tidak terjadi.⁶⁹ Sedangkan dalam perspektif yang lebih mendetail, secara negara tunggal, stabilitas merupakan suatu keadaan dimana mereka dapat terus mempertahankan kemerdekaan politik dan wilayahnya tanpa sebuah probabilitas terikutserta dalam sebuah “*war for survival*.”⁷⁰ Pada titik ini sebuah kesimpulan penting mengenai stabilitas adalah ada atau tidaknya perang.

Realisme melandaskan pengertian stabilitas pada keberadaan perang karena menurut realisme prinsip-prinsip dasar dalam sistem internasional tidak pernah berubah, yaitu selalu anarki. Perubahan unipolar menjadi bipolar ataupun multipolar tidak mengubah anarki, sehingga keadaan *self-help* tidak juga hilang. Cara negara mencukupkan kebutuhan keamanannya memang berubah seiring dengan perubahan polaritas. Akan tetapi dalam setiap bentuk polaritas, negara selalu mengejar satu kepentingan yang sama, yaitu tetap bertahan hidup. Berdasarkan kepentingan bertahan hidup inilah, keberadaan perang menjadi vital karena sesungguhnya perang tidak pernah dapat dihilangkan.

Cara satu-satunya menghilangkan perang adalah menghapus sistem internasional.⁷¹ Jika sistem internasional saat ini bersifat anarki, maka cara menghapus perang adalah dengan menghapus sistem yang anarki. Selama berabad-abad pemikir liberal selalu mencari cara untuk menghilangkan dominasi konsep anarki dan *security dilemma*. Mereka mencoba mengeluarkan konsep struktur dari pendekatan struktural dengan menjamin kestabilan dunia melalui demokrasi, yaitu saat semua negara menganut prinsip demokrasi. Realisme tetap bertahan bahwa disaat semua negara menjadi demokratis, ketiadaan kekuasaan eksternal membuat negara tidak tahu pasti bahwa teman hari ini tidak akan menjadi musuh di kemudian hari. hal tersebut dikarenakan struktur internasional tidak berubah karena perubahan internal dalam negara. Struktur internasional akan tetap bersifat anarki.⁷²

Dengan demikian, apa yang disebut instabilitas adalah keadaan negasi dari definisi stabilitas. Dalam instabilitas ada perang, ada negara yang dominan

⁶⁹ Karl W. Deutsch; J. David Singer, “Multipolar Power Systems and International Stability” *World Politics*, Vol. 16, No. 3. (April, 1964), hal. 390.

⁷⁰ *Ibid.* hal. 391.

⁷¹ Kenneth Waltz, “Structural Realism after the Cold War” *International Security*, Vol. 25, No. 1 (Summer, 2000) hal. 8.

⁷² *Ibid.* hal. 10.

sehingga berusaha menganeksasi negara lainnya, dan ada negara yang merupakan bagian dari sistem yang kemudian tidak lagi ada di muka bumi. Dunia sudah menyaksikan beberapa contoh instabilitas seperti Perang Peloponessian, Perang Koalisi, Perang Dunia I & II, Perang Vietnam, hingga Perang di Irak dan Afghanistan. Pada contoh perang tersebut, perang tidak lantas menghapus sebuah negara, tetapi secara internal, tidak ada lagi kemerdekaan politik dan integritas wilayah negara yang diserang negara dominan. Di samping fatalitas korban pasukan yang sudah lebih dari 1000 jiwa, secara politis perang sudah mengganti kekuasaan yang sah pada negara yang teraneksasi. Perang Afghanistan dan Irak menunjukkan bagaimana sebuah negara dominan mampu menghapuskan kemerdekaan politik dan wilayah dari pemerintah yang sah di negara tersebut. Hasilnya, muncul masalah dengan pemerintah bentukan baru terkait masalah kemerdekaan politik yang terampas.

III. 3. Deskripsi Objek Penelitian.

Penelitian ini memiliki objek penelitian tiga negara dalam sebuah wilayah yang berdekatan. Mereka adalah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini berada dalam sebuah jalur laut yang dikenal sebagai Selat Malaka. Bukan hanya itu saja, Indonesia dan Malaysia berbagi batas wilayah daratan di Pulau Kalimantan, sedangkan bersama Singapura berbatasan laut di Selat Malaka yang tidak lebih lebar dari 50 km.⁷³ Pada bagian deksripsi objek penelitian ini akan dibahas mengenai situasi politik, kondisi geografis, dan doktrin militer yang dimiliki masing-masing negara. Dengan eksplanasi hal-hal diatas, diharapkan muncul pemahaman yang seragam mengenai ketiga negara ini.

III. 3.1. Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang cukup luas membentang diregional Asia Tenggara. Ukuran wilayah Indonesia yang luas menjadi kekuatan tawar sendiri, terutama ketika mengingat jumlah sumber daya, baik manusia

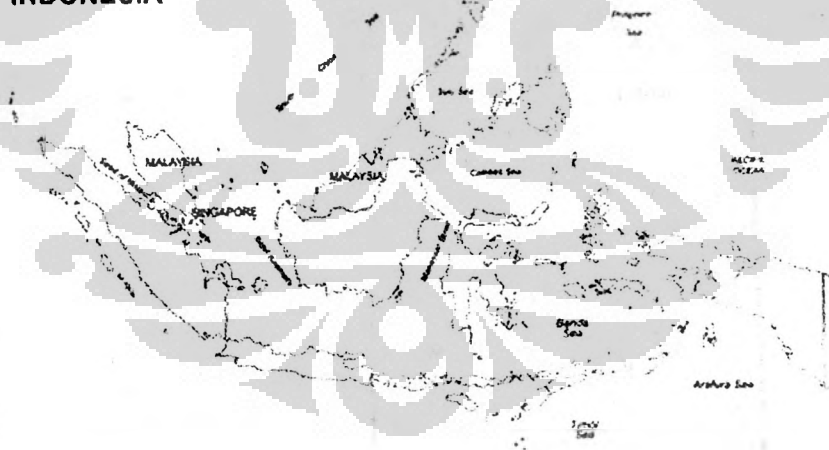
⁷³ Lebar Selat Malaka bervariasi di tiap garis pantai. Selah satu lebar tersempit hanya sejauh 2.8 km sehingga persinggungan batas laut territorial terbentuk sepanjang selat ini. Selat Malaka tidak memiliki perairan internasional (bebas) tetapi kapal internasional dapat melintasi selat ini dengan mematuhi prinsip-prinsip pelayaran internasional, misalnya prinsip *innocent passage*.

maupun alam yang berlimpah. Dengan total populasi sekitar 220 juta penduduk, Indonesia menempati posisi keempat dalam peringkat jumlah penduduk terbanyak sedunia. Sedangkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat beragam, mulai sumber daya yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, emas, berlian, dan batu bara, hingga sumber daya “hijau” yang terbarukan seperti keragaman satwa dan hutan hujan tropis.

Akan tetapi sumber daya yang besar tidak serta merta sejalan dengan kemakmuran negara. Salah satu penyebabnya adalah pengaturan politik yang belum dewasa. Proses demokrasi yang berjalan sejak tahun 1999 belum menuai hasil maksimal. Namun Indonesia memiliki prospek positif dalam hal demokrasi mengingat pertumbuhan ekonomi sudah di atas 6% dan pendapatan per kapita sudah menembus US\$ 2000 per kapita. Jika Indonesia dapat membuktikan keberhasilan proses demokrasi sekaligus kesejahteraan, maka hal ini sesungguhnya membatalkan banyak teori yang pesimis terhadap demokrasi dan kesejahteraan.

Gambar 3.1
Peta Wilayah Indonesia

INDONESIA



Salah satu dampak dari ketidakdewasaan politik dan kesejahteraan yang kurang adalah pada permasalahan keamanan yang timbul. Mengutip buku putih pertahanan Indonesia, pertahanan ditujukan untuk Military Operation Other Than War (MOOTW) yang memiliki target tindak separatis, terorisme, dan insurgensi dalam negeri lainnya. Oleh karena itu model pertahanan semesta masih digunakan

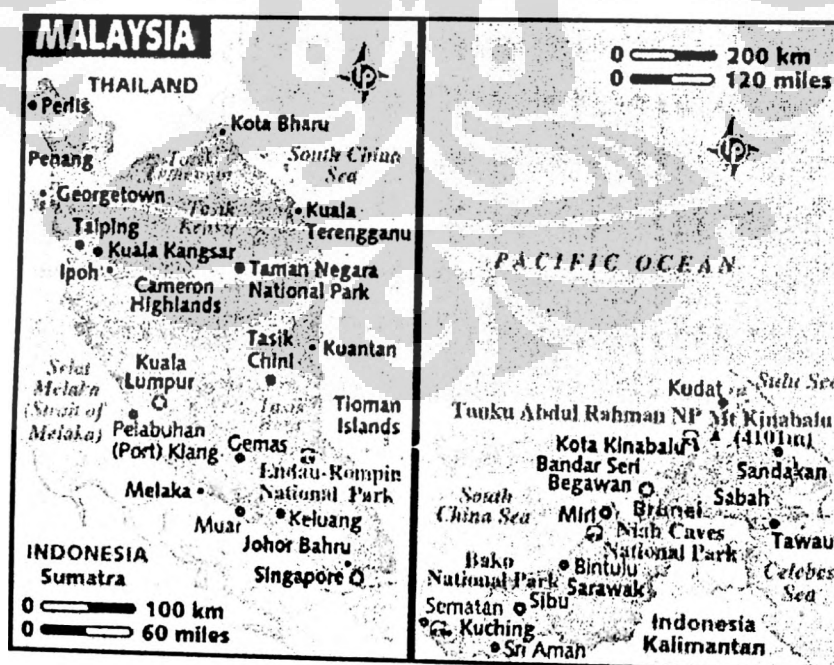
dengan basis utama kekuatan pada TNI Angkatan Darat. Doktrin semacam ini mengandalkan attrition war sebagai penangkal terhadap ancaman luar dengan model peperangan gerilya yang mengikut sertakan komponen cadangan dan pendukung, serta seluruh rakyat.⁷⁴

III. 3.2. Malaysia.

Malaysia adalah negara yang wilayah daratannya terpisah di dua tempat. Satu wilayah berada di peninsula Asia Tenggara dan wilayah lainnya berbatasan dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Malaysia sendiri berdiri dengan pembentukan Federasi Malaya oleh Inggris yang pada saat itu masih mengikutsertakan Singapura ke dalamnya. Setelah Singapura melepaskan diri, maka berdirilah negara Malaysia sebagai negara mandiri. Meskipun hasil didikan kolonial Inggris, sistem politik di Malaysia berhaluan otoritarian yang dibalut dalam nuansa demokratis. Malaysia sendiri memiliki perekonomian yang cukup baik dengan dukungan pemerintah yang kuat, namun di sisi lain alam keterbukaan tidak sebesar negara demokrasi pada umumnya.

Gambar 3.2

Peta Wilayah Malaysia



Malaysia secara militer tidak terlalu menonjol dari segi kepemilikan teknologi. Meskipun demikian Malaysia sudah mulai mengarahkan kemampuan

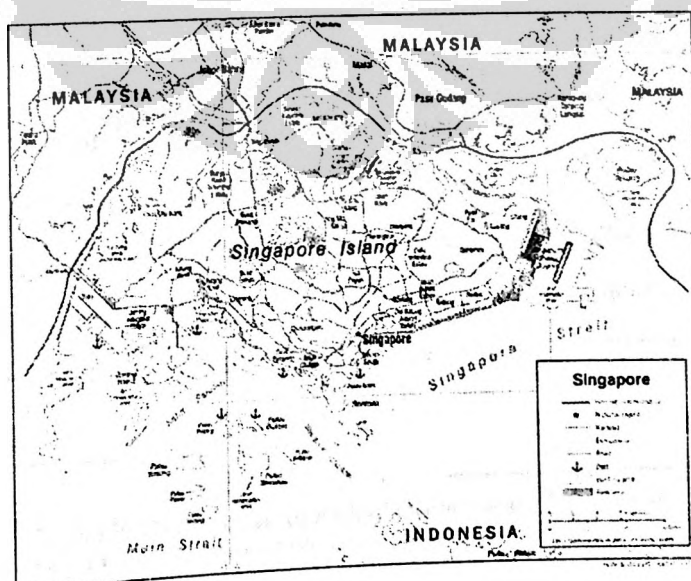
⁷⁴ Disarikan berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003.

militer pada visi C4ISR dengan mulai mengakuisisi UAV dan pesawat tempur generasi 4. Kekuatan Malaysia lainnya adalah terletak pada Five Power Defense Arrangement (FPDA) yang mengikut sertakan Inggris (dan NATO sebagai pendukungnya) sebagai salah satu anggota. Perjanjian tersebut menyatakan jika salah satu anggota di serang maka anggota lain harus menolong. Meskipun beberapa orang sanksi apakah perjanjian ini masih efektif selepas Perang Dingin, namun secara normative perjanjian ini memberikan posisi tawar yang baik untuk pertahanan Malaysia.

III. 3.3. Singapura.

Singapura adalah negara pulau yang dahulu bernama Temasik. Setelah ditukar Gubernur Raffles dengan Indonesia, Temasik menjadi milik Inggris. Raffles memang memiliki visi yang baik, nyatanya saat ini Singapura menjadi salah satu pelabuhan penting bagi pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan, Afrika, dan Eropa. Meskipun demikian, negara ini masih diperintah dengan otoriter sejak momentum lepasnya Singapura dari Malaysia dan membentuk negara berdaulat. Kegiatan perekonomian didominasi nuansa kapitalisme namun sistem politik tetap berjalan otoritarianisme. Dua hal yang berjalan berbarengan ini terbukti baik mendorong Singapura menjadi salah satu negara terkaya di Asia dan di dunia.

Gambar 3.3
Peta Wilayah Singapura



Meskipun luas wilayah Singapura tidak lebih besar dari Jawa Barat, namun kemampuan militernya tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Singapura yang tergabung juga dalam FPDA tidak serta merta meletakkan basis pertahanannya pada perjanjian ini, sebaliknya mereka berorientasi pada C4ISR dengan pembangunan kapabilitas UAV dan pesawat tempur generasi 5. Sebagaimana diketahui, Singapura berpartisipasi dalam pengembangan jet tempur terbaru F-35 Lightning II bersama Amerika Serikat dan Israel. Berkat keterlibatan ini, Singapura berhak membeli F-35 yang diproduksi di AS dengan harga hanya setengahnya. Hal ini akan membuat Singapura menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki pesawat tempur generasi 5 buatan AS yang terbukti unggul dalam sistem avionik dan stealth. Berdasarkan statistik, Singapura memang memfokuskan diri pada pengembangan kekuatan udara, sedangkan kekuatan laut dan darat tidak memiliki proporsi kekuatan yang besar. Hingga saat ini Singapura adalah pengoperasi F-16 C/D Blok 52 dan F-15 SG terbanyak di Asia Tenggara. Dengan kapabilitas ini, dipastikan Singapura memiliki dominasi sempurna atas wilayah udaranya yang memiliki dampak pada pengawasan wilayah laut dan darat juga.

III.4. Dinamika di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura

III. 4.1. Kerjasama Lintas Batas.

Pada 16 November 1971, pemerintah Indonesia dan Malaysia mendeklarasikan bahwa perairan Selat Malaka bukanlah perairan internasional meskipun mereka tetap memberikan pemahaman atas pelayaran internasional berdasarkan prinsip *innocent passage*.⁷⁵ Beberapa ahli menilai bahwa inisiatif ini lebih banyak dilakukan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia dianggap sejak lama menunjukkan usaha mewujudkan integritas politik di dalam wilayah yang terpecah secara kepulauan. Kerjasama ini menandakan mulai dikesampingkannya memori akan Konfrontasi dan dimulainya era kerjasama kelautan.⁷⁶ Akan tetapi kemudian Singapura mengoposisi gagasan ini. Pemerintah Singapura berpegangan pada

⁷⁵ Michael Leifer dan Dolliver Nelson, "Conflict of Interest in the Strait of Malacca" *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 49, No. 2 (April, 1973), hal. 190.

⁷⁶ *Ibid.* hal. 193.

keberatan bahwa kerjasama ini dapat menetralkan keterlibatan negara besar yang berimplikasi pada meningkatnya potensi dominasi negara dalam regional.⁷⁷

Periode paska Perang Dingin menunjukan Asia Tenggara sebagai wilayah yang stabil dengan semakin dewasanya peran ASEAN. Di masa akhir abad kedupuluh juga ditandai dengan menguatnya isu-isu keamanan non-tradisional yang menyebabkan kerjasama ditujukan untuk hal demikian. Berbagai kerjasama latihan kelautan dilakukan antara Indonesia-Malaysia, Malaysia-Kamboja, Brunei-Australia, Singapura-India, and Malaysia-Filipina, hingga koordinasi patrol di Selat Malaka oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahkan tahun 2004 dalam sebuah rapat FPDA, Malaysia mengumumkan proyeksi baru perjanjian ini yaitu berfokus pada penanganan anti-terorisme, insepisi maritim, dan anti-pembajakan.⁷⁸

Disamping perkembangan yang dilakukan sebagian besar oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dukungan negara besar lainnya juga menambahkan potensi kerjasama yang semakin baik. Terbentuknya Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) pada November 2004 oleh ASEAN + China, Korea Selatan, Jepang, Bangladesh, Sri Lanka dan India menunjukan komitmen untuk mengentaskan fenomena pembajakan yang sangat besar terjadi di perairan Selat Malaka. Dengan berbagai forum dan organisasi ini, dialog dan pertukaran informasi semakin besar, negara semakin berkomitmen di dalamnya, dan beberapa negara sudah mengoperasionalisasikan keamanan maritim bersamanya.⁷⁹

III. 4.2. Kerjasama Berlapis dengan Negara Besar.

Keberadaan kerjasama di antara ketiga negara ini dipandang tidak cukup sehingga masing-masing negara juga mencoba mengusahakan kerjasama keamanan dengan negara besar. Sebagaimana diketahui bahwa Asia Tenggara merupakan lokasi strategis yang selalu menjadi perebutan pengaruh dari negara besar, maka tidak heran upaya Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk

⁷⁷ *Ibid.* hal. 194.

⁷⁸ John F. Bradford, "The Growing Prospect for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia" *Naval War College Review*, Vol. 58, No. 3(Summer, 2005), hal. 68.

⁷⁹ *Ibid.* hal. 69.

membuat kerjasama berlapis direspon dengan baik oleh negara besar. Tercatat ada Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang terkait kerjasama keamanan dengan masing-masing negara. Sesungguhnya upaya ini menunjukkan ada rasa ketidakpercayaan akan mekanisme kerjasama keamanan internal ataupun melalui ASEAN. Dinamika dalam kerjasama berlapis ini mulai menggeser spektrum hubungan ketiga negara menuju arah yang lebih negatif.

Indonesia memiliki kerjasama keamanan dengan Australia yang dikenal sebagai Lombok Treaty. Lombok Treaty mengatur 21 kerjasama dalam 10 bidang, yaitu: kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme; kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan (non-proliferasi) senjata pemusnah massal, kerjasama tanggap darurat, organisasi multilateral, dan peningkatan saling pengertian dan saling kontak antar masyarakat dan antar perseorangan. Kerjasama pertahanan sebagaimana terungkap dari pembicaraan di tingkat kepala negara, tingkat menteri maupun panglima TNI dan Panglima ADF menghasilkan antara lain kesepakatan untuk melakukan pendidikan latihan, saling kunjung antarperwira, saling tukar informasi intelijen untuk pemberantasan terorisme, membangun industri pertahanan, sampai kerjasama penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan.⁸⁰

Perjanjian ini menuai kontroversi akibat pasal-pasal yang cukup ambigu sehingga ditafsirkan akan memberi keuntungan yang lebih besar kepada Indonesia. John Bar, warga Australia yang menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Uniting International Mission, mengatakan bahwa Pasal 2 Lombok Treaty pada tataran tertentu tidak menguntungkan Pemerintahan Australia. *"It appears as though the Australian Government may have bowed to pressure from Jakarta for the sake of good relations."* John Bar juga memberi catatan pada Pasal 3 ayat 2 Lombok Treaty. Baginya, kerja sama pelatihan militer antar kedua negara perlu ditinjau ulang, apalagi jika pada prakteknya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, militer Australia akan memberi pelatihan pada Kopasus yang notabene memiliki catatan buruk di ranah hak asasi manusia.⁸¹

⁸⁰ "Lombok Treaty" Newsletter: Media dan Reformasi Sektor Keamanan, diterbitkan atas kerjasama IDSPS, AJI, dan FES Edisi III/06/2008, hal. 1.

⁸¹ *Ibid.* hal. 5.

Di sisi lain, Malaysia dan Singapura sebagai bekas koloni Inggris mengandalkan Five Power Defense Arrangement (FPDA) sebagai pengaturan keamanan berlapis mereka. Pada April 1971, pemerintah Australia, Malaysia, Singapura, dan Inggris Raya mengadakan pertemuan dan menghasilkan komunique yang dipandang sebagai pengaturan politik baru yang disebut FPDA. Ini adalah batu loncatan pada hubungan mereka yang rumit. Terkait dengan kemunduran ekonomi Inggris diakhir tahun 1960an, pemerintah Inggris perlu menentukan prioritas. Maka pada Januari 1968, pemerintah Inggris menyatakan menarik pasukannya dari Malaysia dan Singapura yang akan efektif berlaku tahun 1971. Hal ini memerlukan tindak lanjut mengingat perjanjian Anglo-Malaysian Defence Agreement tahun 1957, sehingga dibentuklah “*loose consultative political framework*” yang ditujukan sebagai media konsultasi pada skenario jika salah satu anggota diserang, maka anggota yang lain harus membantu atau tidak. Penurunan kualitas pertahanan dari AMDA ke FPDA membuat Malaysia dan Singapura mengajukan pembentukan Integrated Air Defence System (IADS) dalam kerangka kerja FPDA untuk menjamin pertahanan udara Malaysia dan Singapura.⁸²

Memang pada akhirnya hanya mekanisme IADS yang paling aktif dalam kerangka kerja FPDA. Latihan militer sudah dilaksanakan sejak tahun 1972, dan mulai tahun 1980 latihan militer juga sudah melibatkan unsur darat dan laut. Meskipun demikian, IADS yang memiliki struktur tidak diimbangi FPDA yang tidak memiliki struktur. Akibatnya hubungan politik di antara negara di dalamnya yang menentukan efektivitas pengaturan keamanan ini. Penarikan keikutsertaan Malaysia dalam latihan gabungan Stardex tahun 1998 dikarenakan alasan Malaysia sedang menghadapi krisis finansial. Padahal pada saat itu memang sedang terjadi gangguan hubungan Malaysia – Singapura. Namun akhirnya Malaysia kembali ikut serta dalam Stardex tahun 1999.⁸³

Dapat disimpulkan bahwa FPDA jelas menunjukkan tautan Malaysia dan Singapura pada perlindungan Inggris dan Australia meskipun ada kerapuhan di

⁸² “Five Power Defense Arrangement (FPDA)”, diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/int/fpda.htm>, 26 November 2010, 14.23 WIB.

⁸³ DR. Khoo How San, “Five Power Defense Arrangement: If It Ain’t Broke...” *Journal of Singapore Armed Forces* Vol. 26, No. 4 (Oktober – Desember 2004).

baliknya. Kerjasama ini telah menunjukkan signifikansinya dalam pembentukan tindakan terorganisasi. Namun kondisi ini hanya bertahan di lapisan tipis, karena sekali rusak maka selamanya tidak akan bangkit kembali.⁸⁴ Hal ini dikarenakan landasan FPDA tidak sekuat kerjasama keamanan pada umumnya, sementara tren pada saat ini tidak menunjukkan kepentingan Inggris dan Australia untuk kembali menurunkan kekuatan membantu Malaysia dan Singapura seperti pada masa Konfrontasi ataupun Perang Dingin. Ini harus menjadi perhatian Malaysia dan Singapura bahwa pengaturan keamanan ini tidak dapat menjadi labuhan utama kerangka kerjasama keamanan berlapis dengan negara besar bagi mereka.

III. 4.3. Persengketaan Wilayah.

Meskipun negara telah mendeklarasikan komitmen untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai, ancaman konflik tradisional tidak lantas lenyap, bahkan kedekatan wilayah perbatasan menjanjikan konflik tersebut berujung pada implikasi yang sangat serius. Salah satu pemicu terjadinya konflik semacam itu adalah sengketa batas teritorial antar negara yang masih berlangsung hingga kini.⁸⁵ Beberapa kasus perselisihan akibat batas wilayah ini muncul di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Hubungan Indonesia dengan Malaysia dapat dikatakan mengalami pasang surut lagi saat kedua negara sama-sama memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di Selat Makasar kemudian dianggap oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari teritori Indonesia maupun Malaysia berdasarkan sejarahnya, sehingga kedua negara sama-sama memasukkan kedua pulau ini ke dalam peta teritorinya. Kedua negara pun akhirnya memutuskan kondisi status quo atas dua pulau ini. Namun kedua negara ternyata memberikan pengertian yang berbeda atas status quo ini. Hal ini ditandai dengan pembangunan kawasan wisata oleh pemerintah Malaysia di kedua pulau sengketa ini dikarenakan Malaysia menganggap kedua pulau ini berada di bawah teritorinya, sedangkan Indonesia menganggap status quo ini sebagai situasi di mana kedua

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ John F. Bradford, "The Growing Prospect for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia" hal. 69.

pulau tidak diperbolehkan untuk diduduki maupun dikembangkan oleh masing-masing negara.

Tahun 2002, International Court of Justice (ICJ) memutuskan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan untuk Malaysia. Persengketaan ini dibawa ke ICJ tahun 1998 oleh Malaysia dan Singapura. Tim ad hoc kemudian mengkaji berbagai hal untuk menentukan kepemilikan gugusan pulau ini. Indonesia berpegangan pada konvensi yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda tahun 1891. Mengingat Malaysia dan Indonesia adalah suksesor dari kedua kolonial tersebut, maka isi konvensi dianggap masih berjalan. Akan tetapi Malaysia akhirnya memenangkan persengketaan ini dengan memenangkan argumentasi efektivitas yang dipilih ICJ setelah menolak interpretasi Indonesia atas konvensi 1891.

Gambar 3.4

Peta Pulau Sipadan dan Ligitan



Hasil voting adalah 16 banding 1 untuk keunggulan Malaysia.⁸⁶ Voting yang dilakukan oleh 17 hakim pada pertengahan bulan Desember 2002. Atas voting ini, Indonesia harus menerima kekalahan saat 15 hakim tetap Mahkamah Internasional bersama 1 hakim pilihan Malaysia memutuskan memberikan hak atas pulau Lipadan dan Ligitan kepada Indonesia, dan hanya 1 hakim pilihan

⁸⁶ J.G. Merils, "Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia vs. Malaysia), Merits. Judgement of 17 December 2002" *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 52, No. 3 (Juli, 2003), hal. 79.

Indonesia yang memihak Indonesia.⁸⁷ Indonesia berusaha menerima kekalahan ini dengan lapang dada, namun nyatanya hal ini merupakan sebuah pukulan atau pun tamparan yang sangat keras bagi Indonesia untuk kehilangan salah satu dari wilayah yang dianggap merupakan teritorinya tersebut. Sengketa ini walaupun tidak berakhir kepada konflik yang berarti, namun termasuk salah satu titik penting dalam perkembangan pasang surut hubungan Indonesia dengan Malaysia

Demikian juga dengan Singapura dan Malaysia yang membawa masalah persengketaan atas Pedra Blanca (atau dikenal juga Pulau Batu Puteh). Lokasi ini merupakan tempat strategis yang dilalui sekitar 50.000 kapal setiap tahunnya. Tempat ini berperan penting untuk bantuan navigasi kapal yang melintas. Menurut sejarahwan Malaysia, kepemilikan pulau ini tidak perlu diperdebatkan lagi, hanya saja Singapura memilih tindakan provokatif.⁸⁸ Sedangkan menurut Singapura, lokasi ini merupakan warisan dari kolonial Inggris. Pulau Batu Puteh pada awalnya berstatus *terra nullius* atau berarti yang kepemilikannya tidak di definisikan, namun berdasarkan pembangunan mercusuar Horsburgh yang dilakukan takhta Inggris, maka seharusnya lokasi ini diturunkan pada pewaris yang sah, yaitu Republik Singapura. Akhirnya setelah ICJ menimbang sejarah dan faktor lainnya, kepemilikan Pulau Batu Puteh diberikan pada Singapura, Middle Rocks diberikan kepada Malaysia, dan South Ledge diberikan kepada negara yang memiliki laut territorial di tempat tersebut.⁸⁹

⁸⁷ "Indonesia Kehilangan Sipadan dan Ligitan", diakses dari <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3362>, pada tanggal 11 Oktober 2009, pukul 13.15.

⁸⁸ *Ibid.* hal. 70.

⁸⁹ Coater G. Lathrop, "Sovereignty over Pedra Blanca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge" *The American Journal of International Law*, Vol. 102, No. 4 (Oktober, 2008), hal. 828.

Gambar 3.5
Peta Pulau Batu Puteh



III. 4.4. Ketegangan yang Melibatkan Unsur Militer.

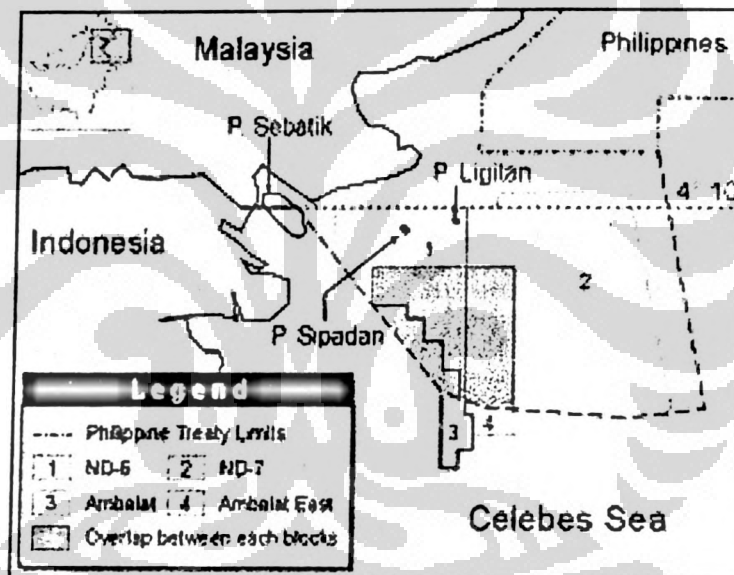
Salah satu peristiwa ketegangan militer yang terjadi di regional ini adalah kasus Ambalat. Blok Ambalat merupakan sebuah blok kepulauan seluas 15.235 km² yang terletak di perbatasan tepi pantai Kalimantan di Laut Sulawesi atau Selat Makasar, dan berada di perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, serta Kalimantan Timur, Indonesia.⁹⁰ Blok ini telah lama diperebutkan oleh Indonesia maupun Malaysia yang saling mengklaim bahwa pada dasarnya Blok Kepulauan Ambalat merupakan/berada di dalam naungan teritori masing-masing negara tersebut. Sengketa antara Indonesia dan Malaysia pertama kali muncul pada tahun 1979 saat Malaysia menerbitkan sebuah peta teritori dengan memasukkan Blok Ambalat di bawah teritori kedaulatan Malaysia itu sendiri. Melihat hal ini, Indonesia sebagai negara yang merasa memiliki hak sepenuhnya atas Blok Ambalat pun kemudian mengangkat sengketa ini, dan menjadi sengketa berkepanjangan hingga sekarang

Awal mula peningkatan skala perselisihan ini terjadi saat Malaysia memberikan lahan eksplorasi dari Petronas Carigali kepada Royal Dutch Shell di Blok ND6 dan ND7. Ternyata wilayah tersebut adalah wilayah yang sama dengan wilayah yang Indonesia berikan kepada ENI dan Unocal. Tindakan Malaysia tersebut pada dasarnya sangatlah bertentangan dengan perjanjian yang

⁹⁰ Imanuddin Razak, "Ambalat Dispute, A Spat Between Neighbors", diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/06/ambalat-dispute-a-spat-between-neighbors.html>, 10 September 2010.

sebelumnya telah dilakukan serta diratifikasi pada tahun yang sama oleh Malaysia dengan Indonesia, di mana dalam Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pulau-pulau terluar atau yang berada di perbatasan masih dalam pembicaraan lebih jauh. Pada saat itu, selain Blok Ambalat, sebenarnya Malaysia juga telah memasukkan beberapa pulau di daerah perbatasan ke dalam teritorinya tanpa bernegosiasi dengan negara-negara tetangganya, sehingga peta teritori yang diterbitkan Malaysia pun mengundang kontroversi serta kecaman dari negara-negara lainnya, meliputi Singapura, Filipina, Cina, Vietnam, Thailand, dan Inggris, yang merepresentasikan Brunei Darussalam.

Gambar 3.6
Peta Wilayah Blok Ambalat



Persengketaan ini membesar karena isu energi fosil yang dapat memberikan keuntungan bagi negara yang memenangnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia menamakan tindakan Malaysia sebagai pelanggaran akan kedaulatan dan memperingatkan Shell untuk tidak memasuki perairan tersebut.⁹¹ Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar bereaksi memprotes hal yang serupa kepada pemerintah Indonesia.⁹² Seiring hubungan diplomatik yang memburuk, kedua negara semakin terdorong menggelar kekuatan di wilayah Ambalat.

Ketegangan bersenjata dimulai tahun 2005 ketika terjadi penangkapan 17 pekerja Indonesia di Karang Unarang oleh Tentara Diraja Malaysia yang

⁹¹ "Indonesia Protest Malaysia's Oil Pact", *Associated Press*, 25 Februari 2005.

⁹² "Areas in Sulawesi Sea within Malaysia's Border", *Malaysia Star*, 2 Maret 2005.

menggunakan KD Sri Melaka. Sejak saat itu terjadi beberapa kali Malaysia mengejar nelayan Indonesia sampai keluar Ambalat. Puncaknya, ketika pemerintah Indonesia mengirim kekuatan ke daerah itu, terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa. Pada tanggal 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap ke depan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan penambahan kekuatan patrol di kawasan Ambalat. Disebutkan bahwa Armada Timur Indonesia secara bertahap diperkuat dengan menambah armada laut hingga delapan kapal. Armada tersebut juga diperkuat empat unit pesawat tempur F-16. Menteri Luar Negeri Albar menyatakan tidak perlu melakukan penggelaran serupa, namun pada kenyataannya Tentara Diraja Malaysia juga memperkuat basis pertahanan di Sabah dan Serawak.

Ketegangan tersebut tidak berakhir sampai disitu, setelah kasus pelanggaran wilayah di perairan blok Ambalat sempat reda, kini sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia kembali melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia kawasan tersebut.⁹³ Kadispen Komando Armada RI Kawasan Timur (Koartim) Letkol Laut (KH) Drs. Toni Syaiful beberapa pelanggaran yang dilakukan pihak Malaysia. Beliau menyatakan 24 Februari 2007 pukul 10.00 WITA, yakni kapal perang Malaysia jenis patroli KD Budiman-3909 melintas dengan kecepatan sepuluh knot memasuki wilayah NKRI sejauh satu mil laut. Pelanggaran kedua terjadi sore harinya pukul 15.00 WITA, kapal perang jenis patroli KD Sri Perlis-47 kembali melintas dengan kecepatan sepuluh knot

⁹³ "Kapal Perang Malaysia Kembali Langgar Wilayah RI di Ambalat", diakses dari <http://www.antaranews.com/view/?i=1172563546&c=NAS&s=>, 27 Februari 2007, 17.19 WIB.

memasuki wilayah NKRI sejauh dua mil laut. Setelah dibayang-bayangi KRI Weling, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah RI. Peristiwa yang ketiga kalinya terjadi 25 Februari 2007 pukul 09.00 WITA KD Sri Perlis-47 memasuki wilayah NKRI sejauh 3.000 yard. KD Sri Perlis-47 akhirnya diusir keluar wilayah RI oleh KRI Untung Suropati-872. Pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah NKRI sejauh 3.000 yard. Empat kapal perang TNI AL, masing-masing KRI Ki Hadjar Dewantara, KRI Keris, KRI Untung Suropati dan KRI Weling yang tergabung dalam operasi "Balat Sakti", melaksanakan patroli pengamanan perbatasan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, hubungan Malaysia dan Singapura juga memendam potensi konflik. Selepas kemerdekaan Singapura dari Malaysia, hubungan kedua negara yang berbagi keunikan geografi, sejarah, ideology, budaya, dan etnisitas selalu diwarnai ketegangan. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long mengatakan *"its relationship with Malaysia was one of its most important and complex foreign relations."*⁹⁴ Pernyataan tersebut secara tidak langsung dibalas oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahatir, *"it's impossible to be friendly with Singapore because of the neighboring city states unfriendliness toward Malaysia. Singapore gets into that kind of mood that they reject anything that comes from Malaysia. We try to be as friendly as possible but it is impossible."*⁹⁵

Salah seorang mantan letnan jenderal Malaysia, Zaini Mohamad Said mengatakan keterkaitan masyarakat dari kedua negara anggota ASEAN ini tidak cukup untuk mencegah konflik. Menurutnya konflik dapat saja bermula dari permasalahan seperti air bersih. Zaini mengatakan bahwa, *"its (Singapore) structure and (war) doctrine is offensive in nature."* Beberapa skenario konflik masa depan di antara Malaysia dan Singapura muncul. Salah satunya memprediksi akan ada keterlibatan lebih besar dari Amerika Serikat yang mendukung Singapura. Atau juga Singapura akan mengembangkan teknologi nuklir sebagai upaya menghasilkan desalinasi mandiri. Sementara diketahui

⁹⁴ *New Strait Times*, 5 Mei 2003, hal. 22.

⁹⁵ *Asian Economic News*, 14 Oktober 2002, hal. 19.

bahwa kepemilikan teknologi nuklir untuk energi seringkali dikaburkan dengan tujuan penggunaan teknologi nuklir untuk senjata pemusnah masal.⁹⁶

III.5. Paradoks dalam Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Indonesia, Malaysia, dan Singapura terhubung satu sama lain secara kompleks dan dalam situasi yang paradoks. Menjadi negara dalam satu regional dan berbagi batas wilayah darat dan laut menjadi sesuatu yang menjanjikan sekaligus mengancam. Di satu sisi, kerjasama bilateral maupun multilateral dapat dijalankan dengan efektif berkat kedekatan jarak. Pengawasan dan saling berbagi peran dapat dikerjakan dalam kerangka yang solid. Pertukaran informasi dapat dipandang sangat relevan karena kesamaan ancaman yang dihadapi. Hal ini mendukung terciptanya saling ketergantungan dan hanya kerjasama yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Namun di sisi lain; kedekatan, kerjasama, dan saling ketergantungan tidak menihilkan kebutuhan dasar setiap negara yaitu keamanan. Nyatanya ketiga negara ini tidak serta merta menyerahkan penyelesaian masalah keamanan kepada mekanisme kerjasama internal. Perkembangan yang terjadi justru menunjukkan masing-masing negara mencari mekanisme alternative yang dapat memberikan jaminan keamanan sampingan. Hal ini disebabkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak berkawan seperti layaknya pertemanan yang wajar. Mereka bekerjasama tetapi tidak mempercayai satu sama lain. Maka wajar jika masing-masing dari negara ini mencari perlindungan eksternal dari negara besar, seperti yang diindikasikan dari pembentukan Lombok Treaty dan FPDA.

Hal yang terburuk belum terjadi. Sejauh ini hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura juga diwarnai dengan persengketaan wilayah dan ketegangan yang melibatkan unsur militer. Kedekatan wilayah, di satu sisi memberikan keuntungan, namun di sisi lain memberikan peringatan akan perselisihan yang paling tradisional, yakni persengketaan wilayah sebagai bentuk sensitivitas akan kedaulatan teritori. Kasus Sipadan dan Ligitan serta batu Puteh menunjukkan adanya sensitivitas ketiga negara dalam hal pelanggaran batas wilayah. Bahkan

⁹⁶ "Malaysia and Singapore: A Conflict of Insecurities", diakses dari http://www.yawningbread.org/arch_2002/yax-268.htm, 12 Maret 2010, 18.35 WIB.

kasus Ambalat dan sumber daya air bersih memberikan insentif untuk munculnya perang yang sesungguhnya.

Sesungguhnya rangkaian peristiwa ini menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi ada cita-cita untuk mewujudkan kerjasama regional yang efektif, namun ketidakamanan mendorong negara menggeser metode pencapaian kepentingannya hingga menggunakan kekuatan militer. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sadar akan visi pembentukan komunitas ASEAN, namun mereka juga melakukan kerjasama keamanan berlapis dan peningkatan kapabilitas. Mereka menunjukkan intensi untuk bekerjasama dan berperang dalam saat yang sama. Bagian peningkatan kapabilitas akan dibahas pada bab berikutnya.



Bab IV

Faktor-Faktor Pembentuk *Offense Defense Balance*

Tujuan penulisan bab ini adalah untuk memaparkan variabel independen dari *Offense Defense Theory* serta menganalisa indikator yang digunakan sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Variabel independen yang dibahas pada penelitian ini diukur melalui data kapabilitas negara dalam konteks kepemilikan teknologi militer, jumlah kekuatan yang tersedia saat ini, kondisi geografis teritori ketiga negara, dan bentuk doktrin militer negara untuk melihat model penggelaran pasukan. Pembahasan dilanjutkan dengan analisa masing-masing indikator sehingga terlihat indikator mana yang mempengaruhi paling besar. Kemudian, penulis akan memberikan analisa pribadi sebagai uraian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada bagian akhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari bab ini.

IV.1. Kapabilitas dan Teknologi Militer.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah tiga negara di Asia Tenggara yang memiliki kapabilitas militer cukup baik. Meskipun demikian, dalam beberapa aspek terlihat adanya disparitas kapabilitas. Secara postur pertahanan, Indonesia memiliki penekanan pada kapabilitas pertahanan darat, sedangkan Singapura memiliki penekanan pada pertahanan udara. Namun dengan melihat berdasarkan angka statistik belum memberikan interpretasi kekuatan sebuah negara bersifat ofensif atau defensif. Dengan demikian pada variabel teknologi penulis akan memberikan analisa melalui metode indeks. Metode ini memberikan indeks terhadap masing-masing persenjataan. Hal ini penting untuk dilakukan karena kualitas persenjataan akan membedakan tingkat ofensivitas sebuah negara. Tentunya sebuah jet tempur supersonik tidak memiliki kualitas serang yang sama dengan pesawat patroli maritim. Oleh karena itu indeks memberikan nilai tersendiri sehingga penelitian juga dapat menghitung kualitas persenjataan, bukan hanya kuantitas.

Penghitungan berdasarkan metode indeks menghitung keseluruhan kapabilitas militer yang dikalikan kuantitas jumlahnya. Pertama-tama, peneliti

Tabel 4.3
Penghitungan Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Darat

Army Equipment		Indeks	Indeksed		
			Indonesia	Malaysia	Singapura
Tank	main				
	battle	0,098113	0,000	0,019	0,079
	light	0,056604	0,027	0,002	0,027
Artillery	multiple rocket launcher	0,181132	0,000	0,181	0,000
	self-propelled	0,116981	0,000	0,000	0,117
	towed	0,116981	0,037	0,045	0,034
	mortar	0,090566	0,060	0,018	0,013
Anti Tank	missile	0,124528	0,000	0,000	0,125
	ramped craft logistic	0,056604	0,008	0,033	0,016
	rocket launcher	0,045283	0,000	0,045	0,000
	man portable	0,037736	0,000	0,038	0,000
	self propelled	0,075472	0,000	0,075	0,000
Total		1,000	0,132	0,456	0,412

Tingkat Ofensivitas yang dihasilkan oleh penghitungan di atas cukup mengejutkan. Pasalnya, Indonesia yang memiliki konsentrasi terbesar pada pertahanan darat hanya mencatatkan nilai 0.132 jauh dari Malaysia dan Singapura.

Akan tetapi pengukuran ini hanya melihat aspek kualitas persenjataan perang dan teknologinya, aspek sumberdaya manusia tidak diikutsertakan dalam penghitungan ini. Maka dengan melihat perbandingan ini, posisi Indonesia sangat kritis (*vulnerable*) terhadap kemungkinan penyerangan negara lainnya. Namun hasil penghitungan ini belumlah angka final karena harus melihat juga pada matra pertahanan lainnya.

IV.1.2. Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Laut (Navy).

Pertahanan laut adalah sebuah matra pertahanan yang unik karena memiliki potensi untuk menggelar pergerakan tri-matra. Namun dalam penghitungan penelitian ini hanya dihitung persenjataan yang khas di miliki oleh pertahanan laut yaitu kapal perang. Kehadiran kapal perang menambah posisi tawar negara mengingat kapal perang adalah senjata ofensif yang bernilai tinggi. Akan tetapi kapal perang sendiri terbagi pada beberapa jenis dengan kuantitas yang berbeda. Untuk memberikan indeks ofensivitas pada kapal perang dapat dilakukan dengan maninjau tonase kapal. Hal ini didasari pemikiran bahwa perbandingan berdasarkan bobot kapal dapat menggambarkan bagaimana perbedaan kualitas dan tingkatan kapal. Bobot kapal dapat menunjukan sampai tahap tertentu kompleksitas sistem persenjataan, sensor, dan mesin kapal itu sendiri.⁹⁷ Dengan metode ini diharapkan pengukuran yang dihasilkan tidak hanya terjebak dalam hitungan kuantitas belaka, namun sudah memasukan unsur kualitas, meskipun tidak sempurna. Kapal perang yang termasuk dalam *combat system* dapat diurutkan sebagai berikut.⁹⁸

(1) Klasifikasi Kapal Perang (*Warship*)

- (a) Tipe Kapal Induk (*aircraft carrier*)
- (b) Tipe Kapal Tempur Permukaan (*Surface Combatant*)
- (c) Tipe Kapal Selam
- (d) Kapal Peperangan Amfibi (*Amphibious Warfare Type Ships*)

(2) Klasifikasi Lainnya

⁹⁷ Lihat David Miller dan Chris Miller, *Modern Naval Combat*, (London: Salamander Books Limited, 1986), hal. 26.

⁹⁸ Secretary of U.S. Navy, "SECNAV Instruction 5030.8," diunduh dari http://www.fas.org/irp/doddir/secnavinst/5030_8.pdf, pada 6 Desember 16.23 WIB.

- (a) Kapal Logistik Tempur
- (b) Kapal Ranjau (*Mine Warfare Ship*)
- (c) Armada Dukung (*Surveillance, Salvage, Fleet Ocean Tugs*)

Kapal selam (*submarine*) adalah wahana perang bawah air yang dapat melakukan operasi mandiri. Penggunaan kapal selam sangat signifikan dalam Perang Dunia I hingga saat ini. Kemampuan kapal selam ditunjukkan dari penyerangan kapal permukaan, perlindungan kapal induk, operasi blokade, operasi peluncuran rudal nuklir, pengintaian, penyerangan darat, dan penghantaran pasukan terselubung. Keseluruhan kemampuan kapal selam bergantung pada satu karakteristik khas kapal selam yaitu tidak terdeteksi dari permukaan, dan beberapa kapal selam modern yang sudah menggunakan reaktor nuklir sulit dideteksi radar dan sonar di bawah air. Kemampuan tersebut memposisikan kapal selam sebagai senjata penyerang karena fungsi penyamaran hanya berguna untuk penyerangan. Meskipun ukuran tonase kapal selam juga berbeda di setiap kelas namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua: *strategic submarine* dan *tactical submarine*.

Frigat adalah kapal perang, dalam definisi beberapa abad, pengertian ini selalu digunakan. Diawali dengan kebutuhan akan kapal perang yang cepat dan ringan, frigate diciptakan untuk memenuhi spesifikasi tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, persenjataan frigate memang mengalami peningkatan namun segi kecepatan dan fleksibilitas manuver tetap menjadi ciri khas kapal ini. Baru pada awal abad 19, frigate dibangun dengan material baja yang pada saat itu menjadi kapal terkuat di lautan. Di zaman modern, frigate digunakan sebagai kapal pendamping untuk melindungi kapal utama. Beberapa operasi yang menjadi tugas frigate adalah pelindung kapal dagang, pelindung kapal perang anti-kapal selam, dan ekspedisi amfibi. Di segi persenjataan, beberapa frigate modern sudah memiliki kemampuan untuk menembakan *guided missile* yang terintegrasi dengan AEGIS. Sedangkan perkembangan lebih lanjut sedang mendorong frigate untuk memiliki kemampuan *stealth* untuk mendukung misi littoral.

Korvet adalah kapal perang dengan tonase 500 - 2000 ton. Sebagai kapal perang ringan, korvet memang diciptakan untuk manuverabilitas tinggi di daerah pantai. Dengan penemuan mesin uap, persenjataan korvet dapat ditambah tanpa

kehilangan kecepatannya. Meskipun demikian, pada awal Perang Dunia II, korvet diposisikan sebagai pengawal dan kapal patroli. Ditujukan untuk pengamanan anti kapal selam, korvet tidak menunjukkan kemampuan terbaiknya pada tugas ini sehingga pada korvet modern, tugas utama mereka adalah operasi pertahanan permukaan dan udara. Korvet milik Swedia, Skjold, menjadi korvet pertama yang mengadopsi kemampuan *stealth*. Selain itu, Amerika Serikat juga mengembangkan korvet dengan geladak yang lebih luas sehingga dapat memuat perlengkapan untuk operasi litoral. Korvet tersebut dikenal dengan kelas Olliver Hazard Perry. Sedangkan Yunani mengembangkan korvet dengan kemampuan rudal sehingga disebut *fast attack missile craft*.

Beberapa kapal perang lain juga dianggap sebagai kapal perang namun tidak mengisi posisi ofensif. *Landing Craft* adalah jenis kapal untuk menghantarkan pasukan atau persenjataan bergerak darat. Kapal ini berguna untuk marinir atau operasi penyerangan pantai lainnya. Ada pula kapal anti-ranjau yang berguna sebagai kapal pendukung keselamatan kapal perang lainnya. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, namun kapal ini berguna untuk meminimalisir kerugian akibat ledakan ranjau laut. Sedangkan kapal patroli tidak digolongkan sebagai kapal perang meskipun memiliki persenjataan penyerang karena radius operasinya yang kecil. Kapal patroli hanya digunakan di daerah pantai dan tidak dapat melangkah lebih jauh ke laut lepas. Dengan demikian kapal patroli cenderung dimanfaatkan untuk kebutuhan pertahanan yang sangat mendasar.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kapal-kapal tersebut. Tetapi perlu diperhatikan juga perbedaan kepemilikan dan teknologinya. Dibawah ini terdaftar perlengkapan angkatan bersenjata untuk pertahanan laut (Navy).

Tabel 4.4
Data Kapabilitas Laut (Navy)

Navy Equipment		Indonesia	Malaysia	Singapura	Total
Submarine, Tactical	diesel with				
	asw capacity	2	2	4	8
Frigates	frigat	0	0	0	0
	frigat with guided missile	7	2	6	15
Corvettes	corvette	23	2	0	25
	corvette with guided missile	0	8	6	14
Landing Craft		54	115	34	203
Mine Warfare, Counter		11	4	4	19
Patrol and Coastal Combatants		41	8	23	72

Sumber: Asian Military Balance 2010

Penghitungan dalam penelitian ini tidak sekedar menunjukkan perbedaan kuantitas persenjataan, namun menghitung pula kualitas masing-masing persenjataan. Dengan demikian perlu pemberian indeks kepada masing-masing senjata sehingga terlihat kualitas masing-masing persenjataan terkait ofensivitasnya. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa tonase kapal perang dapat mengindikasikan kualitasnya secara umum, maka indeks yang dibuat dalam mengukur kapabilitas laut dihasilkan dari penghitungan tonase kapal. Indeks tersebut dihasilkan dari rumus:

$$It_{(i-n)} = \sum \frac{T_n}{TT_n(i-n)}$$

[Rumus 3]

dengan,

$It_{(i-n)}$ = Indeks Tonase Kapal

T_n = Tonase Kapal

$TT_n(i-n)$ = Total Tonase Kapal

Hasil penghitungan indeks tonase kapal pada masing-masing jenis kapal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tonase kapal diperoleh dari berbagai sumber dengan mengambil rata-rata tonase kapal pada jenis tersebut. Hal tersebut dikarenakan definisi yang longgar pada pengklasifikasian jenis kapal, terlebih dengan jenis korvet dan frigat yang cenderung tidak berbeda jauh.

Tabel 4.5

Penghitungan Indeks Jenis Persenjataan Laut

Navy Equipment		Tonase (ton)	It
Submarine, Tactical	diesel with asw capacity	7700	0,458
Frigates	frigat	2500	0,149
	with guided missile	2500	0,149
Corvettes	corvette	1500	0,089
	with guided missile	1500	0,089
Landing Craft		100	0,006
Mine Warfare, Counter		803	0,048
Patrol and Coastal Combatants		210	0,012
Total		16813	1,000

Berdasarkan data kuantitas kapal perang dan hasil penghitungan indeks tonase kapal, maka dengan kembali menggunakan Rumus 1 dapat diperoleh Tingkat Ofensivitas dari masing-masing negara. Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Penghitungan Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Laut

Navy Equipment		Indeks	Indeksed		
			Indonesia	Malaysia	Singapura
Submarine	diesel with asw capacity	0,458	0,114	0,114	0,229
Frigates	normal	0,149	0,000	0,000	0,000
	with guided missile	0,149	0,069	0,020	0,059
Corvettes	normal	0,089	0,082	0,007	0,000
	with guided missile	0,089	0,000	0,051	0,038
Landing Craft		0,006	0,002	0,003	0,001
Mine Warfare, Counter		0,048	0,028	0,010	0,010
Patrol and Coastal Combatants		0,012	0,007	0,001	0,004
Total		1,000	0,302	0,207	0,342

Hasil penghitungan tingkat ofensivitas keabilitas laut menunjukkan hasil yang cukup seimbang. Kepemilikan korvet Indonesia cukup dapat mengimbangi ofensivitas Singapura yang disumbang kapal selamnya. Sementara Malaysia mendapat nilai tambahan dari kepemilikan *landing craft* yang menjadi komponen pendukung peperangan laut. Dengan hasil yang demikian mengindikasikan masing-masing negara berbagi kapabilitas laut sehingga muncul insentif untuk tidak melakukan penyerangan. Hal ini semakin memperkuat hipotesis yang

menyatakan adanya dominasi defensif di dalam faktor teknologi. Akan tetapi hasil tingkat ofensivitas pada kapabilitas laut belum menggambarkan kekuatan seutuhnya dari masing-masing negara. Oleh karena itu, penelitian masih harus juga menghitung kapabilitas udara..

IV.1.3. Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Udara (Air Force).

Kapabilitas udara mendapatkan tempat yang unik dalam sistem pertahanan negara. Aplikasi teknologi modern pada kapabilitas ini menghasilkan persaingan yang dinamis baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dengan situasi demikian, tidak heran bahwa sistem persenjataan udara selalu mendapatkan peningkatan yang signifikan dan lebih cepat berevolusi dibandingkan matra yang lain. Pesawat terbang sebagai model persenjataan dominan dalam kapabilitas ini juga mengalami evolusi yang signifikan. Mulai digunakan pada Perang Dunia I sebagai pengintai, kemudian dipakai sebagai senjata penyerang pada Perang Dunia II, hingga pada masa Perang Dingin dan hingga sekarang, pesawat terbang dapat melakukan segala operasi, mulai dari transport, pengintaian, hingga penyerangan. Hal ini juga terkait dengan keistimewaan pesawat terbang (*jet tempur*) yang memiliki manuverabilitas tinggi dan mampu meng-*cover* berbagai kontur bumi baik di darat dan laut. Tidak heran jika pesawat terbang memberikan pengaruh signifikan pada tingkat ofensivitas negara.

Kategori pesawat *jet tempur* serangan darat (*fighter ground attack*) mencakup jenis pesawat *ground support*, *air dominance*, dan *multi-role*. Definisi ini didasarkan pada kapabilitas pesawat jenis ini yang memiliki daya serang tinggi, sekaligus *combat radius* yang besar. Beberapa pesawat yang terhitung kategori ini adalah F-15 Strike Eagle, Su-30 MKM, dan F/A – 18 Hornet. Kemampuan *jet tempur* di atas adalah dalam kelas *fighter* sehingga memiliki kecepatan dan kelincahan namun memiliki kapasitas untuk membawa persenjataan berat untuk serangan darat. Ketiga pesawat di atas juga dapat digolongkan ke dalam *jet tempur* generasi 4,5 yang memiliki kelebihan pada sistem avionik dan peperangan elektronik. Di samping itu ada pula F-16 Fighting Falcon, Su-27 Flanker, dan MiG-29 Fulcrum yang merupakan *multi-role fighter* yang memiliki kapasitas pertahanan dan serangan udara serta darat. Namun ketiga *jet* ini belum dapat

menyamai performa ketiga jet sebelumnya karena masih digolongkan jet tempur generasi 4. Pesawat F-5 Tiger II menjadi sebuah petarung murni yang mengandalkan manuverabilitas dan kecepatan, namun minus *payload* yang besar. Akhirnya dinamika kawasan tidak dapat dipisahkan dari kehadiran penempur-penempur ini.

Di sisi lain, urusan kekuatan udara tidak serta merta milik jet tempur saja, helikopter adalah alternatif yang baik dalam hal pertahanan udara. Helikopter yang secara umum diterima adalah sebuah wahana udara yang mendapatkan gaya angkat dari bilah rotor dan diseimbangkan pada rotor di ekor. Helikopter sendiri memiliki banyak variasi dari yang terkecil helikopter listrik hingga Sikorsky S-64 Skycrane yang mampu mengangkat rumah. Fungsi dari helikopter juga beragam dari evakuasi korban bencana alam hingga penyerangan (misalnya; Westland WAH-64 Apache). Kelebihan helikopter adalah mampu lepas landas dan mendarat vertikal dan manuverabilitas yang tinggi.

Tabel 4.7
Data Kapabilitas Angkatan Udara (Air Force)

Air Force Equipment	Indonesia	Malaysia	Singapura	Total
fighter ground attack	29	28	99	156
fighter	25	29	0	54
helikopter	38	37	64	139
training	101	32	41	174
transport	61	2	9	72

Sumber: Asian Military Balance 2010

Pengukuran kualitas kapabilitas udara dilakukan dengan melihat *combat radius* dari sebuah wahana. *Combat radius* jarak efektif sebuah wahana untuk melakukan operasi yang ditugaskan. *Combat radius* berbeda dari jarak jelajah karena pada jarak jelajah diukur dengan sebuah garis lurus, sedangkan *combat radius* diukur dengan membuat sebuah radius dimana wahana tersebut efektif beroperasi. Dengan demikian dapat terlihat perbedaan kualitas antara jet tempur

dengan helikopter ataupun pesawat latih. Meskipun ketiganya memiliki kemampuan untuk menyerang, tetapi dengan *combat radius* tertentu maka ada kapasitas serang yang berbeda pada tiap wahana. Semakin besar *combat radius* sebuah wahana menunjukkan wahana tersebut semakin canggih dan maju sehingga memiliki indeks yang lebih besar. Pengukuran tersebut dilakukan dengan rumus berikut.

$$I_{C(i-n)} = \sum \frac{Cr}{TCr(i-n)}$$

[Rumus 4]

dengan,

$I_{C(i-n)}$ = Indeks *Combat Radius*

Cr = *Combat Radius*

$TCr(i-n)$ = Total *Combat Radius*

Wahana udara dengan *combat radius* yang lebih besar akan memiliki indeks yang lebih besar pula. Hal ini sedikit banyak dapat menunjukkan kualitas wahana tersebut ketika terlibat peperangan. Hasil penghitungan Rumus 4 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.8
Penghitungan Indeks Persenjataan Angkatan Udara

Air Force Equipment	Combat Radius	Ic
fighter ground attack	1850	0,518
fighter	700	0,196
helikopter	150	0,042
training	370	0,104
transport	500	0,140
Total	3570	1,000

Berdasarkan data kuantitas wahana udara dan hasil penghitungan indeks *combat radius*, maka dengan kembali menggunakan Rumus 1 dapat diperoleh

Tingkat Ofensivitas dari masing-masing negara. Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.9
Penghitungan Tingkat Ofensivitas Kapabilitas Udara

Air Force Equipment	Indeks	Indeksed		
		Indonesia	Malaysia	Singapura
fighter ground attack	0,518	0,096	0,093	0,329
fighter	0,196	0,091	0,105	0,000
helikopter	0,042	0,011	0,011	0,019
training	0,104	0,060	0,019	0,024
transport	0,140	0,119	0,004	0,018
Total	1,000	0,377	0,232	0,390

Berdasarkan penghitungan di atas, nampak bahwa dalam sisi kapabilitas udara ketiga negara berbagi kekuatan. Hal itu ditunjukkan oleh nilai Tingkat Ofensivitas yang cenderung setara. Singapura memimpin dengan 0.390 tetapi tidak jauh berada di depan Indonesia dan Malaysia. Singapura unggul dalam segi persenjataan ini karena memiliki banyak pesawat jet yang memiliki peran sebagai jet penyerang darat dan *multi-role*. Kemampuan tersebut dicatat sebagai pemilik nilai tertinggi dalam indeks *combat radius* sehingga mampu melambungkan Tingkat Ofensivitas Singapura secara signifikan. Sebaliknya, Malaysia yang juga memiliki pesawat jenis tersebut masih kekurangan di sisi persenjataan pendukung peperangan seperti training dan transport. Hal ini sedikit banyak mengurangi Tingkat Ofensivitas Malaysia dibanding, misalnya, Indonesia yang memiliki cukup banyak pesawat jenis tersebut.

Selain itu, kapabilitas udara yang baik menunjukkan kompetensi negara tersebut dalam bidang elektronika dan informatika. Hal itu terkait operasionalisasi wahana udara cenderung lebih kompleks dibanding wahana darat maupun laut. Kompleksitas tersebut dihasilkan dari penerapan sistem teknologi informasi pada

setiap wahana. Dengan demikian, negara yang memiliki kapabilitas udara yang baik menunjukkan kemampuan pada bidang ilmu tersebut. Secara tidak langsung, hasil penghitungan ini juga menunjukkan Singapura sebagai negara yang paling kompeten dalam teknologi informasi. Sesuai dengan hasil penghitungan, Indonesia dan Malaysia masih berada dibawahnya.

IV.1.4. Analisa Offense-Defense Balance pada Kapabilitas dan Teknologi Militer.

Analisa untuk mengetahui *offense defense balance* dilakukan dengan pengukuran rasio *defender : attacker*. Dengan model seperti itu, maka dapat terlihat pada suatu kondisi, apakah ofensif ataupun defensif yang mendominasi. Salah satu persyaratan penggunaan rasio ini adalah karakternya yang *dyadic*. Artinya, penggunaan rasio hanya dapat dilakukan untuk kasus 2 negara karena negara pertama berlaku sebagai penyerang, sedangkan negara kedua berlaku sebagai bertahan. Dengan demikian, untuk pengukuran yang lebih detail, peneliti akan membagi beberapa skenario sehingga dapat diketahui rasio perang di antara ketiga negara yang diteliti. Di bawah ini tersaji rangkuman nilai Tingkat Ofensivitas berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 4.10

Pengukuran Rata-Rata Tingkat Ofensivitas

	Indonesia	Malaysia	Singapura
Army	0.132	0.456	0.412
Navy	0.302	0.207	0.342
Air Force	0.377	0.232	0.390

Total	0.812	0.896	1.143
Mean (rata-rata)	0.271	0.299	0.381

Masing-masing negara memiliki tiga matra pertahanan sehingga untuk mendapatkan nilai keseluruhan dari ketiga matra tersebut dapat dilakukan dengan mengukur nilai rata-rata. Ketiga nilai kapabilitas dalam sebuah negara dijumlahkan kemudian dibagi tiga (3) sesuai jumlah matra yang dimiliki. Demikian juga berlaku untuk negara lainnya. Total dari nilai rata-rata Tingkat

Ofensivitas (TO) ketiga negara harusnya mencapai angka 1 atau mendekatinya. Maka nilai yang dimiliki suatu negara menjadi bagian dari pembagian kapabilitas dalam sistem tersebut.

Dengan menggunakan prinsip *defender : attacker* (X:Y), maka dapat dihasilkan rasio perang yang dimaksudkan oleh Glaser dan Kaufmann. Sebagai contoh, untuk mendapatkan rasio perang dari kasus Indonesia sebagai penyerang dan Malaysia sebagai bertahan, maka penghitungan adalah 0.299 : 0.271. Demikian juga berlaku untuk skenario lainnya. Berikut ini adalah hasil penghitungan rasio perang dalam beberapa skenario.

Tabel 4.11
Pengukuran Rasio Perang

	Penyerang	Bertahan	Rasio
Skenario 1	Indonesia	Malaysia	1.104
	Indonesia	Singapura	1.409
Skenario 2	Malaysia	Indonesia	0.906
	Malaysia	Singapura	1.276
Skenario 3	Singapura	Indonesia	0.710
	Singapura	Malaysia	0.784

Data di atas dapat diubah ke dalam bentuk matrik untuk mempermudah melihat skenario peperangan dan rasio perangnya. Berikut ini tersaji matriks rasio perang berdasarkan hasil penghitungan di atas.

Bagan 4.1

Matriks Rasio Perang

Matriks Rasio Perang		Penyerang		
		Indonesia	Malaysia	Singapura
Bertahan	Indonesia		0.906	0.71
	Malaysia	1.104		0.784
	Singapura	1.409	1.276	

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan penghitungan Tingkat Ofensivitas dari kapabilitas dan teknologi militer ini. Pertama, semakin kecil rasio perang, maka dominasi ofensif akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar rasio perang (mendekati 1.00 atau melebihi 1.00) menunjukkan dominasi defensif semakin diuntungkan. Melihat data yang tersaji, di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura nampaknya sebagian besar mengarah kepada dominasi defensif. Dari empat skenario menunjukkan angka mendekati 1.00 atau melebihi 1.00 sehingga dapat dikatakan mutlak defensif. Sedangkan skenario Singapura sebagai penyerang memiliki rasio di level 0.7, hal ini juga belum menunjukkan bahwa Singapura mengalami dominasi ofensif. Hanya saja di antara negara lainnya, Singapura memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan penyerangan. Akan tetapi untuk terjadinya penyerangan secara nyata, nilai di level 0.7 belum mencukupi beberapa teori perang untuk kemenangan pertempuran yang desisif (*decisive battle*).⁹⁹ Dengan demikian masih dapat disimpulkan bahwa di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura terbentuk *defense dominance* berdasarkan aspek teknologi dan kapabilitas perang.

Kedua, kepemilikan teknologi persenjataan yang baik akan memberikan nilai TO yang lebih tinggi. Terkait dengan rasio perang, kepemilikan teknologi persenjataan yang baik memberikan keuntungan ofensif pada negara yang bersangkutan. Hal ini ditunjukkan dengan skenario Singapura sebagai penyerang dan Indonesia sebagai bertahan. Dengan rasio perang yang mencapai 0.71, terlihat bahwa kepemilikan teknologi Singapura meningkatkan peluang kemenangan atas Indonesia. Meskipun memang secara teoretis hal ini masih belum memberikan kemenangan desisif, tetapi memperbesar peluang untuk meraih kemenangan seandainya terjadi peperangan. Akan tetapi dari kesimpulan inipun masih dapat ditarik pemahaman bahwa tingkat teknologi dan kapabilitas perang di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura masih tidak berbeda terlalu jauh sehingga tetap menguntungkan *defense dominance*.

⁹⁹ Salah satu teori perang mengatakan bahwa kemenangan pertempuran yang desisif akan diperoleh dengan rasio *attacker : defender* = 3:1 atau rasio perang mencapai 0.333. Dengan kekuatan penyerang yang jauh lebih besar akan memperbesar peluang kemenangan desisif. Nilai 0,333 adalah standar minimal untuk kemenangan desisif. Teori mengenai hal ini terdapat pada pemikiran Montecuccoli seperti *Sulle Battaglie* dan *Tratto Della Guerra* (1940-1942), *Dell'arte Militare* (1949-1954), dan *Della Guerra Col Turco in Ungheria 1670*.

Ketiga, kepemilikan senjata ofensif tidak menunjukkan dominasi ofensif di dalam negara tersebut. Berdasarkan penghitungan penelitian ini, dapat terlihat bahwa dominasi ofensif atau defensif dibentuk dari akumulasi kepemilikan persenjataan. Persenjataan ofensif akan memberikan indeks yang tinggi sehingga menaikkan pula Tingkat Ofensivitas negara tersebut. Kepemilikan persenjataan ofensif yang serupa di negara lain juga akan mempengaruhi Tingkat Ofensivitas. Keadaan sama-sama memiliki persenjataan tersebut menjadikan negara berbagi kekuatan. Dalam situasi seperti ini justru dominasi defensif lebih diuntungkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan senjata ofensif oleh ketiga negara tidak serta merta menjadikan dominasi ofensif. Sebaliknya berdasarkan penelitian ini, ditunjukkan bahwa persenjataan ofensif dapat memunculkan dominasi defensif dalam situasi tertentu.

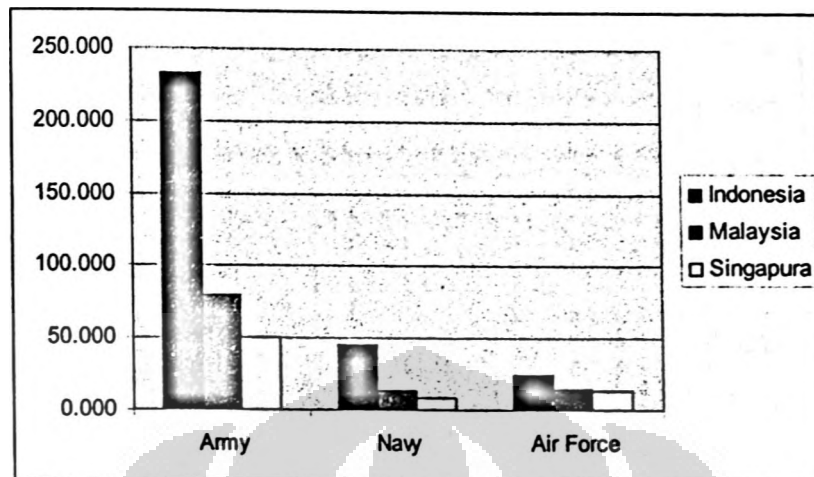
IV.2. Besar Kekuatan dan Konsentrasi Kapabilitas Militer.

IV.2.1. Pemaparan Data Besar Kekuatan dan Konsentrasi Kapabilitas Militer.

Pada bagian ini akan dipaparkan besar kekuatan dari masing-masing negara yang disajikan bentuk bagan. Dengan bentuk seperti ini, akan mudah melihat perbandingan besar kekuatan masing-masing negara. Selain itu, pada bagian ini akan dipaparkan juga beberapa bagan model persenjataan yang penting dalam pembahasan *Offense Defense Theory*. Beberapa persenjataan dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai bersifat ofensif ataupun defensif. Dengan mengetahui konsentrasi serta perbandingan kepemilikan senjata tersebut di masing-masing negara, diharapkan dapat melihat suatu tren kepemilikan persenjataan yang terjadi di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Pertama-tama, besar kekuatan akan dilihat berdasarkan jumlah personel aktif (di luar cadangan) yang dimiliki masing-masing negara. Hal ini terkait dengan kemampuan pasukan berjalan (*infantry*) sebagai *King of Battle* yang menentukan penguasaan suatu daerah. Dengan jumlah infantri yang besar, maka kemampuan negara melakukan pendudukan juga lebih besar.

Bagan 4.2
Besar Kekuatan Personel

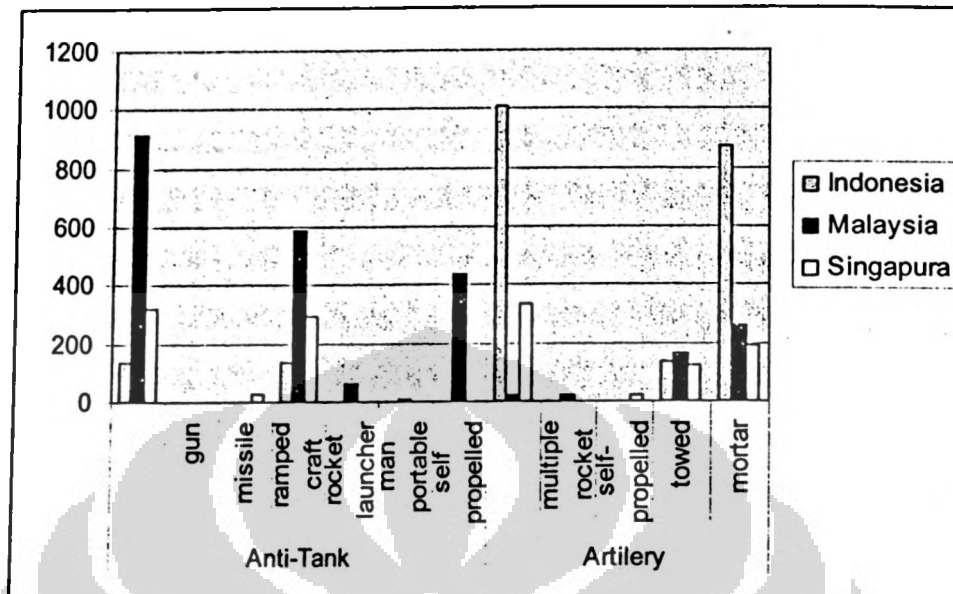


Sumber: Asian Military Balance 2010

Pada bagan di atas dapat terlihat Indonesia memiliki jumlah personel yang paling banyak. Meskipun kecenderungan militer Indonesia berpusat pada angkatan darat, tetapi pada angkatan laut dan udara, jumlah personel Indonesia juga masih mendominasi. Peringkat kedua disusul oleh Malaysia dan peringkat ketiga diisi oleh Singapura. Hal ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang wajar mengingat Indonesia memiliki jumlah populasi yang besar. Selain itu, Indonesia memiliki luas wilayah yang paling besar sehingga membutuhkan jumlah personel yang besar pula. Singapura menjadi negara yang paling sedikit memiliki jumlah personel, namun jika diperhatikan lebih jauh, Singapura hampir menyamai Malaysia pada jumlah personel angkatan udara dan bahkan tidak jauh terpaut dari jumlah personel Indonesia. Di lain pihak, jumlah angkatan laut Singapura (dan juga Malaysia) adalah yang paling sedikit dibanding angkatan bersenjata mereka lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya tren meningkatkan konsentrasi personel pada angkatan udara, meskipun tidak dapat melampaui jumlah personel angkatan darat. Dengan konsentrasi pada angkatan udara, tentunya memberikan perbedaan pada sisi doktrin, penggelaran senjata, dan model operasi di lapangan.

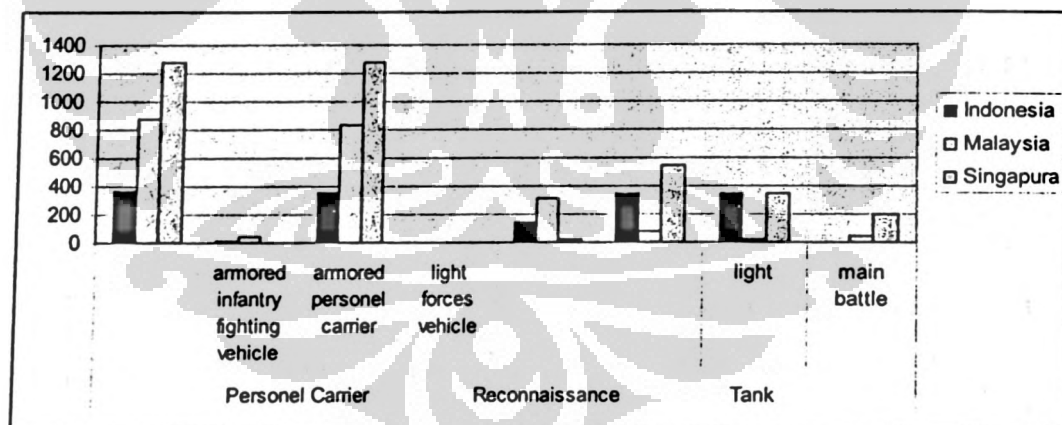
Kemudian pembahasan berikut akan melihat konsentrasi kepemilikan teknologi persenjataan darat. Bagan batang yang paling kiri pada setiap seksi menunjukkan jumlah total kepemilikan senjata tersebut. Sedangkan uraiannya dapat dilihat pada bagian kanan yang memiliki label di bawah sumbu x.

Bagan 4.3
Kapabilitas Pertahanan Darat



Sumber: Asian Military Balance 2010

Bagan 4.4
Kapabilitas Transport Darat



Sumber: Asian Military Balance 2010

Pada dua bagan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki konsentrasi besar dalam persenjataan defensif (anti-tank dan artileri), sedangkan Singapura mengkonsentrasikan kapabilitasnya pada persenjataan ofensif (*personel carrier* dan tank). Persenjataan darat dapat digolongkan ofensif dan defensif berdasarkan kriteria mobilitas, kekuatan tembak, proteksi, komunikasi, dsb. Kriteria seperti mobilitas dan komunikasi memberikan keuntungan pada sisi penyerang karena memungkinkan penyerangan yang efektif.

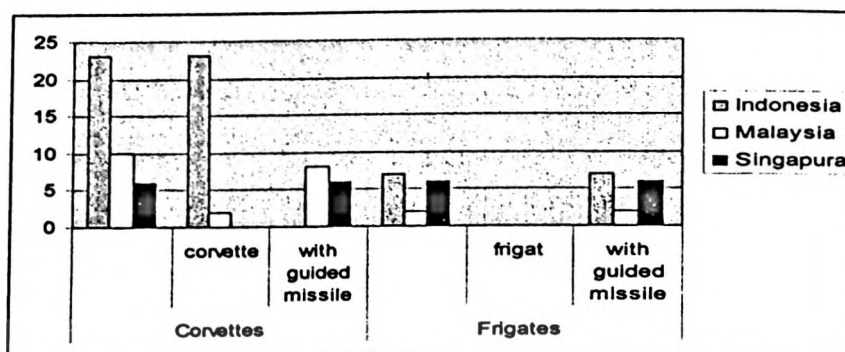
Hal ini mendorong keuntungan pada dominasi ofensif. Di sisi lain, kekuatan tembak dan proteksi memberikan keuntungan pada sisi bertahan karena memungkinkan pertahanan dangkal dan terkonsentrasi memberikan gempuran lebih besar dan durabel. Berdasarkan logika ini, persenjataan darat dapat dipilah ke dalam dua bagian yaitu bersifat ofensif dan defensif.

Malaysia mendominasi kepemilikan persenjataan anti-tank yang jelas memberikan keuntungan terhadap tank sebagai senjata ofensif darat paling efektif. Indonesia sendiri mendominasi kepemilikan artileri. Persenjataan yang dijuluki *Queen of War* ini didominasi Indonesia pada varian mortar yang pasti akan mengacaukan barisan infantri penyerang. Nampaknya varian mortar adalah jenis yang juga paling banyak dimiliki kedua negara lainnya. Singapura memiliki kapabilitas yang cukup banyak dalam hal ini meskipun hanya disumbangkan dari varian mortar dan *ramped craft anti-tank*. Berdasarkan bagan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia mendominasi kepemilikan senjata defensif darat yang menindikasikan juga proyeksi ancaman mereka yang sebagian besar berasal dari daratan.

Di lain pihak, Singapura tidak menunjukkan kepemilikan pertahanan darat yang memadai, sebaliknya mereka memiliki perlengkapan serang darat yang signifikan. Kendaraan angkut personal memberikan mobilitas yang tinggi dalam pertempuran darat. Hal itu juga didukung kepemilikan tank berjenis *light* dan *main battle*. Meskipun Singapura adalah negara pulau yang tidak memiliki batas wilayah daratan, namun mereka memiliki jumlah *main battle tank* terbanyak di antara negara lainnya. Hal ini cukup mengejutkan karena mampu melonjatkan daya serang Singapura secara signifikan. Dengan ketiadaan ancaman darat, *main battle tank* ini hanya dapat digunakan di teritori negara lain, artinya hanya digunakan saat momentum *conquest*.

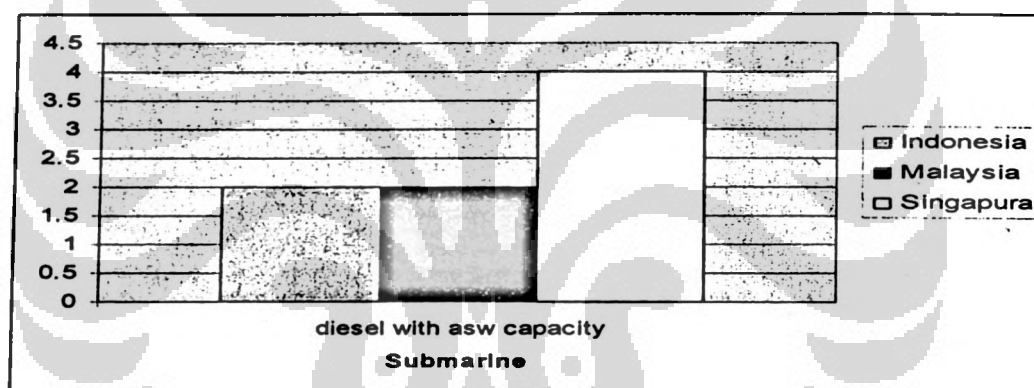
Kapabilitas di matra laut juga menjadi penting mengingat ketiga negara yang dikaji memiliki batas laut yang bersinggungan. Kemampuan serang maupun bertahan menjadi titik penting untuk melihat keseimbangan di antara ketiga negara. Dengan batas laut yang tidak jauh dan ibukota, maka kapal seperti korvet sudah dapat digolongkan sebagai senjata penyerang.

Bagan 4.5
Kapabilitas Serang Laut



Sumber: Asian Military Balance 2010

Bagan 4.6
Kapabilitas Serang Laut (Kapal Selam)



Sumber: Asian Military Balance 2010

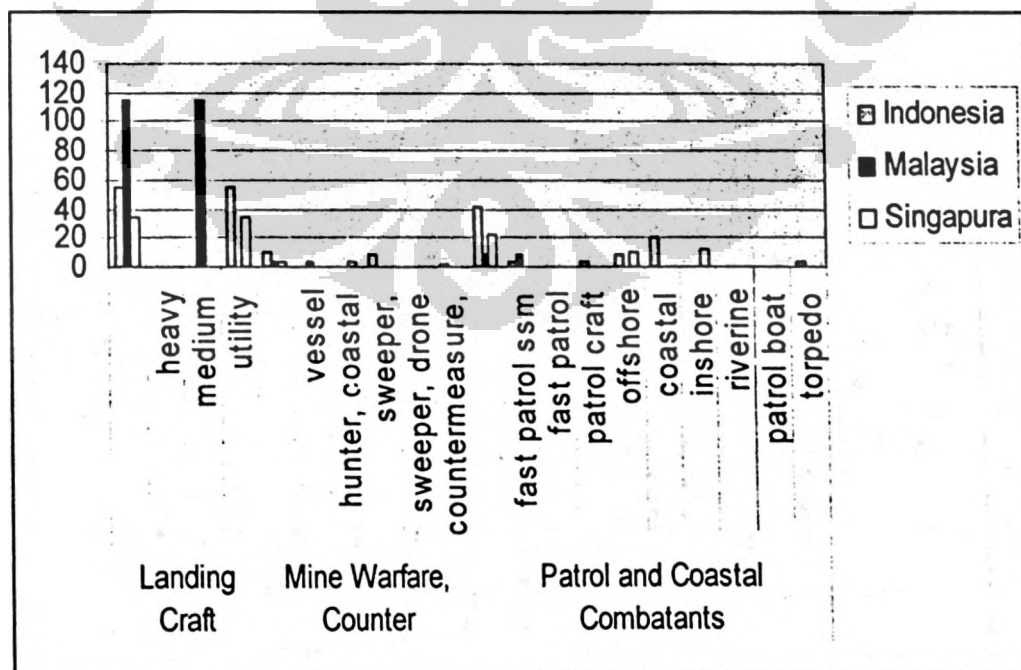
Kedua bagan di atas menunjukkan kapabilitas serang laut masing-masing negara. Sepintas Indonesia memiliki jumlah paling besar untuk kepemilikan korvet. Hal ini sejalan dengan luas teritori air yang dimiliki Indonesia. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, jumlah ini disumbangkan oleh korvet tanpa persenjataan yang modern (*guided missile*). Hal ini tentunya menurunkan kekuatan serang jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang memiliki korvet dengan *guided missile*. Sedangkan pada varian frigat, Indonesia mendapatkan perimbangan dari Singapura yang sama-sama memiliki frigat dengan *guided missile*.

Indonesia dan Malaysia berbagi kesamaan jumlah kepemilikan kapal selam. Sejauh ini kapal selam dipandang sebagai senjata serang laut yang sangat ofensif. Negara tidak akan memiliki kapal selam untuk pertahanan, sebaliknya

kepemilikan kapal selam menandakan negara tersebut memiliki motivasi untuk penyerangan. Singapura sebagai negara dengan wilayah teritori laut yang paling kecil justru memiliki armada kapal selam terbanyak. 4 buah kapal selam Singapura yang diantaranya 2 buah kelas Archer baru didatangkan tahun 2009 setelah *retrovit* dengan peningkatan kapabilitas di Swedia. Hal ini tentunya menaikan kemampuan serang Singapura di atas kekuatan Indonesia dan Malaysia yang memiliki teritori laut lebih luas.

Melihat dari konsentrasi kapabilitas serang laut dalam varian korvet, frigat, dan kapal selam diesel, maka dapat disimpulkan bahwa proyeksi pertempuran ketiga negara ada pada jarak dekat. Kekuatan serang utama laut yang ditumpukan pada korvet dan frigat mengindikasikan masing-masing militer masih berupa *brown water* atau *green water navy*. Kemampuan jelajah korvet dan frigat tidak mampu mencapai lautan lepas sehingga dapat terlihat proyeksi pertempuran diasumsikan berada di dekat perbatasan teritori. Kapal selam diesel juga tidak memungkinkan untuk menunaikan misi jarak jauh. Dengan demikian dapat disimpulkan proyeksi ancaman adalah negara tetangga ataupun negara dalam regional yang sama.

Bagan 4.7
Kapabilitas Pertahanan Laut



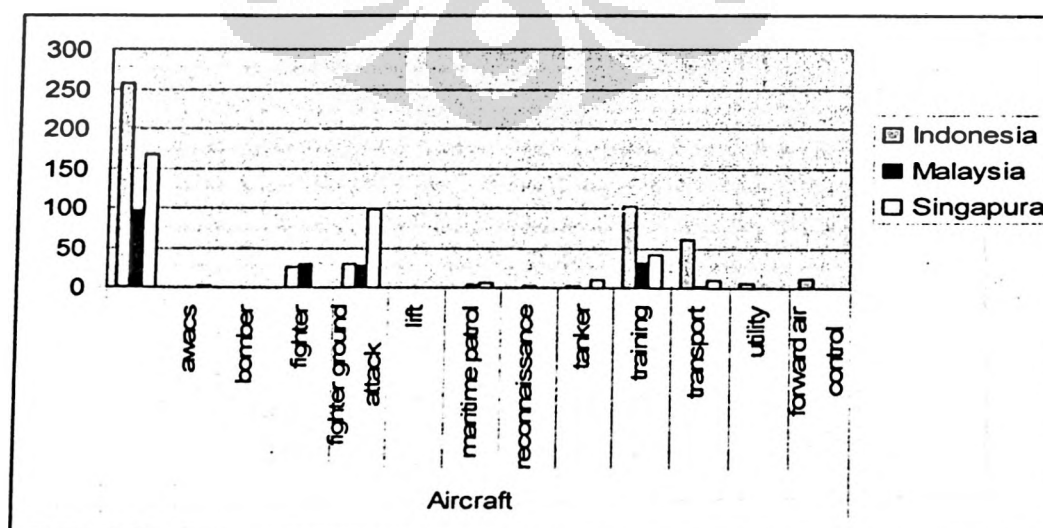
Sumber: Asian Military Balance 2010

Kapabilitas pertahanan laut didominasi oleh *landing craft* yang berguna bagi operasi helikopter. Varian ini paling banyak dimiliki oleh Malaysia dengan spesifikasi *medium landing craft*. Hal ini memberikan kekuatan pertahanan yang lebih besar dibandingkan *utility landing craft* yang dimiliki Indonesia dan Singapura. Selain itu masing-masing negara memiliki kemampuan yang merata untuk operasi penyapuan ranjau laut. Sedangkan pada varian kapal patroli, Indonesia memiliki jumlah yang paling banyak. Jumlah tersebut disumbangkan dari kapal patroli pantai dan lepas pantai. Malaysia tidak memiliki banyak kapal patroli, namun varian terbanyak mereka adalah kapal patroli dengan SSM (*Sea-to-Sea Missile*) yang memberikan kualitas pertahanan yang lebih baik dari sekedar kapal patroli biasa. Namun secara keseluruhan, kapabilitas pertahanan laut masing-masing negara tidak terlalu ditonjolkan kecuali untuk varian *landing craft* yang menunjang penggunaan helikopter yang dapat digolongkan sebagai senjata defensif.

Kapabilitas angkatan udara memberikan tambahan kekuatan karena penggunaan teknologi modern sebagai pilar utamanya. Meskipun demikian, persenjataan udara masih dapat dibedakan antara fungsi ofensif dan defensif. Jet tempur sudah pasti bersifat defensif baik itu *fighter* maupun *bomber*. Sedangkan helikopter memiliki fungsi defensif mengingat kemampuan membawa banyak artileri dan jarak operasinya yang pendek.

Bagan 4.8

Kapabilitas Serang Udara

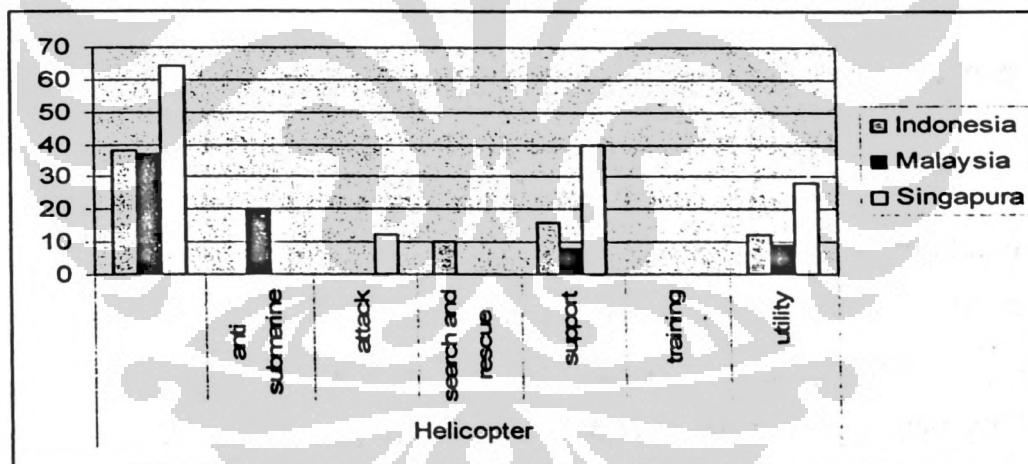


Sumber: Asian Military Balance 2010

Jumlah kepemilikan pesawat tempur terbesar dipegang oleh Indonesia, kemudian Singapura, dan Malaysia. Indonesia memiliki jumlah besar dalam varian pesawat penempur, training, dan transport. Malaysia tidak memiliki pesawat sebanyak Indonesia, tetapi mereka memiliki varian penempur serangan darat, patroli maritim, dan penginderaan. Singapura dapat dikatakan sebagai pemilik teknologi termaju dalam bidang ini mendominasi jumlah penempur dan penempur serangan darat. Bahkan secara jumlah penempur serangan darat, Singapura menjulang sendirian. Hal ini memberikan tambahan kemampuan serang sekaligus insentif untuk melakukan serangan yang lebih efektif. Ditambah dengan kemampuan AWACS yang mendukung peperangan elektronik, Singapura dapat dikatakan memiliki kemampuan serang udara paling baik meskipun secara kuantitas masih dibawah Indonesia.

Bagan 4.9

Kapabilitas Pertahanan Udara



Sumber: Asian Military Balance 2010

Hal serupa juga terlihat pada konsentrasi kepemilikan helikopter. Singapura memiliki dominasi dalam hal jumlah meskipun disumbang paling banyak oleh varian *support*. Namun kekhususan dalam kepemilikan helikopter serang memberikan ketajaman serang yang meningkat. Demikian juga halnya dengan Malaysia yang memiliki kekhususan dalam kepemilikan helikopter anti kapal selam. Persenjataan ini mengurangi dampak serang dari kapal selam yang jumlahnya tidak banyak dalam regional tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa kapabilitas udara ketiga negara ini cukup merata secara kuantitas namun timpang secara kualitas. Singapura masih memimpin dengan kualitas persenjataan yang modern dan terspesifikasi pada varian serang. Sedangkan Indonesia dan Malaysia meskipun memiliki jumlah pesawat cukup banyak, namun teknologi yang dimiliki belum semuanya modern (misalnya jet generasi 4 dan 5). Hal ini dapat menjadi pemicu dominasi ofensif akibat kepemilikan persenjataan ofensif yang tidak diimbangi kepemilikan persenjataan defensif pada pihak lainnya.

IV.2.2. Analisa Offense-Defense Balance pada Besar Kekuatan dan Konsentrasi Kapabilitas Militer.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pemaparan besar dan konsentrasi kekuatan di atas. Pertama, kekuatan (kapabilitas) dapat digolongkan menjadi kapabilitas ofensif dan defensif. Pesawat serang darat, tank, dan kapal selam sudah jelas bersifat ofensif karena kecepatan, kekuatan, dan pengelabuannya. Sedangkan artileri, kapal patroli, dan helikopter cenderung bersifat defensif karena mobilitas yang terbatas dan lebih cocok berada di garis pertahanan. Kepemilikan persenjataan ofensif menunjukkan intensi negara tersebut untuk melakukan operasi yang ofensif pula. Sebaliknya, kepemilikan senjata defensif menunjukkan intensi negara tersebut melakukan operasi pertahanan saja.

Kedua, pemaparan di atas menunjukkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki persenjataan ofensif, tetapi memiliki lebih banyak kekuatan defensif. Indonesia memang punya korvet Sigma, Malaysia punya F/A- 18 Hornet, dan Singapura memiliki kapal selam kelas Archer, namun persenjataan ofensif tersebut hanya sebagian dari jumlah total kapabilitas militer mereka. Dari segi kapabilitas darat, ketiga negara mengkonsentrasikan kepemilikan persenjataannya pada artileri, anti-tank, dan pengangkut personel. Persenjataan tersebut mampu memberikan nilai untuk Tingkat Ofensivitas, namun penggunaan persenjataan tersebut dapat digolongkan sebagai senjata untuk pertahanan. Dari segi kapabilitas laut, ketiga negara memiliki konsentrasi kapabilitas pada *landing craft* dan kapal patroli. Memang mereka memiliki kapal selam, frigat, dan kovet

namun jumlahnya kalah jauh dengan kepemilikan kedua persenjataan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa intensi kapabilitas militer mereka ditujukan sebagian besar untuk pertahanan. Sedangkan untuk kapabilitas udara, ketiga negara memiliki konsentrasi kekuatan pada pesawat latih, *training*, *tanker*, helikopter *support*, dan helikopter *utility*. Singapura memang mencatat kepemilikan pesawat jet serang darat yang tinggi, namun Singapura juga memiliki jumlah helikopter non-perang yang cukup banyak.

Ketiga, konsentrasi kapabilitas pada persenjataan defensif memberikan insentif untuk *defense dominance*. Persenjataan ofensif juga dapat memberikan insentif untuk *defense dominance* pada situasi tertentu, tetapi kepemilikan dan konsentrasi kekuatan negara pada kapabilitas defensif memberikan indikasi bahwa negara mencukupi kebutuhan keamanannya dengan operasi yang bersifat defensif. Persenjataan defensif secara fungsi memang sudah dipastikan untuk pertahanan, namun dengan konsentrasi kapabilitas pada persenjataan ini membuktikan bahwa di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kesamaan bahwa mereka bertujuan untuk mempertahankan *status quo* dengan tidak melakukan penyerangan. Sebaliknya, mereka menjaga *status quo* tersebut dengan mengkonsentrasikan kapabilitasnya pada sisi pertahanan yang defensif.

IV.3. Kondisi Geografis Teritori Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

IV.3.1. Kontur Bumi di Teritori Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Kondisi geografi menjadi salah satu variabel dalam *Offense Defense Theory* karena peperangan selalu dipengaruhi faktor alam. Beberapa perang krusial seperti penyerbuan Napoleon dan Hitler ke Rusia mengalami kegagalan karena tidak memperhitungkan kondisi alam yang dingin di belahan buri bagian utara. Hal yang serupa juga dialami pasukan Amerika ketika berperang di Vietnam. Persenjataan yang mereka gunakan tidak tahan terhadap lingkungan pertempuran yang basah dan berawa-rawa. Rommel pernah menjadi korban keganasan alam yang tidak diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan pasukannya. Hambatan, penyamaran, dan kerugian yang diberikan kondisi geografis berperan besar untuk menentukan keuntungan di pihak penyerang

ataupun bertahan. Oleh sebab itu dalam teori ini, geografi menjadi variabel yang penting untuk dibahas.

Kondisi geografi Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara garis besar tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 4.12

Kondisi Geografis Indonesia, Malaysia, dan Singapura

Aspect	Type	Indonesia	Malaysia	Singapore
Total Area		1.904.569 km ²	329.847 km ²	697 km ²
	Land	1.811.569 km ²	328.657 km ²	687 km ²
	Water	93.000 km ²	1.190 km ²	10 km ²
Land Boundaries		1.782 km (with Malaysia)	1.782 (with Indonesia)	-
Coastline		54.716 km	4.675 km	193 km
Coordinates		5 00 S, 120 00 E	2 30 N, 112 30 E	1 22 N, 103 48 E
Terrain		mostly coastal lowlands; larger islands have interior mountains	coastal plains rising to hills and mountains	lowland; gently undulating central plateau contains water catchments area and nature preserve

Sumber: CIA World Factbook

Beberapa hal yang dapat dicermati berdasarkan data di atas adalah keberadaan Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang memiliki garis pantai dan keberadaan kontur daratan di dalam pulau. Pertama, ketiga negara ini memiliki luas wilayah daratan perairan yang berbeda, namun secara pasti mereka memiliki garis pantai yang cukup panjang diperbandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang, disusul oleh Malaysia yang berada di ujung semenanjung benua Asia. Singapura memiliki garis pantai terpendek, namun seluruh batas teritori negara ini berada pada garis pantai tersebut. Artinya Singapura tidak memiliki batas teritori di

daratan untuk dipertahankan, sebaliknya pertahanan batas teritori mereka berada di laut.

Kedua, bentuk kontur permukaan daratan di dalam pulau-pulau memberikan dampak pada penggelaran perang. Dengan kontur yang menyulitkan mobilisasi dan menambah kamuflase, hal tersebut memberikan keuntungan bagi pihak bertahan. Sebaliknya kontur permukaan daratan yang langsung terekspos memberikan keuntungan bagi pihak penyerang karena tidak memberikan peluang untuk terbentuknya pertahanan yang dalam dan berlapis. Jenis serangan yang terekspos masih memiliki kemungkinan berhasil dalam skenario ini.

Singapura berada dalam posisi rentan karena kontur permukaan daratan mereka berupa dataran rendah dengan sedikit dataran tinggi yang ada di tengah pulau. Hal ini juga diperburuk dengan bentuk negara yang hanya terdiri dari sebuah pulau kecil. Pertahanan Singapura tidak dapat dilakukan di daratan karena kontur permukaan daratan tidak memberikan keuntungan bagi posisi bertahan. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia memiliki keuntungan dari segi geografis karena memiliki banyak daratan tinggi. Dari kelima pulau besar yang ada di Indonesia, hanya pulau Kalimantan yang cenderung memiliki permukaan yang datar. Selain itu, di dalam pulau-pulau tersebut juga tersedia rintangan alami berupa rawa dan hutan sehingga menambah kemampuan kamuflase pihak bertahan. Demikian juga dengan Malaysia yang memiliki hutan dan gunung-gunung sebagai wilayah untuk melakukan pertahanan berlapis. Bentuk geografi seperti ini mendukung pihak bertahan karena memungkinkan pembentukan garis pertahanan di darat dan dibentuk secara dalam. Memang sejak dahulu Indonesia dan Malaysia terkenal sebagai negara yang mengadopsi bentuk peperangan gerilya. Bahkan Malaysia sendiri menjadi salah satu percontohan *jungle warfare school*.

IV.3.2. Analisa Jangkauan Unit Penyerangan Negara.

Melihat faktor geografis juga meninjau bagaimana negara meng-cover wilayah kedaulatan dan menjangkau wilayah negara lain. Kemampuan negara untuk melindungi wilayahnya secara sempurna memberikan dua pengertian. Pertama, negara mampu memberikan posisi defensif yang maksimal. Kedua,

negara memiliki intensi untuk menyerang karena sudah memastikan *second-strike* negara lawan tidak menjadi masalah berarti. Dengan demikian sangat krusial untuk mengetahui sampai sejauh mana negara mampu melindungi wilayahnya. Selain untuk mengetahui kemampuan defensif, analisa ini juga mampu menggambarkan apakah ada tujuan ofensif yang tersirat dalam perilaku ini.

Dalam pembahasan ini, penelitian akan mengambil eksampler kapabilitas udara (*air power*) untuk melihat jangkauan unit penyerangan udara. Dasar pemilihan ini ada pada paradox akan kekuatan udara itu sendiri. *The theory went that war from the air would be so destructive that it might deter war from even breaking out. But if war did occur, then the inherently strategic and offensive nature of airpower, which was then viewed as virtually unstoppable, would ensure that it would be over fairly quickly.*¹⁰⁰ Kekuatan udara memiliki kemampuan untuk melakukan *deterrence* sekaligus menjadi senjata operasi perang yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan persenjataan ini menjadi ukuran vital bagi postur kekuatan sebuah negara. Meskipun pada kenyataannya, perang tetap terjadi dan korban yang jatuh jauh dari kata *fairly quickly*¹⁰¹. Namun tetap saja, kekuatan udara menunjukkan kedigdayaannya dalam peperangan.

Kedigdayaan kekuatan udara ditunjukkan dengan efektivitas mereka memulai dan menyelesaikan perang dengan mudah. Gen Carl Spaatz dari USAF menyebutnya “permasalahan kita adalah, kita (USAF) selalu membuatnya nampak mudah.”¹⁰² Kekuatan udara membuktikan kemampuannya pada Perang Teluk I dengan melumpuhkan hingga 50% kapabilitas 49 divisi pertahanan Irak sebelum kekuatan darat datang. Demikian juga dengan perselisihan di Bosnia yang berakhir dengan Dayton Peace Accord setelah pengeboman udara dari NATO, ataupun konflik di Kosovo yang mengarah pada kemerdekaan mereka. Serupa juga dengan yang terjadi di Afghanistan, kekuatan udara menunjukkan kemampuan mereka untuk menghadirkan pertempuran yang desisif. Baghdad menyaksikan operasi 3 minggu yang dilakukan kekuatan udara mampu mengalahkan 12 divisi pertahanannya.¹⁰³

¹⁰⁰ Dr Phillip S. Meilinger, “Paradoxes and Problems of Airpower” diakses dari <http://www.airpowerstudies.co.uk/AgileAirForce.pdf>, 9 Desember 2010, hal. 82.

¹⁰¹ *Ibid.* hal. 83.

¹⁰² *Ibid.* hal. 85.

¹⁰³ *Ibid.* hal. 86.

Kelebihan lainnya dari kekuatan udara adalah mereka dapat terbang di atas pasukan darat dan langsung menyerang ke sasaran vital negara lawan.¹⁰⁴ Kekuatan udara semisal jet tempur memiliki *combat radius* yang besar, terutama bagi yang bertipe *fighter ground attack* dan *air dominance*. Mereka memiliki *combat radius* sampai lebih dari 1000 km yang berarti mampu mencakup sepertiga panjang wilayah Indonesia. Jet tempur mampu beroperasi di kontur permukaan bumi yang berbeda karena dengan *combat radius* yang besar, mereka tidak perlu mendarat untuk mengisi bahan bakar, bahkan bagi beberapa pesawat yang membawa *drop tank*, *combat radius* mereka dapat melonjak hingga 2 kalinya. Kemampuan ini menjadikan kekuatan udara sebagai kekuatan yang paling fleksibel, tidak mengenal kontur daratan, dan mampu meng-*cover* seluruh wilayah baik darat maupun laut. Dengan kelebihan-kelebihan ini, maka kekuatan udara patut menjadi eksampler bagi analisa sejauh mana sebuah negara mampu menggelar operasi ofensif pada wilayah kedaulatan negara lainnya.

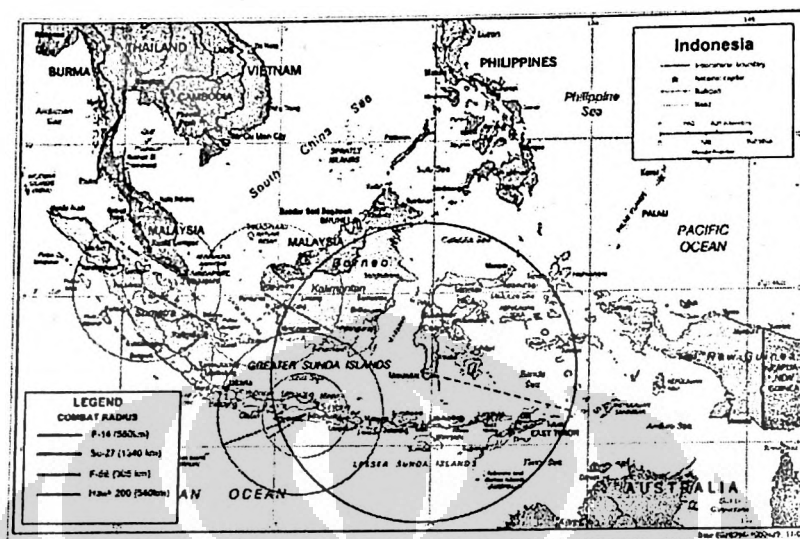
Indonesia menyadari fungsi strategis dari kekuatan udara. Kekuatan Udara Indonesia dipecah ke dalam beberapa skuadron dan ditempatkan pada beberapa tempat terpisah untuk memberikan perlindungan menyeluruh pada wilayah teritorial yang luas. Pesawat yang dimiliki antara lain:

1. Hawk 200 dengan *combat radius* 540 km
2. F-5E Tiger dengan *combat radius* 305 km
3. F-16 A/B Fighting Falcon dengan *combat radius* 550 km
4. Sukhoi Su-27/30 dengan *combat radius* 1340 km

Dengan menyebar pesawat ini ke dalam pulau-pulau terpisah maka ada *coverage* terhadap wilayah Indonesia. *Coverage* yang dihasilkan memang tidak sempurna mengingat sebagian ujung Aceh dan Sumatera Selatan tidak terliputi. Demikian juga dengan wilayah Indonesia bagian timur yakni Maluku dan Papua yang tidak di-*cover* sama sekali oleh jet tempur. Hal ini dapat menjadi *blank spot* yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memasuki wilayah Indonesia dan melakukan operasi merugikan pertahanan Indonesia di tempat tersebut.

¹⁰⁴ *Ibid.* hal. 87.

Gambar 4.1
Peta Jangkauan Pesawat Tempur Indonesia



Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa konsentrasi kekuatan udara ada di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah. Terlihat bahwa *center of gravity* (CoG) Indonesia berada di wilayah barat dan tengah. Selain itu, potensi ancaman dipersepsikan berasal dari wilayah barat dan utara sehingga pertahanan di wilayah ini menjadi prioritas. Sebaliknya daerah timur tidak mendapat prioritas karena tidak merupakan CoG dan ancaman tidak dipersepsikan datang ke wilayah timur. Hal ini juga menunjukkan kelemahan Indonesia untuk mencukupi proteksi wilayah teritorialnya karena integritas wilayah harus di-*cover* secara keseluruhan, meskipun bukan titik CoG yang vital.

Hal lain yang dapat ditarik adalah kekuatan udara Indonesia bersifat defensif. Sifat ini diturunkan dari penempatan kekuatan udara yang ditujukan untuk melindungi pulau utama yaitu Pulau Jawa. Berdasarkan gambar di atas, Indonesia tidak memiliki intensi menyerang Singapura, Malaysia, ataupun negara lain di semenanjung Malaya karena masih membiarkan terdapat *blank spot* di sebagian Pulau Sumatera. Perlu diperhatikan juga bahwa yang bertugas melindungi Sumatera dan Kalimantan sebagian besar adalah A-4 yang meskipun memiliki kemampuan serang darat tetapi kalah teknologi untuk bersaing dengan *fighter-fighter* yang lebih modern.

Gambar 4.2
Peta Jangkauan Pesawat Tempur Malaysia



Sedangkan Malaysia yang memiliki doktrin pertahanan mengedepankan *self-reliance* menunjukkan kapasitas untuk melindungi teritori mereka melalui kepemilikan *fighter* yang berdaya jangkau luas. Beberapa pesawat utama persenjataan Malaysia adalah:

1. F-5 Tiger II dengan *combat radius* 305 km
2. Sukhoi Su-30 MKM dengan *combat radius* 1600 km
3. F/A-18 Hornet dengan *combat radius* 926 km
4. MiG-29 Fulcrum (*combat radius* 719 km)
5. Hawk 200 dengan *combat radius* 540 km

Coverage yang diberikan oleh jet-jet tempur ini cukup mengesankan karena mampu memberikan perlindungan menyeluruh. Pada daratan utama di semenanjung Malaya, kekuatan siaga didapat dari Hornet dan Tiger di Pangkalan Butterworth yang menjadi pusat koordinasi FPDA. Sedangkan Su-30 yang mampu memberikan jangkauan hingga Sabah dan Serawak berlokasi di Gong Kedak. Penempatan pangkalan skuadron ini dinilai cukup strategis, terutama untuk Sukhoi yang mampu menjangkau sebagian Pulau Kalimantan meskipun masih ada celah di ujung timur. Daerah timur Malaysia tidak terproteksi secara efektif karena berada di ujung *combat radius* pesawat yang mampu beroperasi. Hal ini juga dapat memberikan dampak buruk akibat terbentuknya *blank spot*.

Kekuatan udara Malaysia juga belum menunjukkan adanya usaha menuju perubahan yang lebih baik. Wacana untuk mengganti MiG-29 dengan varian *Flanker* lainnya terkendala masalah pendanaan. Jika saja Malaysia mampu membeli Su-30 untuk ditempatkan di Kalimantan, maka lengkap perlindungan terhadap keseluruhan teritori mereka. Namun gagalnya wacana ini sedikit banyak menunjukkan pertahanan utama mereka tidak terpusat pada pertahanan wilayah. Sebaliknya, Malaysia cenderung mengambil posisi defensif dengan ketiadaan sumber daya untuk mengangkap pertahanan mereka ke tingkat yang lebih ofensif dan *outward-looking*.

Di sisi lain, Singapura memiliki kedigdayaan dalam upaya pertahanan udara. Keberadaan jet tempur generasi 4 dengan kapabilitas *fighter ground attack* dan *air dominance* memperkuat kapabilitas udara Singapura secara signifikan. Meskipun upaya mendatangkan F-35 Lightning II baru direalisasikan tahun 2012 nanti, Singapura sudah memiliki perlengkapan persenjataan udara yang memadai. Bahkan dikatakan oleh Peng Er, seorang peneliti di IISS, bahwa terlepas dari krisis finansial 2008 dan nilai ekspor Singapura terjun bebas, kegiatan militer mereka tidak juga memasuki masa “puasa dan kelaparan” dalam hal pelaksanaan operasi dan akuisisi persenjataan.¹⁰⁵ Riset persenjataan yang dibiayai pemerintah terus berlangsung dan ditunjang oleh pembelian senjata-senjata baru yang unggul dalam bidang teknologi. Singapura adalah contoh keberhasilan negara Asia dalam memanfaatkan teknologi UAV.¹⁰⁶ Bahkan dalam setiap operasi yang digelar di darat dan laut, UAV berperan sebagai “mata” yang siap menyebar informasi yang dibutuhkan untuk setiap matra peperangan.

¹⁰⁵ Lam Peng Er, “Singapore’s Security Outlook: The Immutability of History, Geography and Demography?” *The Military Balance 2009*, diakses dari www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series5/pdf/5-4.pdf, 8 Desember 2010, hal. 64

¹⁰⁶ International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2008* (London: Routledge, 2008), hal. 364. UAV telah menjadi bagian integral dari operasi yang dilakukan SAF. MG Ng Chee Khern menuliskan, “Many, if not most, air forces do not have as wide a range of capabilities as the RSAF (Republic of Singapore Air Force). Most air forces operate some fixed wing and rotary wing transports, as we do. But if fighters were taken into consideration, many air forces would be out of the running. If we add attack helicopters, even more air forces would drop out. If we add in UAVs, there would be only a handful of air forces left with such a diverse and wide range of capabilities,” Major Ng, *On Command*, hal. 12

Gambar 4.3
Peta Jangkauan Pesawat Tempur Singapura



Hingga saat ini Singapura masih mengoperasikan jet tempur yang terbaik di kelasnya. Mereka antara lain adalah:

1. F-15SG Strike Eagle dengan *combat radius* 1850 km
2. F-16 C/D Blok 52 dengan *combat radius* 550 km
3. F-5E Tiger II dengan *combat radius* 305 km

Dengan kepemilikan kapabilitas ini, maka wilayah Singapura secara sempurna terlindungi. Keuntungan ini memberikan proteksi yang maksimal bagi Singapura, tetapi ironisnya hal ini mengurangi proteksi negara lain. *Security dilemma* menjelaskan bahwa peningkatan keamanan suatu negara berarti pengurangan keamanan negara lainnya. Dalam hal ini, keberhasilan pertahanan Singapura adalah kemunduran bagi pertahanan Indonesia dan Malaysia. Meskipun Singapura mengklaim mereka hanya mempertahankan diri, namun dengan logika pertahanan yang absolut adalah jaminan negara pasti bertujuan ofensif, maka tindakan Singapura yang mampu memberi proteksi total pada wilayahnya dapat dipandang sebagai inisiator untuk tindakan ofensif berikutnya.

Kekuatiran Indonesia dan Malaysia akan kapabilitas udara Singapura bukan tanpa alasan. Pertama, *combat range* yang dimiliki kekuatan udara SAF mampu melingkupi seluruh wilayah Malaysia dan wilayah vital Indonesia. Kapabilitas ini menguntungkan SAF yang mampu memberikan kejutan tepat di kota-kota strategis lawan yang berada di dalam *combat radius* mereka. Kedua,

combat radius jet tempur Singapura dapat berubah menjadi *unlimited* jika mengikutsertakan pesawat tanker dan AWACS yang dimiliki SAF. Kemampuan kapabilitas SAF ini terlihat berlebihan jika melihat luas wilayah Singapura yang tidak lebih besar dari Jawa Barat. Dengan AWACS dan tanker, jet tempur Singapura dapat bepergian tanpa harus mengisi ulang bahan bakar di darat dan mereka tidak akan kehilangan sinyal kontrol kepada kantor pusat karena ada AWACS yang siap *me-relay* perintah dari kantor pusat. Dengan kombinasi kapabilitas ini, bukan hanya Indonesia dan Malaysia yang merasa tidak aman, seluruh Asia Tenggara bahkan hingga regional tetangga mengalami ancaman yang serupa. Singapura adalah sedikit contoh negara yang mampu menggelar kekuatan udara begitu efektif dan dinamis. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dilakukan oleh negara *city-state* yang masih menggantungkan kebutuhan logistiknya dari negara tetangga. Ancaman dari Singapura memungkinkan efek boomerang jika tidak dengan cermat dikontrol dan dicitrakan.

IV.3.3. Pengaruh Variabel Geografi terhadap Offense Defense Balance.

Geografi memberikan dua pengaruh pada keseimbangan *offense-defense*, memudahkan penyerangan yang berarti mendukung *offense* atau menghambat penyerangan yang berarti mendukung *defense*. Ketika melihat sejarah, maka nampak bahwa dukungan atau ketidadukungan geografi menjadi salah satu kunci kemenangan pertempuran. Dengan wilayah yang berhutan rimba, Indonesia efektif menggelar perang gerilya. Dengan wilayah yang berada di teluk, Irak mampu dibombardir dengan jet tempur dan rudal dari kapal induk. Berbagai faktor geografi harus diperhitungkan sehingga merencanakan hasil peperangan.

Pada wilayah di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, keberadaan wilayah perairan memberikan keuntungan pada pihak bertahan. Model pantai yang beragam memberikan hambatan pada pergerakan pasukan penyerang sehingga akan menahan mereka cukup lama. Terlebih lagi untuk Indonesia dan Malaysia yang memiliki daratan yang luas, pertahanan mendalam yang berlapis menjadi model pertahanan yang terbaik dengan memanfaatkan kondisi geografi. Hutan dan pegunungan interior memberikan keuntungan tersendiri bagi pertahanan mendalam dan berlapis. Terlebih dengan doktrin yang melibatkan seluruh rakyat,

bentuk kontur bumi di Semenanjung Malaya dan kepulauan Indonesia sangat menguntungkan pihak bertahan. Meskipun tidak terlalu berpengaruh bagi Singapura yang luas wilayahnya tidak memiliki pengunungan ataupun hutan yang lebat untuk melakukan peperangan mendalam. Namun dengan keberadaan perairan dan kontur pantai dapat memberikan hambatan bagi pergerakan pasukan infantri lawan. Keuntungan-keuntungan permukaan bumi ini menegaskan dukungan kepada posisi defensif sehingga memperkuat juga hipotesis terbentuknya *defense dominance* dari kontur bumi yang menghambat penyerangan.

Akan tetapi faktor kedekatan (*proximity*) cenderung memberikan keuntungan pada pihak penyerang. Jarak yang tidak terlalu jauh, yaitu selebar Selat Malaka membuat penyerangan tidak sulit untuk dilakukan. Kapabilitas darat dan laut memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan mobilisasi dan mendaratkan kekuatan secara cepat. Peluang yang lebih besar didapatkan oleh kekuatan udara karena jarak yang pendek mengaktifkan pergerakan dalam *combat radius*. Pesawat dengan *combat radius* yang besar mampu beroperasi lebih lama dan pesawat dengan *combat radius* yang lebih kecil mampu turut serta dalam operasi penyerangan. Jika melihat tiga peta di atas yang menunjukkan jangkauan pesawat Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tampak semua negara memiliki kapasitas untuk mencapai wilayah negara lawan. Memang luas wilayah Indonesia tidak dapat dijangkau seluruhnya baik oleh kekuatan negara lawan maupun kekuatan udara Indonesia sendiri, namun wilayah yang tidak terjangkau tersebut bukan merupakan wilayah yang vital. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga negara ini memiliki kapasitas untuk menggelar kekuatan udara dan memproyeksikan kekuatannya ke teritori lawan yang strategis dan vital.

Dapat disimpulkan bahwa variabel geografi memberikan pengaruh pada *Offense-Defense Balance*. Pengaruh yang diberikan terbagi menjadi dua, mendukung pergerakan penyerang dan menghambat pergerakan penyerang. Kedua hal ini didapati pada bentuk permukaan bumi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masing-masing negara dapat memanfaatkan bentuk permukaan bumi ini sesuai dengan kepentingannya. Pengaruh geografi pasti terjadi, namun

bagaimana hal itu terjadi masih bergantung pada cara masing-masing negara memanfaatkannya. Dapat dikatakan bahwa dalam konteks ketiga negara ini, faktor geografi dapat memberikan pengaruhnya pada *outcome* peperangan, namun hal signifikansi hal tersebut masih perlu kajian lebih lanjut. Hal itu dikarenakan dukungan dan hambatan pada pihak penyerang didapati bersamaan. Keuntungan maupun kerugian kembali ditentukan oleh bagaimana masing-masing negara *aware* dan memanfaatkan hal tersebut.

IV.4. Doktrin Militer dan Penggelaran Senjata.

Doktrin militer menentukan penggelaran senjata suatu negara. Di dalam doktrin militer tercantum dasar-dasar pemikiran keamanan, hal-hal yang diklasifikasikan sebagai keamanan, hingga persepsi potensi ancaman yang dihadapi. Doktrin militer juga mencantumkan garis besar model pertahanan ideal yang diinginkan negara tersebut guna secara efektif mengatasi ancaman yang sudah dipersepsikan sebelumnya. Doktrin militer menjadi haluan bagi pengembangan teknologi dan strategi pertempuran negara tersebut, sehingga mempelajari doktrin militer memiliki keuntungan untuk mengetahui bentuk peperangan apa yang akan dihadapi jika berhadapan dengan negara tersebut. Meskipun demikian, memang pada kenyataannya doktrin militer mengandung jargon-jargon yang belum tentu sesuai terjadi di lapangan. Namun dalam kondisi ideal, hal itu yang diharapkan terjadi oleh negara yang dimaksud. Untuk hal tersebut, pembahasan berikut ini akan memaparkan doktrin militer serta model penggelaran senjata dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

IV.4.1. Doktrin Militer dan Bentuk Pertahanan Indonesia.¹⁰⁷

Buku Putih Pertahanan Indonesia berangkat dari pemaparan permasalahan dan ancaman yang dihadapi di tingkat global, regional, dan dalam negeri. Menurut Indonesia ancaman yang sedang terjadi di tingkat global antara lain terorisme, senjata pemusnah massal berserta proliferasinya, peningkatan kebutuhan energi dunia beserta dampaknya terhadap keamanan global, keamanan trans-nasional, dampak pemanasan global, dan bencana alam. Di tingkat regional Indonesia

¹⁰⁷ Diambil dan dirangkum berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008.

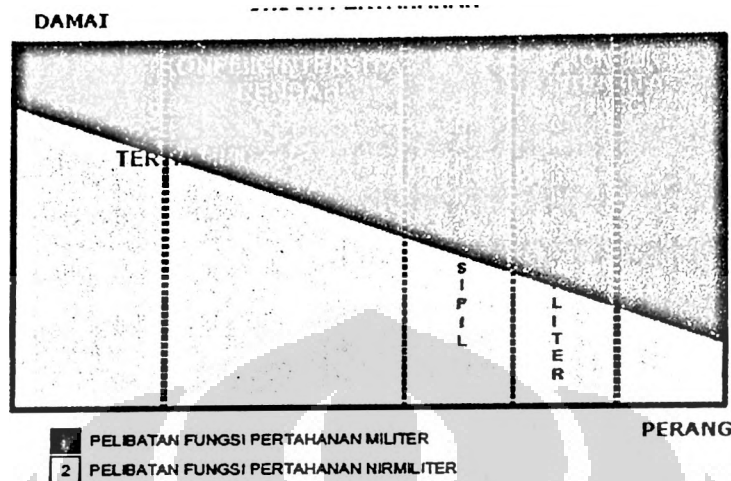
melihat ancaman kedaulatan melalui berbagai permasalahan batas wilayah yang terjadi. Selain ada kasus India – Pakistan dan semenanjung Korea, Indonesia melihat permasalahan sengketa wilayah di Laut China Selatan sebagai potensi konflik. Terlebih lagi Indonesia menekankan pada keamanan maritim sebagai poin utama ancaman sebagai akibat posisi strategi Indonesia yang dilalui jalur komunikasi di Selat Malaka. Sementara ini di dalam negeri sendiri, ada beberapa permasalahan yang diangkat seperti isu perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, separatisme, terorisme, radikalisme yang anarkis, konflik komunal, bencana alam, dan kondisi politik paska reformasi.

Berdasarkan jenis-jenis ancaman di atas, Indonesia melihat ada dua tipe ancaman yaitu ancaman militer dan ancaman nirmiliter. Ancaman militer sendiri dipandang sebagai ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Sedangkan ancaman nirmiliter dapat dilihat dari beberapa dimensi. Ancaman ideologis diasosiasikan dengan peristiwa Pemberontakan PKI. Selain itu ada ancaman dalam dimensi ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, dan keselamatan umum yang terkait dengan bencana alam.

Dengan permasalahan seperti itu, Indonesia menganut doktrin pertahanan semesta. Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan.

Bagan 4.10

Spektrum Konflik dan Pelibatan Unsur Pertahanan



Bagan di atas menunjukkan peran fungsi pertahanan militer (TNI) sebagai tulang punggung pertahanan yang berfungsi pada setiap saat. Operasi yang dilakukan TNI pada masa damai menjadikan TNI harus bersiaga di setiap penjuru Indonesia. Hal tersebut adalah warisan dari model pertahanan Orde Baru yang memecah kesatuan militer ke tingkat terkecil pada struktur masyarakat.

Secara jelas, dalam dokumen Doktrin Pertahanan Negara 2008, strategi peperangan dilakukan dengan strategi pertahanan berlapis dan mendalam yang memancarkan penangkalan yang kuat serta kemampuan untuk mengatasi ancaman manakala meng-hadapi ancaman nyata. Pola penggelaran kekuatan militer secara berlapis serta pendayagunaan kekuatan nirmiliter secara efektif, saling menyokong, dan memperkuat satu sama lain, sehingga penyelenggaraan perang dapat mencapai sasaran dan berlangsung secara berkelanjutan.¹⁰⁸

Disebutkan juga bahwa politik pertahanan Indonesia bersifat defensif namun tidak menginginkan adanya ketergantungan terhadap kekuatan negara lain. Namun hal itu harus juga dibarengi dengan tindakan Indonesia yang aktif mengusahakan pertahanannya sendiri dengan melakukan tindakan penangkalan juga. Hal itu terkait dengan strategi pertahanan berlapis yang mengerti akan lapis pertama (terluar) di laut lepas hingga lapis ketiga yang ada di daratan. Pertahanan berlapis yang dilaksanakan dengan perlawanan berlarut, selain untuk tujuan

¹⁰⁸ "Doktrin Pertahanan Negara 2008" berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Per/23/M/XII/2007 (Dephan: 2007).

penangkalan dengan cara penolakan, juga untuk tujuan strategi penangkalan dengan cara pembalasan. dalam rangka penangkalan dengan cara penolakan, kemampuan khusus perseorangan untuk melakukan pertempuran, didukung oleh penguasaan wilayah dan penguasaan medan, dikembangkan dalam pola pembinaan yang berkesinambungan. Dalam rangka itu, kekuatan khusus TNI meliputi Pasukan Khusus TNI AD, Pasukan Katak dan Pengintai Amphibi TNI AL, dan kemampuan Pasukan Khas TNI AU yang dibangun dan dikembangkan secara khusus, yang pada waktunya menjadi inti perjuangan dalam perang berlarut serta untuk menambah daya tangkal pertahanan Indonesia.¹⁰⁹

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa strategi militer indonesia adalah defensif aktif yang berlapis.

IV.4.2. Doktrin Militer dan Bentuk Pertahanan Malaysia.

Kebijakan pertahanan Malaysia adalah manifestasi dari tujuan untuk menjaga kepentingan strategis nasional dan perlindungan keamanan nasionalnya. Kebijakan pertahanan disusun dari tiga dasar yaitu kepentingan strategis nasional, prinsip-prinsip pertahanan, dan konsep-konsep pertahanan. Sedangkan secara area, Malaysia melihat ancaman dalam tiga tingkatan yaitu area dekat (*immediate vicinity*), regional, dan global. Pada area dekat, Malaysia melihat ancaman-ancaman teritori darat, air, dan udara yang datang di Zona Ekonomi Eksklusif, Selat Malaka, Selat Singapura, dan termasuk juga komunikasi laut dan udara yang menghubungkan Semenanjung Malaya dengan Sabah dan Sarawak. Perhatian yang besar juga diberikan pada Laut Andaman dan Laut China Selatan sebagai regional dimana Malaysia berkepentingan di dalamnya. Selain itu, perbatasan darat dengan beberapa negara di Asia Tenggara juga menjadi perhatian utama bagi pemerintah Malaysia. Dengan demikian, selain melindungi kepentingan strategis termasuk keamanan dan ekonominya, Malaysia juga berkepentingan untuk melindungi perdamaian global.¹¹⁰

¹⁰⁹ "Strategi Pertahanan Negara" berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Per/22/M/XII/2007 (Dephan: 2007).

¹¹⁰ "Malaysia National Defense Policy", diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/malaysia/policy.htm> 1 Desember 2010

Untuk mencapai hal-hal tersebut, Malaysia mengandalkan tiga prinsip dasar pertahanan, yaitu: *Self-Reliance*, *Regional Cooperation*, dan *External Assistance*. Menjadi negara berdaulat dan mandiri, Malaysia menyadari bahwa pencapaian kepentingan dan keamanan nasional hanya dicapai paling baik melalui pengejaran *self-reliance* yang juga menjadi inti dari kebijakan pertahanan. Prinsip ini tidak hanya mendorong angkatan bersenjata untuk mengembangkan diri tetapi juga jalur distribusi logistik dari industri militer dalam negeri menjadi prioritas negara. *Self-reliance* tidak hanya dibatasi pada angkatan bersenjata saja tetapi juga melibatkan badan pemerintah yang relevan, dan tentu saja masyarakat. Proyeksi pertahanan ini ditujukan untuk bergerak mandiri tanpa bantuan kekuatan luar dalam hal keamanan dalam negeri dan bergerak mandiri tanpa bantuan kekuatan luar untuk mengamankan tingkatan area dekat dari ancaman luar skala rendah dan sedang.

Melihat proyeksi ancaman yang berasal dari insurgensi di dalam negeri, Malaysia mendorong kekuatan pertahanannya untuk mengatasi ancaman ini. Bukan berarti Malaysia tidak memiliki masalah eksternal. Permasalahan dengan Kamboja dan Thailand mengenai kuil Preah Vihear, sengketa Ambalat, Kepulauan Spratly, dan potensi peningkatan kapabilitas China menjadi masalah keamanan luar negeri yang serius. Namun hingga saat ini, Malaysia masih memfokuskan kekuatan pertahanannya untuk pertahanan darat terhadap ancaman dari dalam.

Keyakinan Malaysia bahwa permasalahan eksternal tidak akan meletus menjadi konflik yang nyata berdasar pada berbagai perjanjian internasional yang diikutinya. Malaysia mengandalkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dalam kerangka ASEAN sebagai jaminan perdamaian di kawasan. Malaysia yakin negara-negara ASEAN memiliki kesepahaman dan catatan sejarah yang baik dalam menyelesaikan konflik secara damai.¹¹¹ Selain itu ada Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) yang mengesahkan kemitraan Malaysia dengan negara besar lainnya untuk menjaga perdamaian di kawasan. Malaysia juga memiliki FPDA sebagai wadah konsultatif dan *bargaining power* terhadap ancaman eksternal yang berasal dari kawasan terdekat.

¹¹¹ Tang Siew Mun, "Malaysia Military Outlook and Challenge" *The Military Balance 2009* (London: IISS, 2009), hal. 26.

Hal tersebut mendorong Malaysia untuk tidak terlalu memprioritaskan kekuatan pertahanannya terhadap ancaman eksternal. Selain imbas krisis finansial sejak krisis Asia 1997 hingga krisis global tahun 2008, kapabilitas pertahanan Malaysia cenderung menurun. Modernisasi yang ingin dilakukan Malaysian Armed Force (MAF) seakan diredam. Peningkatan teknologi persenjataan dikeluarkan dari agenda penting.¹¹² Akhirnya Malaysia cukup nyaman dengan model pertahanan berorientasi internal yang berpusat pada kekuatan personel dan peralatan darat.

IV.4.3. Doktrin Militer dan Bentuk Pertahanan Singapura.¹¹³

Singapura mengawali pemikiran strategisnya berdasarkan dinamika triangular antara Amerika Serikat – China – Jepang. Keberadaan AS di Asia Tenggara membawa kestabilan, namun belakangan ini mulai digoyahkan dengan menguatnya pertumbuhan China. Berakhirnya Perang Dingin menjanjikan ketiadaan konflik antara negara adidaya, namun konflik regional dan sub-regional masih menjadi potensi yang nyata. Singapura melihat berbagai isu yang menimbulkan potensi konflik seperti masalah perbatasan (Spratly Islands dan Korean Peninsula), konflik sumber daya alam seperti minyak, energi, air, dan kekayaan maritim, proliferasi senjata nuklir, dan ancaman non-konvensional seperti terorisme.

Di sisi lain, ada tren perkembangan persenjataan yang dikenal sebagai Revolution in Military Affairs (RMA). Dengan pengenalan jet tempur dan tank, wajah peperangan berubah secara drastis. Berikutnya RMA akan membawa teknologi penginderaan yang akan menghasilkan kesadaran lebih tinggi atas *battlespace*. Hal ini berarti kemampuan yang lebih besar untuk mengobservasi wilayah pertempuran, membedakan kawan dan musuh, serta mengambil kebijakan yang akurat dalam waktu yang sempit. Pada saat yang sama, teknologi ini memungkinkan militer menyerang dimana saja dan kapan saja hal itu diperlukan, dengan akurasi dan jarak tembak yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Singapura juga melihat adanya perkembangan signifikan untuk menyatukan

¹¹² *Ibid.* hal. 35.

¹¹³ Diambil dan dirangkum berdasarkan "Defending Singapore in the 21st Century", www.mindef.gov.sg, 1 Desember 2010

seluruh matra peperangan, sehingga mereka bergerak sebagai suatu kesatuan yang integral, fleksibel, dan efektif.

Perspektif mengenai RMA ini yang mempengaruhi tujuan pertahanan Singapura yaitu untuk menjamin perdamaian dan stabilitas, dan bahwa kedaulatan wilayah Singapura terlindungi. Untuk mencapai hal tersebut, Singapura mengajukan jargon *Total Defense*. Keadaan ideal diharapkan dapat dicapai melalui penguatan dialog, CBM, dan kerjasama di dalam dan luar region, dan memperkuat *Total Defense* yang berarti memperkuat basis Singapore Armed Force (SAF) sebagai komponen pelaksana kapabilitas konvensional dan bekerja lebih ketat dengan badan pemerintah untuk menghasilkan pertahanan yang efektif terhadap ancaman-ancaman baru.

Dengan demikian doktrin militer Singapura mendorong angkatan bersenjata untuk semakin meningkatkan teknologi militer ketimbang jumlah pasukan. Hal ini dalam beberapa sektor sudah berjalan ke arah ideal. Dengan kerjasama riset pengembangan JSF F-35 Lightning II, Singapura sudah menjadikan dirinya sebagai satu-satunya negara di Asia Timur yang memiliki jet tempur generasi 5. Memang pada akhirnya ketergantungan dan perspektif Singapura pada teknologi dapat dipandang sebagai kompensasi dari keadaan geografi dan populasi yang tidak sememadai negara-negara lain dalam kawasan Asia Tenggara.

Strategi yang dilakukan Singapura adalah dengan melibatkan Amerika Serikat dan berusaha mempertahankan kehadiran negara besar itu dalam politik regional Asia Tenggara. Sebagai ganti kekurangan wilayah untuk pertahanan yang dalam, ketahanan pangan dan air, serta jumlah populasi yang kecil, Singapura mengadopsi pendekatan pertahanan yang menggunakan diplomasi untuk mendapatkan banyak kawan dan *deterrence* terhadap ancaman keamanan potensial baik mereka adalah "*known unknown*" ataupun "*unknown unknown*".¹¹⁴ Seandainya *deterrence* gagal dan konflik meletus, SAF sudah siap mengatasi oposisi dengan cepat dan desisif melalui kesiapan perang dan kepemilikan teknologi.¹¹⁵

¹¹⁴ Lam Peng Er, "Singapore's Security Outlook: The Immutability of History, Geography and Demography?" hal. 60.

¹¹⁵ *Ibid.*

Strategi ini mencerminkan bentuk pertahanan Singapura yang defensif dengan pertahanan dangkal namun memiliki teknologi tinggi. Kebergantungan Singapura dengan teknologi sangat terlihat dengan pengaplikasian C4ISR dalam taktik pertempuran. Pada latihan militer Forging Saber di Oklahoma tahun 2009, di lahan yang hampir seluas dua per tiga luas wilayah Singapura menjadi saksi kombinasi kekuatan jet tempur generasi 4 dengan helikopter serang, UAV, artileri roket, pasukan khusus, dan doktrin Singapore Armed Forces IKC2 (Integrated Knowledge-based Command and Control).¹¹⁶ Latihan tersebut mempertontonkan simulasi perang berteknologi tinggi yang sanggup digelar SAF.

Keinginan keras Singapura untuk mempertahankan kehadiran AS dan negara besar lainnya di kawasan menunjukan Singapura bergantung pada keberhasilan *deterrence*. Hal ini mengindikasikan dua pengertian. Pertama, Singapura memang berniat untuk mempertahankan wilayahnya saja sehingga perlu ada pengaruh negara besar yang memberikan jaminan kestabilan kawasan. Kedua, Singapura memiliki intensi untuk menyerang meskipun sampai saat ini belum pernah dilakukan. Hal ini tersirat melalui kepemilikan senjata ofensif seperti *main battle tank*, kapal selam, dan jet tempur serang darat. Singapura juga terus menjalin hubungan dengan AS selain untuk mendapatkan tempat berlatih guna kesiapan armada tempurnya, hubungan baik ini memberikan insentif baik bagi Singapura untuk melakukan modernisasi pertahanan. Sebagaimana diketahui bahwa Singapura selalu mengusahakan fitur terbaik dalam peningkatan kapabilitas pertahanannya. Misalnya dengan *upgrade* F-16 C/D ke model Blok 52 yang mengalami peningkatan dalam segi avionik dan pembelian setengah harga untuk F-35 Lighting II. Keuntungan-keuntungan ini memposisikan Singapura sebagai negara yang paling berpeluang melakukan tindakan ofensif di Asia Tenggara. Ambiguitas ini akan terus berlangsung sementara kondisi politik internasional dan regional tidak berubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Singapura memiliki intensi ofensif, namun sampai saat ini masih dibalut dengan tindakan-tindakan yang menunjukan intensi defensif.

¹¹⁶ *Ibid.* hal. 63.

IV.4.4. Defensivitas Doktrin Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Sejauh ini diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki bentuk pertahanan yang dalam dan berlapis, sedangkan Singapura memiliki bentuk pertahanan yang dangkal. Indonesia dan Malaysia tidak berintensi dan memiliki cukup kapabilitas untuk menyerang, sedangkan Singapura yang memiliki kapabilitas untuk hal tersebut tidak mengambil tindakan yang sejalan dengan kapabilitasnya. Sebaliknya Singapura cenderung mengambil langkah-langkah defensif dengan menggunakan penangkalan ancaman melalui teknologi tinggi dan kerjasama yang erat dengan negara besar khususnya Amerika Serikat. Berdasarkan beberapa preposisi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk doktrin pertahanan masing-masing negara mengarahkan mereka untuk mengambil posisi defensif. Hal itu juga semakin ditegaskan dengan konsentrasi kapabilitas yang cenderung banyak pada persenjataan defensif.¹¹⁷

Pada model yang ditawarkan Biddle, pihak bertahan dan keseimbangan yang memihak pada posisi defensif lebih memiliki banyak peluang untuk terjadi. Dengan strategi Indonesia dan Malaysia yang bersifat mendalam dengan pertahanan berlapis, serangan yang *high attempted* maupun *low attempted* tidak mendapatkan peluang yang besar. Sebaliknya, posisi defensif masih diuntungkan dan keseimbangan lebih bergerak pada dominasi defensif. Dengan demikian, dalam kasus Indonesia dan Malaysia, serangan yang ditujukan kepada mereka masih dapat dihadapi sehingga masih memberikan peluang bagi kedua negara tersebut untuk memenangi peperangan. Seandainya Singapura sebagai negara yang memiliki kapabilitas untuk melakukan serangan *low attempted velocity* menyerang Indonesia atau Malaysia, secara strategis, keuntungan masih ada di pihak bertahan. Secara logis, Singapura tidak akan melakukan penyerangan sehingga mengakibatkan situasi yang terbentuk adalah *defense dominance*.

¹¹⁷ Lihat penjelasan variabel teknologi dan besar kekuatan pada bagian awal penelitian ini. Disebutkan bahwa teknologi persenjataan serta konsentrasi kapabilitas yang dimiliki Indonesia, Malaysia, dan Singapura mendukung *defense dominance*.

Tabel 4.13
Model Penggelaran Senjata Stephen Biddle

Defender:	Attacker:	
	High Attempted Velocity (exposed)	Low Attempted Velocity (covered, concealed, dispersed; movement integrated with fires)
Deep, large reserve withhold	Contained Offensive: • very high attacker losses • very large numerical preponderance required to prevail Very defense-favorable balance	Contained Offensive: • moderate attacker losses • large numerical preponderance required to prevail Moderately defense-favorable balance
Shallow, small reserve withhold	Contained Offensive: • very high attacker losses • very large numerical preponderance required to prevail Very defense-favorable balance	Breakthrough: • low attacker losses • numerically inferior attacker can prevail Very offense-favorable balance

Demikian juga halnya dengan Singapura, negara ini juga menikmati keseimbangan yang bergerak ke arah defensif. Karena keterbatasan wilayah, pertahanan Singapura hanya dapat berbentuk pertahanan dangkal. Kapabilitas Singapura, mau tidak mau, akan bersifat ofensif atau minimal dipersepsikan ofensif karena pengaplikasiannya akan berada pada wilayah negara lain.¹¹⁸ Kemampuan pertahanan yang minim ini masih mendapatkan keuntungan dari keseimbangan yang bergerak ke arah defensif karena Indonesia dan Malaysia tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan yang *low attempted velocity*. Dengan demikian pertahanan Singapura yang dangkal masing memberikan proteksi yang memadai. Secara konsekuen, hal ini mengindikasikan bahwa Singapura berada dalam kondisi yang didominasi defensif.

Pada akhirnya, doktrin pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengisyaratkan satu hal yang sama, dominasi defensif semakin diuntungkan dengan keseimbangan yang mendukung pihak bertahan. Dominasi defensif ini tidak didapatkan dari sekedar identifikasi persenjataan, apakah bersifat ofensif ataupun defensif, tetapi berdasarkan bagaimana negara menggunakan persenjataan tersebut. Terlihat bahwa, baik Indonesia, Malaysia, dan Singapura menggunakannya untuk pertahanan yang defensif. Meskipun ada insentif untuk berlaku ofensif, Singapura tetap menjaga perilakunya untuk tujuan-tujuan

¹¹⁸ Lihat penjelasan variabel geografi mengenai *combat radius* jet tempur Singapura. Mengingat wilayah Singapura yang kecil, *combat radius* jet tempur mereka tidak hanya sekedar melindungi teritori tetapi juga hingga mencapai wilayah utara Malaysia dan bahkan hingga seluruh Pulau Kalimantan.

pertahanan defensif. Dengan demikian semakin mempertegas dominasi defensif di antara ketiga negara ini.

IV.5. *Assessment Terhadap Offense-Defense Theory.*

IV.5.1. Hubungan Antar Variabel.

Keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini berhasil menunjukkan adanya *Offense-Defense Balance* di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Memang masih terdapat perbedaan signifikansi dari masing-masing variabel tersebut, namun meskipun kontribusi beberapa variabel lebih kecil dari yang lainnya, variabel-variabel tersebut tetap memiliki hubungan yang berdampak pada variabel dependen yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa tidak terjadi perang *imbalance of power* di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Disparitas teknologi persenjataan dan kapabilitas secara keseluruhan seharusnya menjadikan letupan-letupan dalam hubungan ketiga negara ini berbuah pada konflik dan perang yang nyata. Keempat variabel berhasil membuktikan bahwa dalam masing-masing variabel ditemukan *defense dominance* yang mencegah terjadinya perang. Fenomena ini dibuktikan kebenarannya melalui kajian masing-masing variabel yang menunjukkan hasil yang positif.

Pertama, variabel teknologi yang melihat teknologi dan kapabilitas militer negara memberikan kaitan langsung untuk terciptanya *defense dominance*. Teknologi persenjataan yang dimiliki setiap negara memang berlainan. Negara juga memiliki penekanan pada kepemilikan beberapa senjata ofensif. Namun penentuan posisi kapabilitas sebuah negara ofensif atau defensif tidak berdasarkan pada kuantitas kepemilikan senjata yang terlihat ofensif ataupun defensif. Lebih dalam lagi, penentuan posisi tersebut dikaitkan dengan kepemilikan persenjataan serupa dalam konteks ketiga negara sehingga terlihat perimbangan relatif yang menunjukkan penilaian yang lebih tepat. Dengan menghitung index masing-masing persenjataan, menghitung nilai index dan kuantitas, serta memposisikan data tersebut dalam konteks tiga negara, maka muncul penilaian bahwa kapabilitas persenjataan yang dimiliki Indonesia, Malaysia, dan Singapura bersifat defensif. Hal tersebut ditarik berdasarkan rasio perang yang dimunculkan mendekati/lebih

dari 1.00. Hasil ini mengindikasikan terbentuknya *defense dominance* sebagai konsekuensi bahwa posisi defensif lebih diuntungkan dalam situasi tersebut.

Kedua, variabel besar kekuatan yang mengkaji besar dan konsentrasi kekuatan negara memberikan kaitan langsung untuk terciptanya *defense dominance*. Melihat konsentrasi kapabilitas dapat memberikan umpan untuk menentukan posisi sebuah negara berorientasi pada defensif atau ofensif. Berdasarkan data yang dipaparkan, terlihat bahwa akumulasi dan konsentrasi persenjataan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura berpusat pada persenjataan yang bersifat pertahanan defensif. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah senjata yang memiliki mobilitas rendah, daya jangkauan rendah, belum mengaplikasikan teknologi informasi termmodern, namun memiliki daya tembak yang tinggi. Mobilitas dan pengaplikasian teknologi komunikasi dan informasi menunjukkan kemampuan menyerang yang lebih baik, sebaliknya daya tembak lebih memihak persenjataan defensif yang tidak memiliki mobilitas tinggi. Akibat ciri khas tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga negara belum memiliki orientasi untuk berperilaku ofensif. Dengan demikian, *defense dominance* dimunculkan melalui orientasi negara untuk bertahan dan kondisi yang lebih menguntungkan pihak bertahan.

Ketiga, variabel geografi yang mengkaji kontur permukaan bumi dan jarak tempuh persenjataan menunjukkan ada dukungan terhadap pihak bertahan yang juga mengisyaratkan terbentuknya *defense dominance*. Geografi memberikan peluang dan hambatan bagi penyerang. Dalam penelitian ini terlihat bahwa faktor bentang alam dan kontur permukaan bumi di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Singapura memberikan hambatan untuk melakukan penyerangan. Hal ini diakibatkan adanya hutan dan pegunungan yang menjadi keuntungan Indonesia dan Malaysia jika melakukan posisi bertahan dengan doktrin pertahanan mereka yang menggelar kekuatan secara mendalam dan berlapis. Singapura memiliki lebih sedikit keuntungan dalam bertahan karena tidak memiliki kontur alam yang mendukung, namun ditilik dari kepemilikan senjata negara-negara lainnya, Singapura masih cukup kuat dengan pertahanan yang dangkal. Hal tersebut dikarenakan ada bentang laut yang juga memberikan hambatan bagi mobilisasi pasukan darat. Namun di sisi lain juga terdapat keuntungan bagi penyerang karena

jarak antara negara yang dekat. *Proximity* baik pada garis perbatasan ataupun pada ibukota (CoG) dari masing-masing negara tidak terlampau jauh. Dengan jarak yang tidak terlampau jauh, penyerangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan pihak bertahan hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan pertahanan. Oleh karena itu berdasarkan variabel geografi, terdapat baik peluang dan hambatan bagi penyerangan, hal tersebut akan kembali pada bagaimana negara menggunakan kesempatan ini. Namun dengan mengaitkan pada variabel lainnya, maka hambatan dari geografi ini akan dirasa lebih dominan terjadi. Pada akhirnya negara akan kembali pada posisi untuk bertahan sehingga *defense dominance* kembali mendapatkan peningkatan signifikan.

Keempat, variabel penggelaran kekuatan yang melihat bentuk penggelaran kekuatan negara berdasarkan doktrin militer yang dianutnya memberikan penegasan bahwa ketiga negara tersebut diliputi *defense dominance* sehingga berperilaku defensif untuk menjaga keamanannya. Doktrin pertahanan masing-masing negara terlihat mengutamakan posisi bertahan. Ketika doktrin tersebut disesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki masing-masing negara, maka terlihat bahwa orientasi Indonesia, Malaysia, dan Singapura memang mengarah pada posisi defensif. Namun khusus untuk Singapura, doktrin pertahanan mereka memiliki unsur ofensif karena menekankan pada kapabilitas pertahanan yang mampu mengoperasikan kekuatan serang saat jalur diplomasi gagal. Akan tetapi tidak berarti Singapura memilih posisi ofensif karena doktrin pertahanannya juga jelas mengatakan bahwa kepemilikan persenjataan Singapura hanya sebagai *countermeasure* saat diplomasi gagal. Berdasarkan tabel kemungkinan peperangan menurut Biddle, dalam kasus Indonesia, Malaysia, dan Singapura, keuntungan yang lebih besar ada di pihak bertahan. Baik dengan pertahanan berlapis dan mendalam ataupun pertahanan yang dangkal, pihak bertahan masih memiliki keuntungan daripada pihak penyerang. Dengan demikian sesungguhnya doktrin pertahanan masing-masing negara masih terpengaruh untuk pembentukan *defense dominance*.

IV.5.2. Signifikansi Empat Variabel Penelitian.

Keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan signifikansi dengan menjustifikasi bahwa *defense dominance* benar terjadi dalam hubungan di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sehingga tidak menghasilkan perang *imbalance of power*. Signifikansi ini diperoleh dari masing-masing analisa variabel yang menunjukkan terbentuknya *defense dominance* berdasarkan teknologi persenjataan, besar kekuatan, geografi, dan pengeluaran kekuatan yang bersifat defensif. Akan tetapi masing-masing variabel memiliki variasi kekuatan pembentuk *defense dominance*. Beberapa variabel memberikan pengaruh secara langsung, namun variabel lain memberikan pengaruh yang tidak langsung. Namun secara keseluruhan, keempat variabel ini menunjukkan fungsi saling melengkapi sehingga kekuatan salah satu variabel tidak dapat dilepaskan dari pengaruh variabel lainnya. Misalnya variabel geografi tidak mendapatkan efek penjelasan yang kuat jika tidak didukung data dan analisa dari variabel besar kekuatan dan teknologi persenjataan. Demikianlah keempat variabel ini berperan dengan karakteristik masing-masing.

Variabel yang kuat memberikan pengaruh pada *defense dominance* adalah variabel teknologi persenjataan dan besar kekuatan. Melalui penghitungan index persenjataan dan melihat konsentrasi persenjataan, maka dapat dibuktikan secara matematis bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki kapabilitas yang bersifat defensif. Kesimpulan ini di dapatkan dalam konteks perimbangan kapabilitas relatif sehingga kepemilikan senjata ofensif tidak lantas membuat negara tersebut menjadi penyerang, sebaliknya penempatan pada konteks tiga negara memberikan gambaran yang lebih tepat dan kontekstual. Kekuatan dua variabel ini juga didasarkan pada penghitungan dan data-data statistik yang disertakan sehingga memberikan pengukuran yang lebih *tangible*. Penjelasan melalui tabel dan diagram mampu memberikan bentuk perbandingan yang lebih nyata sehingga memudahkan analisa dan pengambilan kesimpulan. Dengan demikian variabel teknologi dan besar kekuatan memiliki kapasitas lebih besar untuk menunjukkan terbentuknya *defense dominance*.

Akan tetapi terdapat pula variabel yang kurang dominan, variabel geografi dapat dikatakan bukan variabel dominan dan variabel pengeluaran kekuatan

sesungguhnya dapat menjadi variabel yang dominan namun fungsi penjelasan dari variabel ini mensyaratkan adanya penjelasan awal dari variabel lainnya. Variabel geografi tidak menjadi variabel dominan karena tidak secara langsung menunjukkan negara tersebut menganut dominasi ofensif atau defensif, tetapi lebih ke arah memberikan hambatan dan peluang bagi terciptanya serangan. Ketika elemen hambatan yang lebih dominan terjadi maka pihak bertahan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga membantu terciptanya *defense dominance*. Sifat eksplanasi yang tidak mempengaruhi secara langsung menyebabkan variabel geografi tidak dapat dilepaskan dari kajian variabel lainnya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan akhir.

Sedangkan variabel gelar kekuatan tidak menjadi variabel dominan karena ditujukan untuk memberikan penegasan atas variabel lainnya. Dengan mengetahui sebuah negara memiliki doktrin pertahanan yang defensif bukan berarti negara tersebut lantas disorong oleh *defense dominance* tetapi karena terlebih dahulu ada penjelasan variabel lainnya bahwa kepemilikan persenjataan suatu negara bersifat defensif, gelar yang defensif dapat mempertegas bahwa negara tersebut memang memiliki orientasi untuk sekedar bertahan. Dengan data-data yang disediakan analisa variabel sebelumnya, tabel peperangan Biddle dapat dijustifikasi kebenarannya. Hal ini menunjukkan ketegantungan variabel gelar kekuatan terhadap variabel lainnya sehingga hanya dapat dioperasionalisasi saat variabel sebelumnya telah menunjukkan signifiikansi mereka.

IV.5.3. Kritik Terhadap *Offense Defense Theory*

Analisa penelitian ini menunjukkan *defense dominance* memang terjadi di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena alasan inilah perang tidak muncul sebagai konsekuensi dari *imbalance of power*. Sebaliknya stabilitas yang terjadi tetap dapat dipertahankan meskipun tetap terjadi dinamika hingga mencapai spektrum negatif yang berupa perselisihan yang melibatkan kekuatan bersenjata. *Defense dominance* diperoleh dari teknologi, besar kekuatan, geografi, dan gelar kekuatan yang menguntungkan posisi bertahan. Meskipun

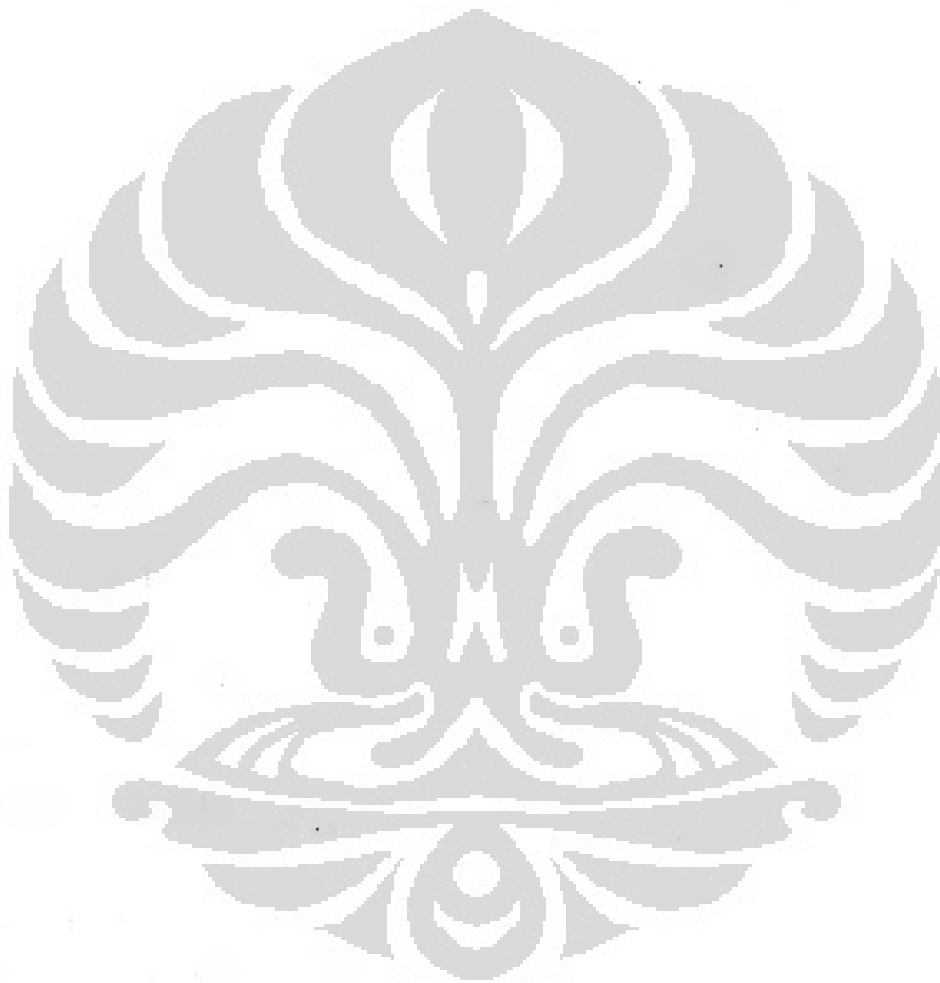
masing-masing variabel memiliki kekuatan penjelasan yang berbeda-beda, namun keempat variabel ini efektif dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Akan tetapi masih ada beberapa kekurangan yang harus disoroti dari *Offense Defense Theory* demi perkembangan yang lebih baik ke depannya. Pertama, terjadi ketimpangan kekuatan variabel antara variabel yang bersifat teknis seperti teknologi dan besar kekuatan dibandingkan variabel yang lebih bersifat ideal seperti geografi dan pengeluaran kekuatan. Perbedaan kekuatan penjas ini bukan berarti variabel geografi dan pengeluaran kekuatan tidak perlu dipakai, tetapi hal ini menunjukkan perhatian akademisi yang masih kurang terhadap variabel ini. *Offense Defense Theory* hingga perkembangan oleh Biddle masih berfokus pada teknologi dan kemampuan militer, faktor-faktor strategis lainnya kurang diperhatikan sehingga teori ini justru mengarah pada pengkajian taktis dibanding pengkajian strategis.

Kedua, kelemahan di atas didorong oleh kurangnya metode untuk mengkuantifikasi dan menghitung variabel yang bersifat ideal. Memang, melakukan pengukuran untuk hal-hal yang bersifat ideal sulit dilakukan karena objek penelitian sendiri tidak *tangible*. Oleh karenanya perlu ada penelitian lebih lanjut sehingga mampu menghasilkan metode penghitungan yang lebih baik untuk hal-hal yang bersifat ideal. Dengan memberikan perhatian kepada pengukuran variabel yang bersifat ideal, setidaknya *Offense Defense Theory* lebih diarahkan kembali pada jalur pengkajian strategis a la neorealisme yang lebih menekankan pada faktor-faktor struktural ketimbang kajian yang mendetail pada keadaan sebuah negara tertentu.

Ketiga, penelitian ini berhasil menambah khazanah *Offense Defense Theory* dengan memberikan penjelasan bahwa teori ini mampu diaplikasikan pada negara berkembang dan dilakukan pada tiga negara (bukan *dyadic*). Salah satu kritik pada teori ini adalah kurangnya pembuktian akibat kajian pembuktian teori ini yang masih sedikit. Namun melalui penelitian ini setidaknya ada wawasan baru bahwa *Offense Defense Theory* juga kompatibel dengan beberapa permasalahan di luar konflik negara besar. Meskipun demikian perlu adanya perbaikan dalam beberapa bentuk metode penghitungan untuk mencapai sebuah bentuk teori yang aplikatif dan lebih kompatibel dengan permasalahan-

permasalahan lainnya. Di hadapan ke depannya, *Offense Defense Theory* dapat memperkaya kajian mengenai *causes of war* dengan penelitian yang lebih detail tetapi mampu diaplikasikan pada rentang jenis kasus yang luas.



Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini berangkat dari keadaan ketidakseimbangan (*imbalance of power*) di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Keadaan ini muncul akibat disparitas teknologi militer yang berimbas pada perbedaan kapabilitas. Malaysia dan Singapura sudah mulai mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam persenjataannya. Indonesia sendiri memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar dari negara tetangganya. Berdasarkan luas wilayah, terlihat sangat jauh perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Menurut teori Balance of Power, perbedaan kapabilitas inilah yang menyebabkan perang dapat terjadi. Negara yang tidak ikut berkompetisi akan dieliminasi dari sistem. Perang terjadi sebagai mekanisme yang wajar dari kompetisi dalam sistem internasional. Maka berdasarkan presaposisi ini, sewajarnya terjadi perang di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai akibat dari *imbalance of power* yang terjadi.

Pemicu yang kecil sudah cukup untuk meletupkan perang di antara ketiga negara ini, namun pada kenyataannya perang tidak pernah terjadi. Dengan definisi perang oleh David Singer dan Melvin Small yang termuat pada proyek *Correlates of War*, maka dinyatakan tidak pernah terbentuk perang di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dinamika ketiga negara tersebut sangat beragam, mulai spektrum yang paling positif yaitu terdapat kerjasama keamanan di antara mereka hingga spektrum paling negatif yaitu adanya ketegangan yang melibatkan kekuatan bersenjata. Dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masing-masing negara sehingga dapat dipandang bahwa hubungan ketiga negara ini menyimpan paradok. Di satu sisi mereka bersatu dan mencita-citakan perdamaian melalui mekanisme kerjasama bilateral dan multilateral seperti ASEAN. Namun di sisi lain ketiga negara ini juga berusaha memaksakan kepentingan mereka sehingga timbul perselisihan yang sudah memuncak dengan penggunaan kekuatan bersenjata sebagai instrumennya. Dalam keadaan yang kompleks ini, dimana perang dapat terjadi dengan pemicu yang kecil, perang tetap tidak terjadi di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Permasalahan tidak terciptanya perang *imbalance of power* di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dijawab dengan *Offense Defense Theory*. Teori ini menyatakan bahwa perang terjadi karena *offense dominance* terbentuk di antara negara-negara. Sebaliknya perang tidak terjadi jika *defense dominance* yang terbentuk. Hipotesa pertama penelitian ini menyatakan, “tidak terbentuknya perang *imbalance of power* di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebabkan adanya *defensive dominance* yang tidak menguntungkan tindakan penyerangan.” Terbentuknya *defense dominance* menjadikan keadaan yang *imbalance of power* tidak sanggup mengeskalasi peristiwa perselisihan menjadi perang. Ketiga negara sama-sama memiliki orientasi untuk bertahan dan memang pada saat ini keadaan bertahan yang memiliki keuntungan lebih besar. Oleh karena itu negara tetap memilih untuk bertahan dan tidak melakukan penyerangan sehingga dengan demikian tidak terbentuk perang.

Hipotesa tersebut terbukti karena *defense dominance* memang terjadi di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Terbentuknya *defense dominance* dihasilkan dari empat variabel: teknologi, besar kekuatan, geografi, dan pengeluaran kekuatan. Keempat variabel ini adalah hasil sintesis dari pemikirang Glaser, Kaufmann, dan Biddle. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikatakan dioperasionalisasi berdasarkan pemikiran dari evolusi terakhir *Offense Defense Theory* tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan penelitian bagi khazanah teori tentang pembentukan perang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas kepada para pengambil kebijakan agar mereka dapat melihat kunci dari stabilitas yang selama ini dirasakan.

Hipotesa kedua, “terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel teknologi yang mendukung posisi bertahan”, dinyatakan terbukti. Kesimpulan ini dihasilkan dari penghitungan yang mengkombinasikan kualitas dan kuantitas persenjataan ketiga negara. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa berdasarkan nilai Tingkat Ofensivitas yang dihasilkan, tidak memungkinkan dilakukannya penyerangan. Dengan rasio perang yang mendekati atau lebih dari 1.00, perang tidak mungkin dimenangkan pihak penyerang karena pihak bertahan memiliki keuntungan yang lebih besar dalam kondisi seperti ini. Kondisi yang

menguntungkan pihak bertahan menindikasikan *defense dominance* terbentuk sehingga menghindarkan terjadinya inisiatif menyerang yang menciptakan perang.

Hipotesa ketiga, “Terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel besar kekuatan yang memiliki konsentrasi pada persenjataan defensif”, dinyatakan terbukti. Beberapa kapabilitas ofensif memang dimiliki ketiga negara ini, namun konsentrasi kapabilitas secara kuantitas berada pada kepemilikan senjata defensif. Pengertian senjata defensif sendiri merujuk pada jenis persenjataan yang tidak mengaplikasikan teknologi informasi dan tidak memiliki mobilitas yang tinggi. Sedangkan kekuatan tembak masih menjadi faktor relatif yang mampu memberikan nilai yang sama baik kepada jenis ofensif maupun defensif. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura masih menekankan pada kepemilikan senjata yang bersifat defensif.

Hipotesa keempat, “terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel geografi yang menguntungkan posisi bertahan”, dinyatakan terbukti. Di satu sisi kedekatan jarak menjadi faktor yang mendukung penyerang untuk melakukan operasi kilat yang berada dalam radius peperangan persenjataannya. Akan tetapi Indonesia dan Malaysia menikmati kontur permukaan bumi yang menguntungkan dilakukannya pertahanan berlapis dan mendalam. Singapura sendiri memiliki wilayah perairan yang mampu menjadi lapisan pertahanan terluar. Meskipun tidak terlalu berpengaruh, namun berdasarkan analisa besar kekuatan, Indonesia dan Malaysia belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk melakukan peperangan melintasi bentangan perairan. Dengan demikian masih tercipta keuntungan dari segi geografi yang menunjukkan posisi *defense dominance* semakin menguat terjadi di antara ketiga negara ini.

Hipotesa kelima, “terbentuknya *defensive dominance* disebabkan variabel pengeluaran senjata yang lebih menguntungkan posisi bertahan”, dinyatakan terbukti. Terlepas dari kapabilitas yang dimiliki, ketiga negara menyatakan bahwa pertahanan mereka mencari pelestarian *status quo* yang berarti mengedepankan pertahanan defensif. Indonesia dan Malaysia berorientasi untuk melakukan pertahanan yang mendalam dan berlapis. Hal ini ditunjang oleh bentuk permukaan bumi yang memberikan ruang untuk mengoperasikan lapisan pertahanan.

Sedangkan Singapura yang tidak memiliki cukup ruang tetap mengedepankan pertahanan defensif meskipun tidak berlapis. Hal ini ditunjukkan dengan strategi pertahanan Singapura yang mengedepankan diplomasi. Terlebih lagi dengan analisa berdasarkan matriks peperangan dari Stephen Biddle, jika perang terjadi di antara ketiga negara ini, maka yang akan diuntungkan adalah pihak bertahan. Baik pertahanan berlapis maupun pertahanan dangkal tetap memberikan keuntungan pada pihak bertahan, dan dengan demikian semakin menguatkan argument bahwa *defense dominance* terbentuk di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Keberhasilan pembuktian *defense dominance* terbentuk di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura tidak lantas menunjukkan kekuatan pembuktian *Offense Defense Theory* sudah sempurna. Dalam penelitian ini nampak bahwa ada variabel yang cukup dominan seperti teknologi dan besar kekuatan. Sejak awal teori ini memang selalu dipermasalahkan karena menitikberatkan keseluruhan kajian strategis pada elemen teknologi persenjataan. Padahal pengkajian strategis juga mengkaji hal-hal yang bersifat ideal. Kekurangan untuk memberikan paparan yang sama kuat untuk hal-hal yang bersifat ideal adalah salah satu kekurangan teori ini.

Selain itu, kekurangan kekuatan pemaparan tersebut dihasilkan dari belum tersedianya metode penghitungan/pengukuran yang akurat dan diterima secara umum untuk mengkaji hal-hal yang bersifat ideal. Dalam penelitian ini, variabel teknologi dan besar kekuatan mampu disajikan dengan data yang terkuantifikasi, namun variabel geografi dan pengeluaran kekuatan belum mampu dibuktikan secara matematis. Hal ini menunjukkan perlu ditemukannya sebuah metode pengukuran sehingga *Offense Defense Theory* mendapatkan pengakuan yang lebih luas untuk kekuatan penjelasannya. Pada akhirnya, penelitian ini hanyalah fondasi awal untuk mengaplikasikan *Offense Defense Theory*. Penggunaan empat variabel di atas dinilai cukup menjelaskan argumen penulis. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menyempurnakan pembahasan terkhusus di bagian metode pengukuran. Diharapkan teori yang masih baru ini dapat terus teruji dan menemukan bentuk paling ideal untuk menjelaskan permasalahan hubungan internasional secara mendetail namun tetap berlaku untuk rentang kasus yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Baylis, John and Steve Smith. 2001. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Buzan, Barry. 1991. *People, State and Fear*. New York: Harvester Wheatsheaf
- _____, Eric Herring. 1998. *Arms Dynamic in World Politics*. New York: Lynne Rienner Publisher.
- _____, Ole Weaver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. New York: Cambridge University Press.
- Brown, Michael, Owen R Cote, Sean M. Lynn-Jones, and Steven E. Miller (eds.). 1998. *Theories of War and Peace: An International Security Reader*. New York: The MIT Press.
- Clausewitz. 1843. *The Campaign of 1812 in Russia*. London: J. Murray
- Dunne, Kurki and Smith. 2001. *International Relations Theories*. New York: Oxford University Press
- Ellings, Richard and Aaron L. Friedberg (ed.). 2003. *Strategic Asia 2003-2004: Fragility and Crisis*. Seattle: National Bureau of Asian Research.
- Evera, Stephen. 1999. *Causes of War: Power and the Roots of Conflict*. New York: Cornell University Press.
- Globke, Wernwer. 2005. *Warship of The Worlf Fleet Handbook*. Bonn: Bernadr and Graefe Verlag.
- Goldman, Emily O. and Thomas J. Mankhem (eds.). 2004. *The Information Revolution in Military Affairs in Asia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gray, Colin S. 2006. *Strategy and History: Essay on Theory and Practice*. New York: Routledge.
- Holsti, K.J. 1996. *The State, War, and The State of War*. New York: Cambridge University Press.
- International Institute for Strategic Studies. 2008. *The Military Balance 2008*. London: Routledge.

- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Leifer, Michael (ed.). 2000. *Asian Nationalism*. New York: Routledge.
- Levy, Jack S. and William R. Thompson. 2010. *Causes of War*. Singapore: Wiley-Blackwell Publishing.
- Marriot, Leo. 2001. *Vital Guide to Modern Warship*. Ghremsbury: Airline Publishing, Ltd.
- Mearsheimer, John. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Miller, David and Chris Miller. 1986. *Modern Naval Combat*. London: Salamander Books Limited
- Mun, Tang Siew. 2009. *The Military Balance 2009*. London: IISS.
- Neuman, Lawrence. 2004. *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Inc.
- Nye, Joseph. 1993. *Understanding International Conflict: An Introduction to Theory and History*. New York: Longman.
- Small, Melvin. and David J. Singer. 1982. *Resort to Arms: International and Civil War, 1816–1980*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Schweller, Randall L. 1997. *Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest*. New York: Columbia University Press.
- Waltz, Kenneth. 1979. *Theory Of International Politics*. London: Addison-Wesley Publishing Company.
- Vasquez, John A. and Colin Elman (ed.). 2003. *Realism and The Balancing of Power*. New Jersey: Prentice Hall.
- Zakaria, Fareed. 1998. *From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Sumber Jurnal Ilmiah:

- Biddle, Stephen. (2001). "Rebuilding the Foundations of Offense-Defense Theory" *The Journal of Politics*, Vol. 63, No. 3.

- Bradford, John F. (2005). "The Growing Prospect for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia" *Naval War College Review*, Vol. 58, No. 3.
- Deutsch, Karl W. J. and David Singer. (1964). "Multipolar Power Systems and International Stability" *World Politics*, Vol. 16, No. 3.
- Evera. (1984) "The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War" *International Security*, Vol. 9, No. 1.
- Evera, Stephen. (1998). "Offense, Defense, and the Causes of War" *International Security*, Vol. 22, No. 4.
- Friedberg, Aaron L. (1993). "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia", *International Security* 18 (3).
- Glaser, Charles. (1997). "The Security Dilemma Revisited," *World Politics*, Vol. 50, No. 1.
- Glaser, Charles and Chaim Kaufmann. (1998). "What is the Offense-Defense Balance and Can We Measure it?" *International Security*, Vol. 22, No. 4.
- Harrison, Ewan. (2002) "Waltz, Kant and Systemic Approaches to International Relations" *Review of International Studies*, Vol. 28, No.1.
- Huntington, Samuel P. (1993). "Why International Primacy Matters," *International Security*, Vol. 17, No. 4.
- Jervis, Robert. 1978. "Cooperation Under Security Dilemma" *World Politics*, Vol. 30.
- Jervis, Robert. (1988) "War and Misperception" *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars.
- Jervis, Robert. (1991). "Arms Control, Stability, and Causes of War" *Daedalus*, Vol. 120, No. 1, Arms Control: Thirty Years On.
- Labs, Eric J. (1997). "Beyond Victory: Offensive Realism and the Expansion of War Aims," *Security Studies*, Vol. 6, No. 4.
- Lathrop, Coater G. (2008). "Sovereignty over Pedra Blanca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge" *The American Journal of International Law*, Vol. 102, No. 4.

- Leifer, Michael and Dolliver Nelson. (1973). "Conflict of Interest in the Strait of Malacca" *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 49, No. 2.
- Liddell Hart. (1960). "The Ratio of Troop to Space" *Military Review*, no. 40.
- Mearsheimer, John. (1982) "Why Soviet Can't Win Quickly in Central Europe?" *International Security*, Vol. 7, No. 1.
- Mearsheimer, John. (1990). "Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War," *International Security*, Vol. 15, No. 1.
- Mearsheimer, (1994). "The False Promise of International Institutions," *International Security*, Vol. 19, No. 3.
- Merils, J.G. (2003). "Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia vs. Malaysia), Merits. Judgement of 17 December 2002" *International and Comparative Law Quarterly* Vol. 52, No. 3.
- San, Khoo How. (2004). "Five Power Defense Arrangement: If It Ain't Broke..." *Journal of Singapore Armed Forces* Vol. 26, No. 4.
- Schweller, Randall L. (1994). "Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In," *International Security*, Vol. 19, No. 1.
- Snyder, Jack. (1984). "Civil-Military Relations and the Cult of the Offensive, 1914 and 1984" *International Security*, Vol. 9, No. 1.
- Taliaferro, Jeffrey W. 2000. "Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited" *International Security*, Vol. 25, No. 3.
- Waltz, Kenneth. (1988). "The Origin of War in Neorealist Theory" *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars.
- Waltz, Kenneth. (2000). "Structural Realism after the Cold War" *International Security*, Vol. 25, No. 1.

Dokumen Resmi Negara dan Organisasi:

- Cantu, D. Antonio dan Sandy Cantu. *The Vietnam War: A National Dilemma*.
Prepared for: America's History in the Making Oregon Public
Broadcasting by Organization of American Historians and the National
Center for History in the Schools, UCLA.

Secretary of U.S. Navy, "SECNAV Instruction 5030.8," diunduh dari http://www.fas.org/irp/doddir/secnavinst/5030_8.pdf, pada 6 Desember 16.23 WIB.

Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.

"Doktrin Pertahanan Negara 2008" berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Per/23/M/XII/2007.

"Strategi Pertahanan Negara" berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Per/22/M/XII/2007.

"Defending Singapore in the 21st Century", www.mindef.gov.sg, 1 Desember 2010.

"Lombok Treaty" *Newsletter: Media dan Reformasi Sektor Keamanan*, diterbitkan atas kerjasama IDSPS, AJI, dan FES Edisi III/06/2008.

Artikel Internet dan Surat Kabar:

Bassford, Christopher. "Clausewitz and His Works" diakses dari <http://www.clausewitz.com/readings/Bassford/Cworks/Works.htm#Absolute>, 5 Januari 2011

Clausewitz. On War, diakses dari <http://www.clausewitz.com/readings/OnWar1873/BK1ch01.html>, 5 Januari 2011

Er, Lam Peng. (8 Desember 2010). "Singapore's Security Outlook: The Immutability of History, Geography and Demography?" *The Military Balance 2009*, diakses dari

www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series5/pdf/5-4.pdf

Meilinger, Phillip S. (9 Desember 2010) "Paradoxes and Problems of Airpower" diakses dari <http://www.airpowerstudies.co.uk/AgileAirForce.pdf>

Razak, Imanuddin. (10 September 2010). "Ambalat Dispute, A Spat Between Neighbors", diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/06/ambalat-dispute-a-spat-between-neighbors.html>

Sarkees, Meredith Reid. (14 Desember 2010). "The COW Typology of War: Defining and Categorizing Wars" diakses dari

<http://www.correlatesofwar.org/COW2%20Data/WarData.../COW%20Website%20-%20Typology%20of%20war.pdf>,

“Five Power Defense Arrangement (FPDA)”, diakses dari

<http://www.globalsecurity.org/military/world/int/fpda.htm>, 26 November 2010, 14.23 WIB.

“Indonesia Kehilangan Sipadan dan Ligitan”, diakses dari

<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=3362>, 11 Oktober 2009, 13.15 WIB.

“Kapal Perang Malaysia Kembali Langgar Wilayah RI di Ambalat”, diakses dari

<http://www.antaranews.com/view/?i=1172563546&c=NAS&s=,27>, 27 Februari 2007, 17.19 WIB.

“Malaysia and Singapore: A Conflict of Insecurities”, diakses dari

http://www.yawningbread.org/arch_2002/yax-268.htm, 12 Maret 2010, 18.35 WIB.

“Malaysia National Defense Policy”, diakses dari

<http://www.globalsecurity.org/military/world/malaysia/policy.htm>, 1 Desember 2010, 17.55 WIB.

“Project History”, diakses dari <http://www.correlatesofwar.org/cowhistory.htm>, 23 November 2010, 18.19 WIB.

“The Project Gutenberg EBook of On War”, diakses dari www.gutenberg.org, 5 Januari 2011

“Areas in Sulawesi Sea within Malaysia’s Border”, *Malaysia Star*, 2 Maret 2005

“Indonesia Protest Malaysia’s Oil Pact”, *Associated Press*, 25 Februari 2005

Asian Economic News, 14 Oktober 2002.

New Strait Times, 5 Mei 2003.

www.gatra.com

www.kompas.com